



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



RINGKASAN EKSEKUTIF

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT) PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

2025

**Badan Perencana Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tuban**

**Direktorat Kerjasama dan Pengelolaan Usaha (DKPU)
ITS Surabaya**

LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan global yang hingga kini belum bisa diselesaikan bangsa Indonesia. Tantangan kemiskinan juga sedang dihadapkan pada pembangunan nasional dalam meningkatkan perekonomian dan menata kehidupan rakyat. Sementara kesejahteraan merupakan hak masyarakat yang harus diberikan oleh Pemerintah, khususnya Kabupaten Tuban yang diproyeksikan sebagai lumbung emas perekonomian Provinsi Jawa Timur karena menjadi daerah dengan investasi skala nasional dan internasional mengalami kondisi yang kontradiktif. Terdapat kesenjangan antara kelompok masyarakat dari lapisan sosial ekonomi yang berbeda di beberapa desa di Kabupaten Tuban menjadi indikasi ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesenjangan sosial yang perlu ditangani.

Penurunan Angka Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang tertuang pada Misi II RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021—2026, sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Tuban berhasil menurunkan 4 indikator kemiskinan yang dicatat oleh hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023. Berita Resmi Statistik oleh BPS Kabupaten Tuban menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 turun menjadi 177.250 jiwa, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 178.050 jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban juga mengalami penurunan dari 15,02 persen pada tahun 2022 menjadi sebesar 14,91 persen pada Tahun 2023. Meskipun Kabupaten Tuban masih menjadi salah satu dari lima Kabupaten/Kota miskin di Jawa Timur, tetapi Pemerintah Kabupaten Tuban secara konsisten mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada kurun waktu 2021-2023.

Program pengentasan kemiskinan dari dimensi ekonomi menitikberatkan pada kenaikan tingkat pendapatan warga dan kesejahteraan masyarakat umum secara keseluruhan. Bertambahnya jumlah penduduk miskin yang linier dengan meningkatnya pendapatan per kapita menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat strata sosial ekonomi atas (kaya) dan kelompok masyarakat strata bawah (miskin) masih sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah atau masyarakat miskin.

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan lainnya. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting dalam rangka memperkuat sinergi penanggulangan kemiskinan di daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tuban melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya. TKPKD Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas, perlu diselenggarakan fungsi penyusunan Rencana Aksi Kabupaten sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka perlunya menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebagai penjabaran dari rencana penanggulangan kemiskinan daerah.

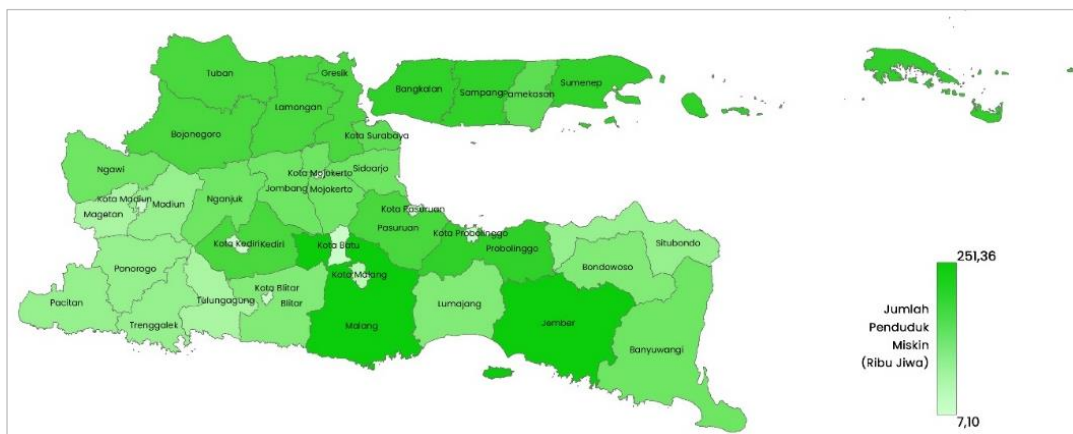
DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat;
4. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten tuban Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.

KONDISI UMUM KEMISKINAN KABUPATEN TUBAN

Empat indikator utama kemiskinan yang digunakan untuk mengetahui kondisi umum kemiskinan masyarakat terdiri dari: 1) Garis Kemiskinan; 2) Angka Kemiskinan; 3) Indeks Kedalaman Kemiskinan; 4) Indeks Keparahan Kemiskinan. Penduduk dapat dikategorikan miskin apabila pengeluarannya per bulan per kapita berada di bawah garis kemiskinan. Sebaran jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Timur ditampilkan pada Gambar 1.

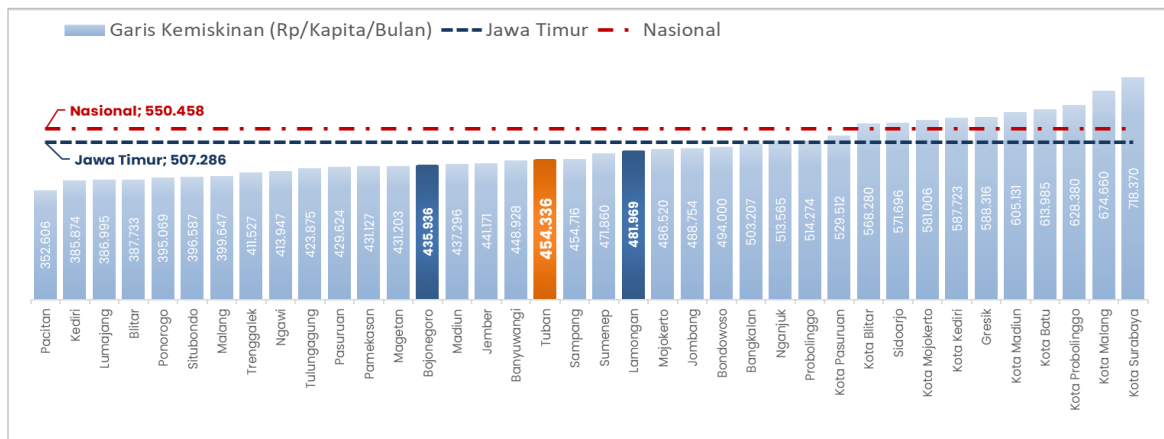


Gambar 1. Sebaran Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

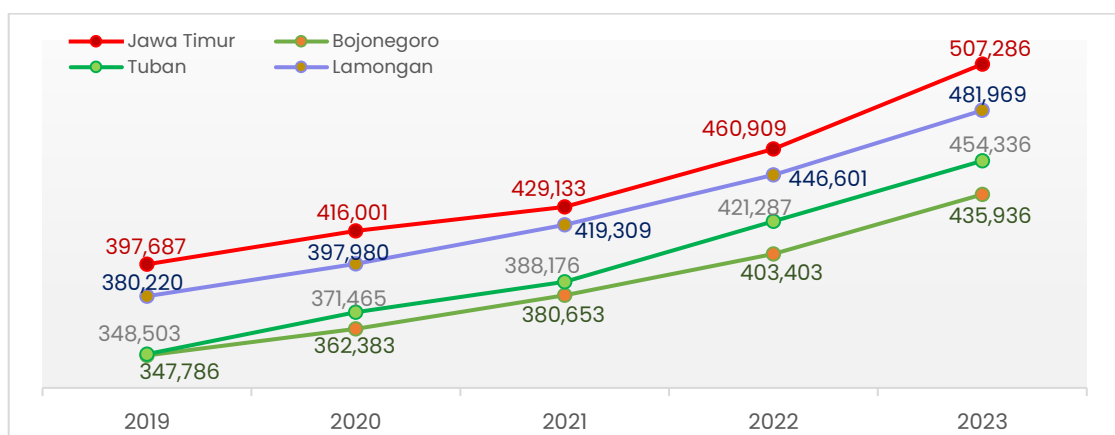
Kabupaten Tuban mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 177.250 jiwa, yang setara dengan 14,57% dari total populasi. Namun, penggunaan jumlah penduduk miskin sebagai metrik tunggal untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah dapat menimbulkan ketidaksetaraan karena disparitas jumlah penduduk di setiap wilayah. Garis kemiskinan, sebagai titik tolak untuk mengidentifikasi kelompok miskin, penting untuk analisis awal terhadap dimensi kemiskinan. Sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkat kemiskinan dan kompleksitasnya di berbagai daerah.

Penentuan Garis Kemiskinan (GK) didasarkan pada estimasi biaya yang diperlukan per kapita dalam satu bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimal sebesar 2.100 kilokalori per hari. Dalam Gambar 2, Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Tuban berada di bawah GK Nasional dan juga GK Jawa Timur. Dalam konteks perbandingan dengan wilayah sekitarnya, GK Kabupaten Tuban lebih tinggi dibandingkan dengan GK Kabupaten Bojonegoro, namun lebih rendah daripada GK Kabupaten Lamongan.



Gambar 2. Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 (Rp/Kapita/Bulan).

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

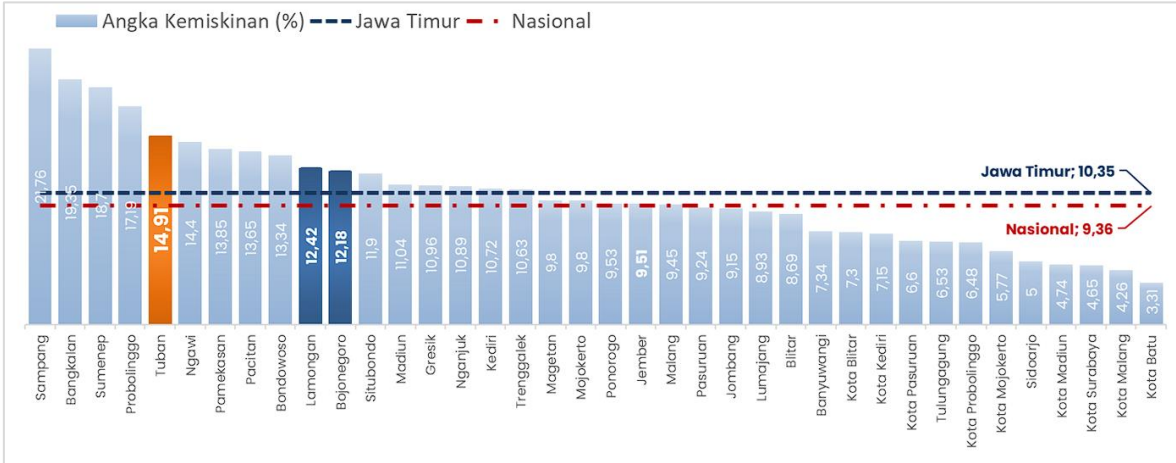


Gambar 3. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Gambar 3 menggambarkan tren perkembangan Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Tuban dari tahun 2019 hingga 2023, yang menunjukkan peningkatan setiap

tahunnya. Di tahun 2023, GK Kabupaten Tuban naik sebesar Rp 33.149,00 menjadi Rp 454.336,00. Namun, GK Kabupaten Tuban tetap berada di bawah GK Kabupaten Lamongan (Rp 481.969,00) dan GK Provinsi Jawa Timur (Rp 507.286,00). Kenaikan nilai Garis Kemiskinan pada tahun 2023 memiliki dampak pada meningkatnya angka kemiskinan, yang juga menjadi indikasi terjadinya kenaikan inflasi di Kabupaten Tuban. Hal ini menyoroti pentingnya pemantauan terhadap perubahan nilai GK sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan stabilitas ekonomi.

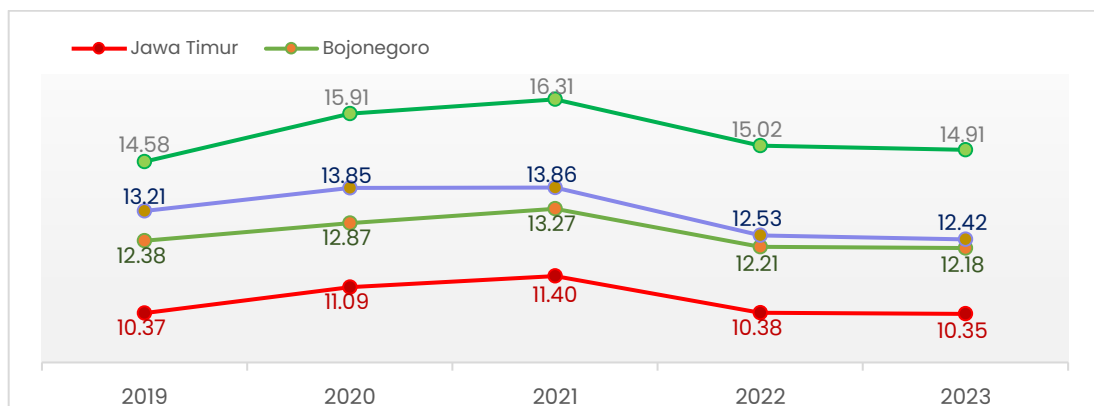


Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban Tahun 2023 (%).

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

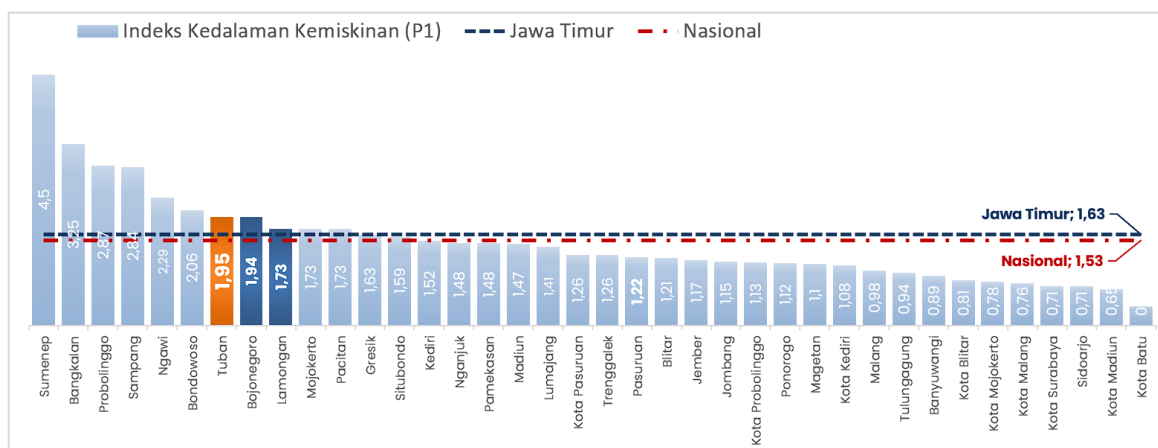
Persentase penduduk miskin mencerminkan proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total jumlah penduduk. Pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan menjadi 14,91%. Capaian ini melampaui angka kemiskinan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Di Provinsi Jawa Timur, persentase tersebut menempati peringkat kelima terbesar setelah Kabupaten Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Probolinggo (Gambar 4).

Jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban tergolong tinggi, dengan persentase selalu di atas 14 persen sejak tahun 2019 hingga 2023 (Gambar 5). Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah sekitarnya hanya berkisar antara 12-13 persen. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat penurunan, namun Kabupaten Tuban masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya.



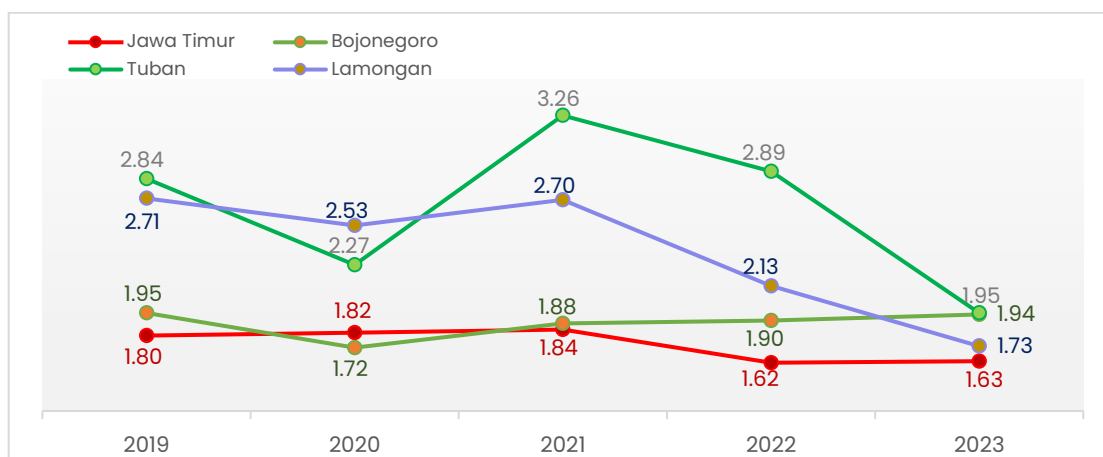
Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2023.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan antara pengeluaran masing-masing penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks P_1 , semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.



Gambar 6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

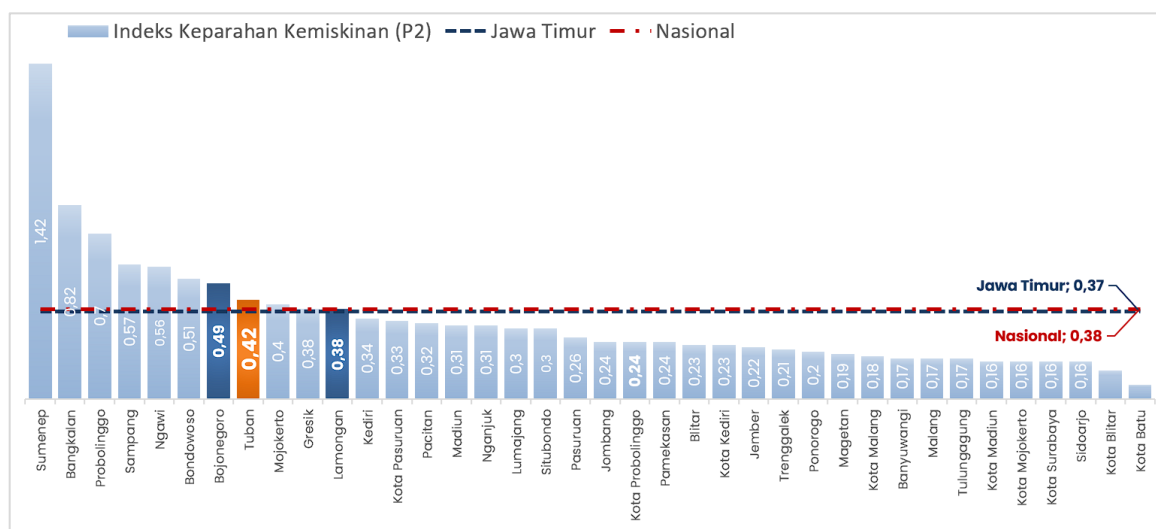
Capaian nilai P_1 Kabupaten Tuban di tahun 2023 yaitu sebesar 1,95 dan berada di urutan ke-7 terbesar di Jawa Timur. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai P_1 Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, serta masih di atas P_1 Jawa Timur (1,63) dan Nasional (1,53) (Gambar 6). Berdasarkan Gambar 7, dalam kurun lima tahun terakhir perkembangan P_1 menunjukkan tren yang cenderung turun. Perkembangan P_1 Kabupaten Tuban di tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan area sekitarnya dan angka tersebut merupakan capaian terendah yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran per kapita masyarakat miskin cukup tinggi terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Tuban.



Gambar 7. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.

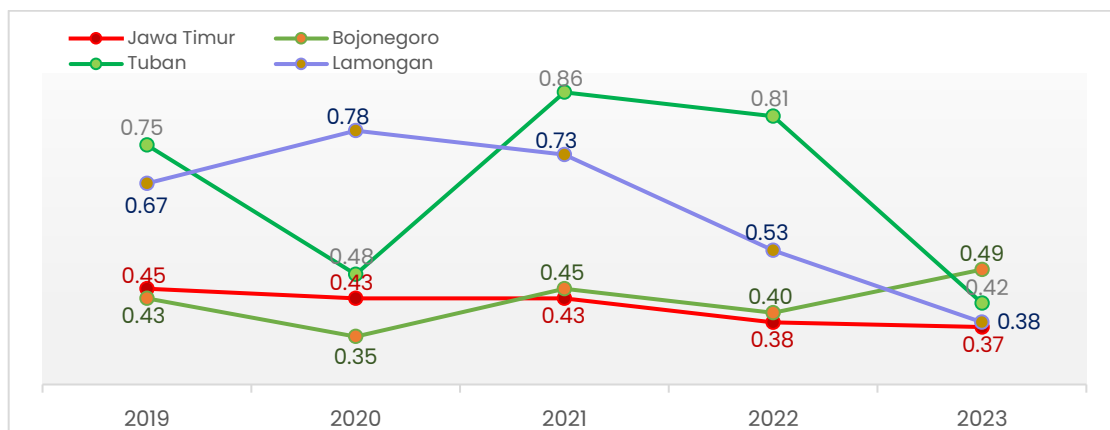
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin digambarkan dengan indeks keparahan kemiskinan (P_2). Semakin tinggi nilai indeks P_2 , maka semakin tinggi pula pengeluaran diantara penduduk miskin. Sebaran indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ditampilkan pada Gambar 8. Capaian indeks P_2 Kabupaten Tuban pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,42 menempati urutan ke-8 terbesar di Jawa Timur. Angka tersebut masih berada di atas angka capaian P_2 Provinsi Jawa Timur, Nasional, dan Kabupaten Lamongan. Namun, angka tersebut juga masih lebih rendah dari capaian Kabupaten Bojonegoro (Gambar 8).



Gambar 8. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P_2) di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2023 (%).

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)



Gambar 9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Seperti halnya dengan P₁, nilai P₂ Kabupaten Tuban juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya (Gambar 9). Tren P₂ Kabupaten Tuban dalam dua tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Meskipun pada tahun sebelumnya (2022) terdapat penurunan nilai, namun penurunan P₂ tidak sebesar yang terjadi pada tahun 2023.

Dalam lima tahun terakhir jika dibandingkan dengan daerah sekitar dan Provinsi Jawa Timur, beberapa indikator kemiskinan Kabupaten Tuban masih berada pada nilai yang cukup tinggi (Tabel 1). Penurunan angka kemiskinan tahun 2022 ke 2023 di Kabupaten Tuban juga tidak signifikan dibandingkan dengan daerah sekitar. Artinya, meskipun perubahan indikator kemiskinan seperti P₁ dan P₂ cukup signifikan, Kabupaten Tuban membutuhkan usaha yang lebih untuk masalah kemiskinan. Hal yang sama juga dilakukan oleh daerah lain sehingga di tahun 2023 urutan Kabupaten Tuban masih berada di peringkat lima terbawah berdasarkan nilai kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

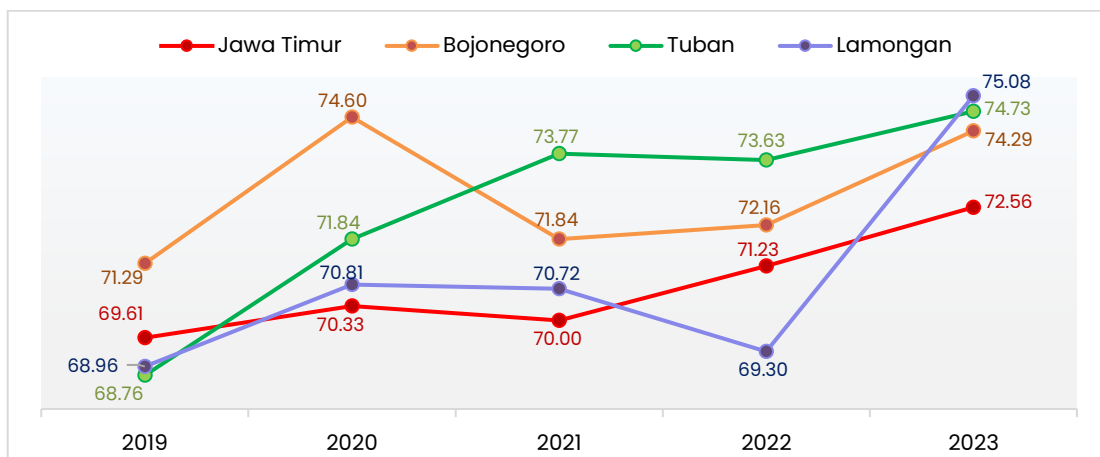
Tabel 1. Perubahan Indikator Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kemiskinan	Jawa Timur	Bojonegoro	Tuban	Lamongan	Gresik
Garis Kemiskinan (Rp)	46.377	32.533	33.049	35.368	51.772
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	7,52	-0,15	-0,8	-1,14	0,11
Angka Kemiskinan (%)	-0,03	-0,03	-0,11	-0,11	-0,1
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	0,01	0,04	-0,94	-0,40	-0,54
Indeks Keparahan Kemiskinan (P ₂)	-0,01	0,09	-0,39	-0,15	-0,51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

HASIL EVALUASI BIDANG KETENAGAKERJAAN

TPAK merupakan ukuran proporsi angkatan kerja atau penduduk usia kerja yang secara aktif ikut serta dalam pasar tenaga kerja, baik yang telah bekerja maupun yang masih pengangguran terhadap keseluruhan penduduk usia kerja. Perkembangan TPAK Kabupaten Tuban mulai tahun 2019 sampai 2023 disajikan dalam Gambar 10.

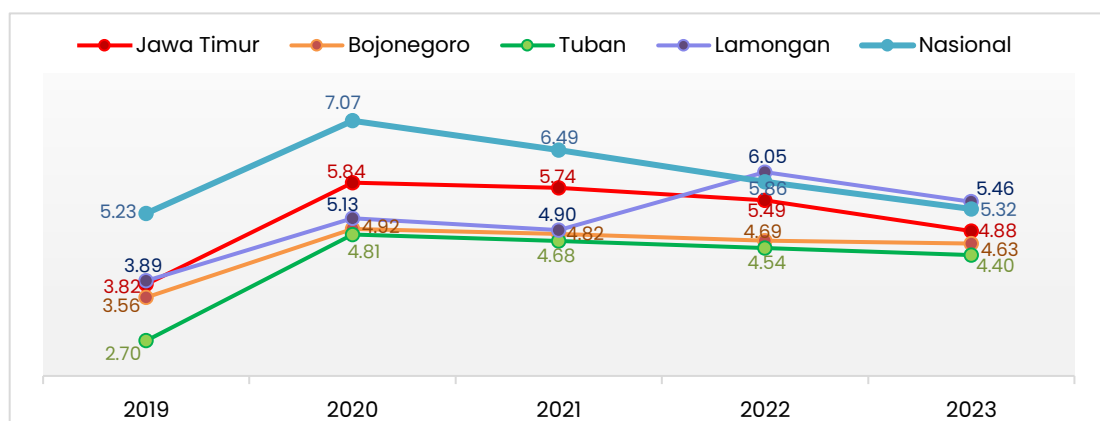


Gambar 10. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2018–2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Kondisi TPAK Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami tren kenaikan. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TPAK Kabupaten Tuban di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,1 persen menjadi 74,73 persen, sekaligus mencatat nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir. Adanya kenaikan TPAK menjadi indikasi penambahan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Nilai TPAK Kabupaten Tuban tahun 2023 lebih kecil dari nilai TPAK Kabupaten Lamongan yang mengalami kenaikan secara signifikan, namun lebih besar dari nilai TPAK Kabupaten Bojonegoro dan TPAK Jawa Timur. Perubahan nilai TPAK tersebut dipengaruhi oleh kesempatan kerja yang tersedia dan keinginan individu dalam mencari penghasilan.

Tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau terserap oleh pasar kerja dapat diukur menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT dapat diketahui melalui persentase perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah tenaga kerja keseluruhan.

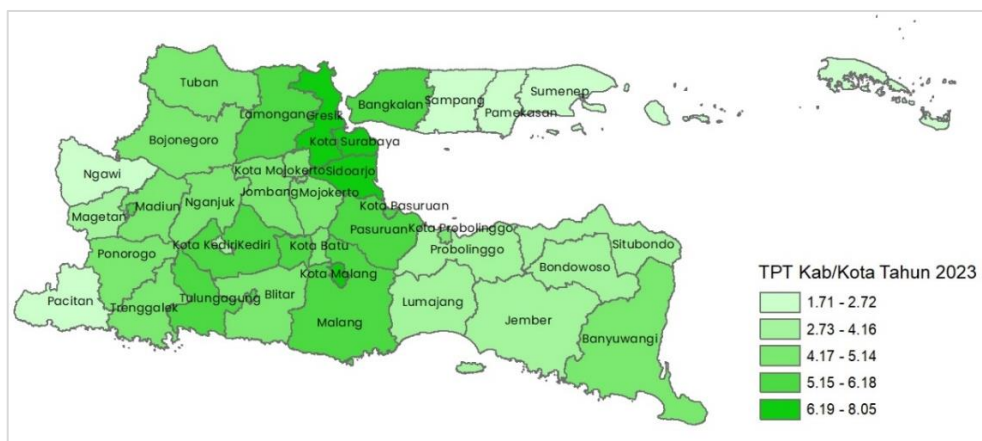


Gambar 11. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2018–2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Nilai TPT Kabupaten Tuban mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, namun mengalami tren penurunan sejak empat tahun terakhir (Gambar 11). Meskipun penurunan TPT Kabupaten Tuban tidak signifikan, namun selalu

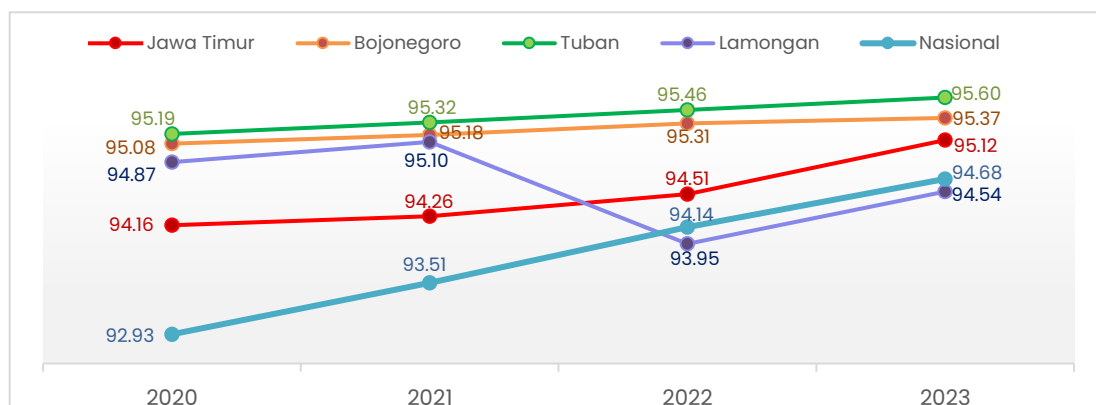
lebih kecil dibandingkan TPT daerah sekitarnya dalam rentang tahun 2020 – 2023. TPT Kabupaten Tuban di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 4,40 persen. Penurunan yang cukup kecil dan konstan selama empat tahun terakhir menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Tuban masih berusaha pulih pasca pandemi Covid-19.



Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Berdasarkan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten/kota lain di Jawa Timur seperti yang disajikan pada Gambar 12 Kabupaten Tuban memiliki TPT yang cukup rendah. Kabupaten Tuban pada tahun 2023 berada di posisi ke-13 Kabupaten/Kota dengan TPT terendah di Jawa Timur. TPT Kabupaten Tuban tahun 2023 sebesar 4,40 persen juga lebih rendah dibandingkan TPT Jawa Timur sebesar 4,88 persen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Tuban dapat diserap dengan baik oleh kondisi pasar tenaga kerja atau lapangan kerja yang tersedia.

Kenaikan TKK Kabupaten Tuban dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,14 persen, namun selalu lebih tinggi dibandingkan TKK di wilayah sekitarnya yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan. Nilai TKK Kabupaten Tuban juga selalu berada diatas TKK Provinsi Jawa Timur dan Nasional seperti yang disajikan pada Gambar 13.



Gambar 13. Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2018-2023.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

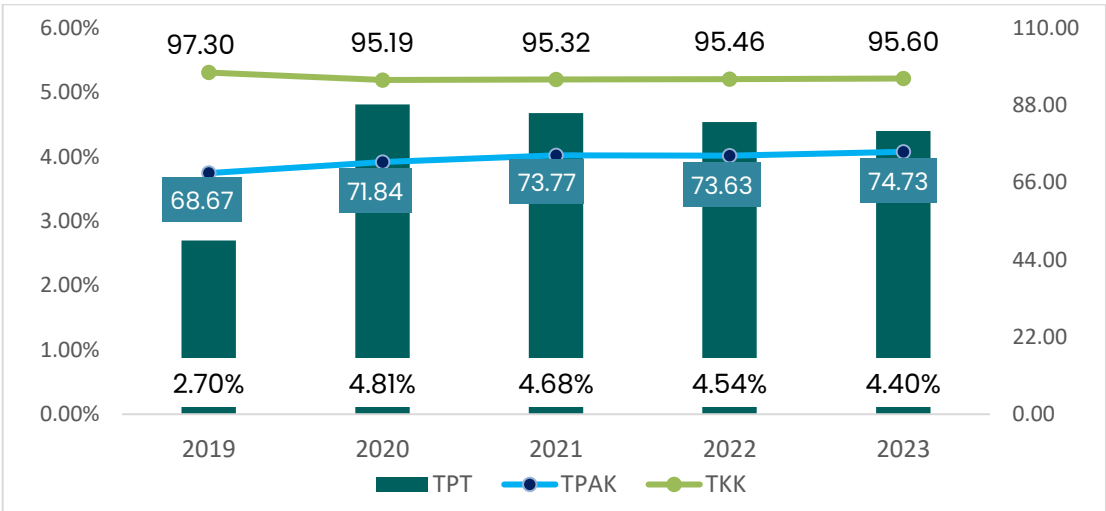
Persebaran tingkat kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur disajikan pada Gambar 14. Nilai TKK Kabupaten Tuban tahun 2023 sebesar 95,60 persen

tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pengertian TKK, jumlah penduduk yang bekerja dan berkontribusi pada perekonomian di Kabupaten Tuban cukup tinggi.



Gambar 14. Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Secara umum, meningkatnya nilai TPAK yang disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan kinerja yang baik dari partisipasi angkatan kerja. Namun, jika kenaikan TPAK diiringi dengan menurunnya nilai tingkat kesempatan kerja (TKK) dapat menjadi indikasi tingginya angka pengangguran karena lebih banyak penduduk yang mencari pekerjaan.



Gambar 15. Perkembangan TPAK, TPT, TKK Kabupaten Tuban Tahun 2018-2023.
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

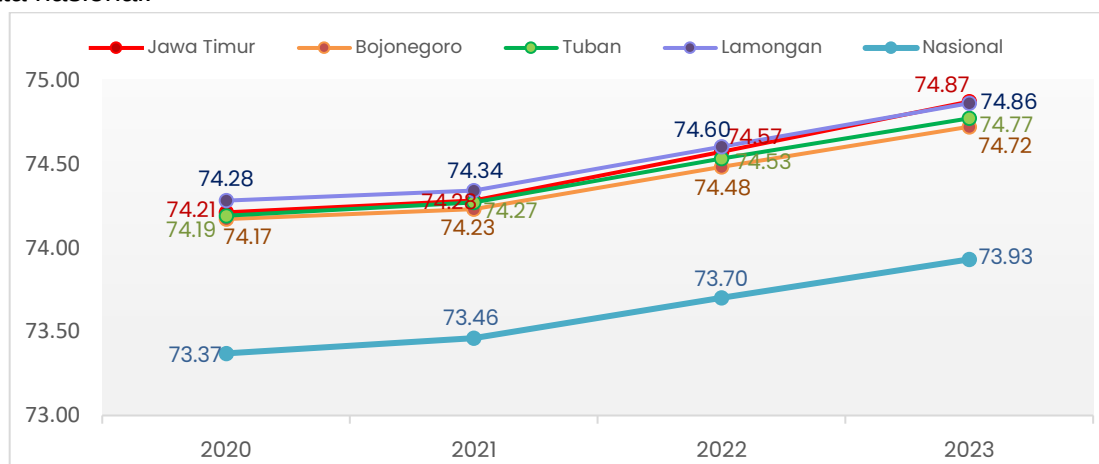
Pada tahun 2023, nilai TPT Kabupaten Tuban mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, berbanding terbalik dengan TKK Kabupaten Tuban yang mengalami kenaikan (Gambar 15). Kondisi ini menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah angkatan kerja yang diserap oleh lapangan pekerjaan selama tahun 2023. Apabila ditinjau nilai tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Tuban tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan nilai TPAK tahun 2023 dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja yang lebih besar dari peningkatan jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk angkatan kerja sebesar

27.336 orang pada tahun 2023 atau 21,13 persen lebih banyak dibandingkan peningkatan penduduk usia kerja.

HASIL EVALUASI BIDANG KESEHATAN

Evaluasi bidang kesehatan mencakup beberapa indikator penting yang menggambarkan kondisi kesehatan suatu populasi. Diantaranya adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan prevalensi gizi buruk. Evaluasi terhadap indikator-indikator tersebut membantu menentukan sejauh mana suatu wilayah telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat. Evaluasi ini juga membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan fokus kebijakan kesehatan di masa mendatang dan hubungannya dengan kemiskinan.

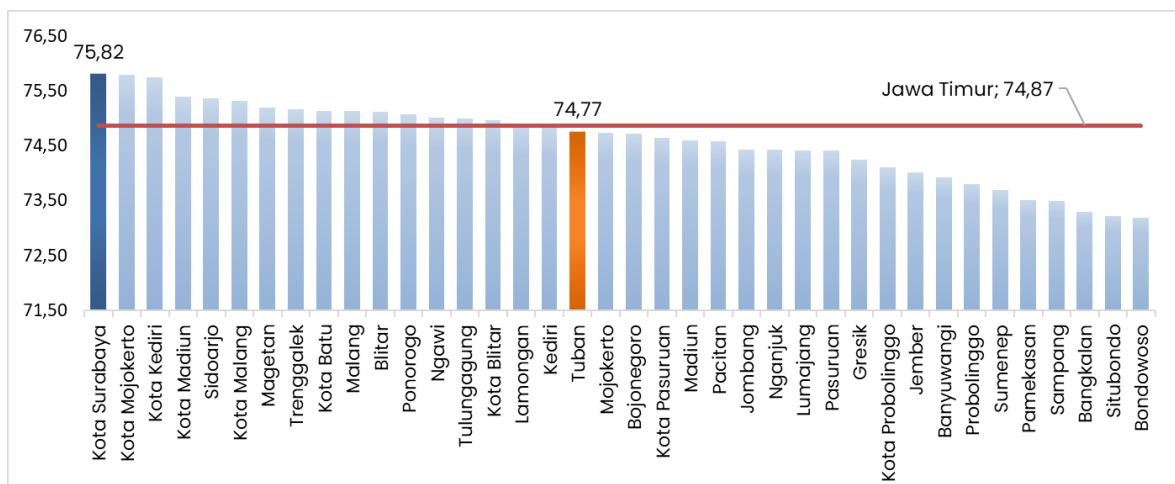
AHH (Angka Harapan Hidup) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata usia hidup seseorang dalam populasi tertentu. AHH mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan, sanitasi, dan nutrisi. Berdasarkan Gambar 16, dalam lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Tuban mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, AHH di Kabupaten Tuban lebih tinggi daripada rata-rata nasional, menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang baik. Hal ini menunjukkan adanya akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi yang mungkin lebih stabil dibandingkan dengan rata-rata nasional.



Gambar 16. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2020-2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Namun, jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar, yaitu Kabupaten Lamongan, AHH Kabupaten Tuban masih lebih rendah. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor akses ke fasilitas kesehatan, tingkat pendidikan, atau program kesehatan yang berbeda di masing-masing daerah. Meskipun AHH Kabupaten Tuban lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lamongan dan rata-rata provinsi, posisi yang lebih baik daripada nasional menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban sedang berada di arah yang tepat. Upaya terus-menerus dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan akan membantu menaikkan AHH di Kabupaten Tuban.

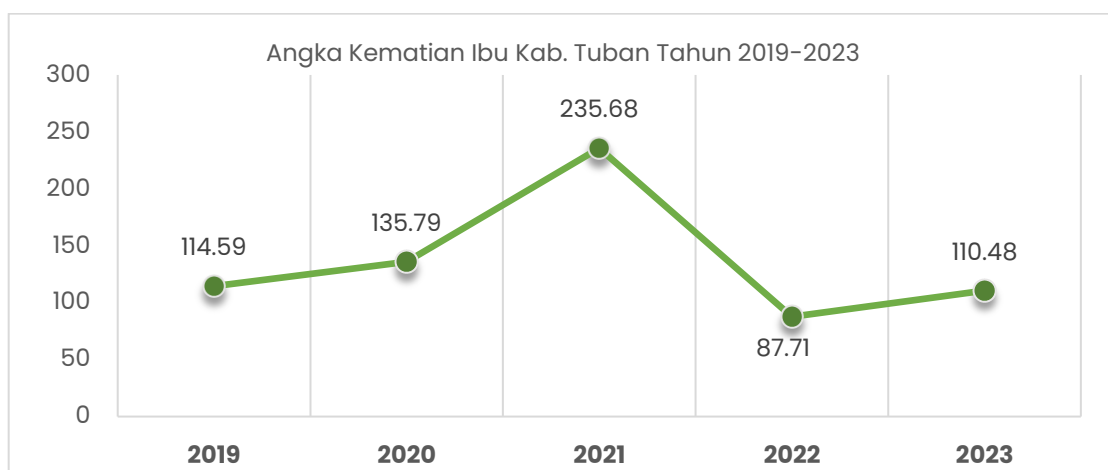


Gambar 17. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024

Gambar 17. Menunjukkan AHH Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 menempati urutan ke-18 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Nilai AHH Kabupaten Tuban meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berarti program pembangunan kesehatan Kabupaten Tuban telah berhasil meningkatkan AHH. Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, yaitu Jombang dan Bojonegoro, capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Tuban lebih tinggi namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Lamongan.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah persalinan. AKI mencerminkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, termasuk akses ke perawatan prenatal dan persalinan yang aman. Perkembangan angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Tuban tahun 2019 sampai 2023 disajikan pada Gambar 18.



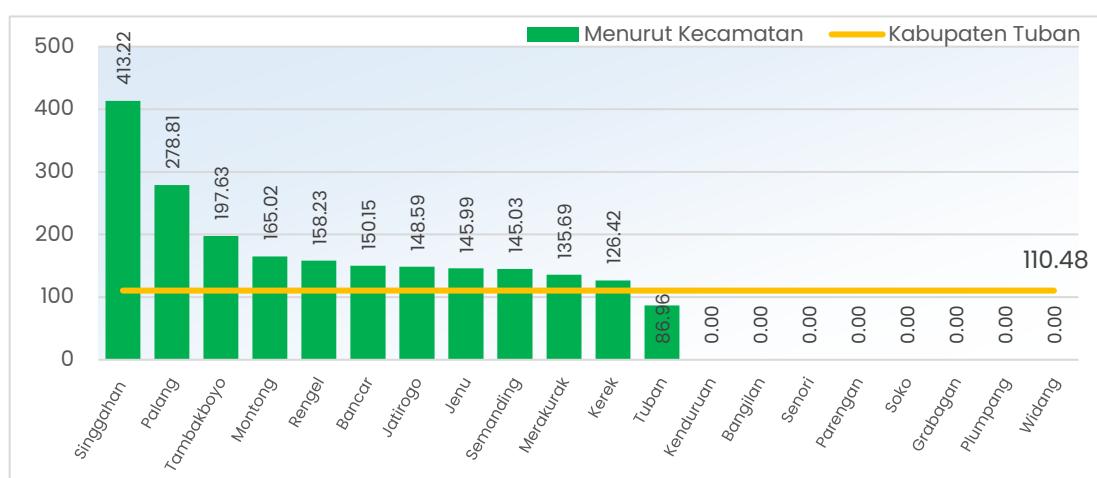
Gambar 18. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.

Sumber: Dinkes-P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Tuban telah menghadapi fluktuasi dalam Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran. Tahun 2019 dimulai dengan tingkat AKI yang relatif stabil, tetapi pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Tuban mengalami lonjakan AKI yang signifikan. AKI yang tinggi selama dua tahun tersebut terkait erat dengan dampak

pandemi COVID-19, yang mengakibatkan gangguan dalam layanan kesehatan dan perawatan prenatal yang optimal.

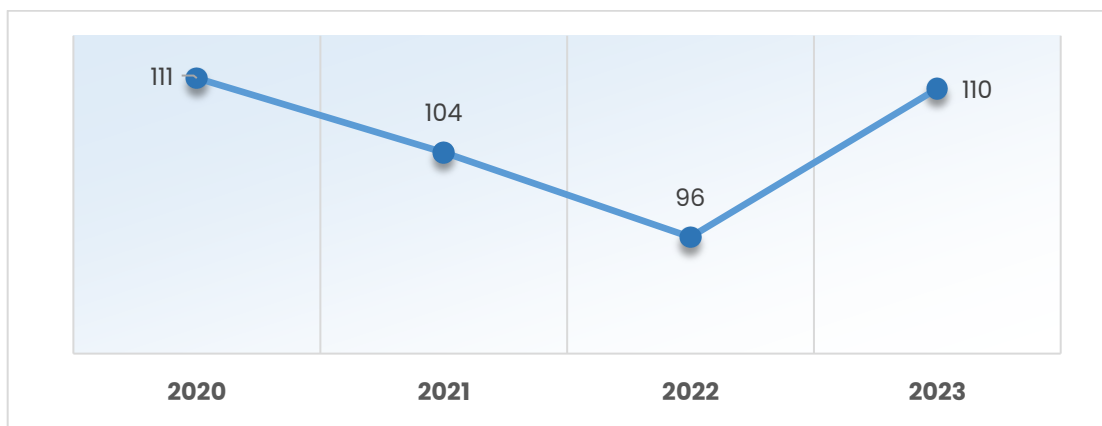
Pada tahun 2022, situasi mulai membaik, dengan AKI menurun menjadi 87,71. Penurunan ini bisa disebabkan oleh perbaikan dalam sistem kesehatan, termasuk peningkatan akses ke layanan medis dan penyesuaian kebijakan kesehatan yang lebih efektif setelah masa pandemi. Namun pada tahun 2023, AKI di Kabupaten Tuban kembali meningkat menjadi 110,48. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan keselamatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban perlu memperhatikan dan mengatasi permasalahan yang menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu. Upaya intensif dalam meningkatkan akses dan kualitas perawatan kesehatan ibu, serta program edukasi masyarakat, diperlukan untuk mengurangi AKI dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak di masa depan.



Gambar 19. Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.
Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

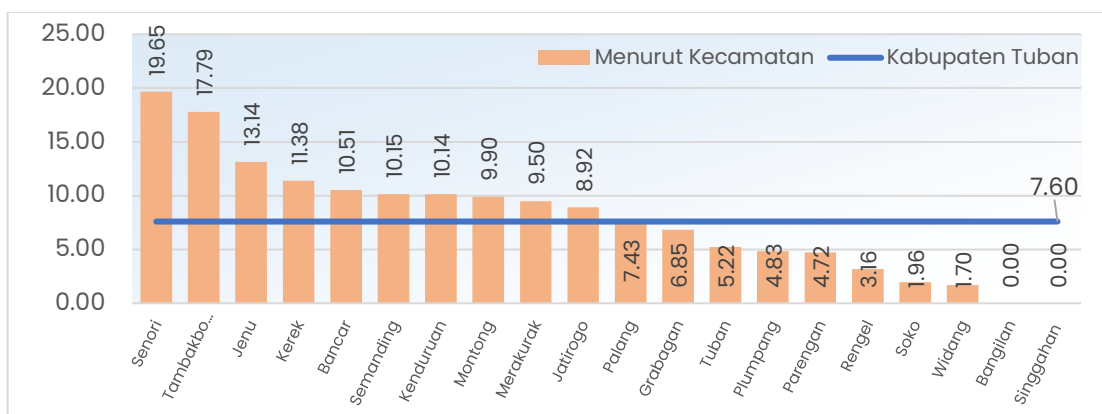
Dalam melihat distribusi Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tuban berdasarkan kecamatan pada Gambar 19, terdapat beberapa wilayah yang memiliki AKI di atas rata-rata AKI Kabupaten Tuban. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Singgahan, Palang, Tambakboyo, Montong, Rengel, Bancar, Jatirogo, Jenu, Semanding, Merakurak, dan Kerek.

AKB (Angka Kematian Bayi) merupakan indikator kesehatan yang mengukur jumlah kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan prenatal dan neonatal, kualitas perawatan medis, serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi. Gambar 20 menunjukkan perkembangan AKB di Kabupaten Tuban dari Tahun 2020 sampai 2023.



Gambar 20. Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023.
 Sumber: Dinkes-P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Gambar 20 menunjukkan tren penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dari tahun 2020 hingga 2022. Penurunan ini merupakan indikasi positif bahwa upaya peningkatan perawatan kesehatan ibu dan bayi telah memberikan hasil. Perbaikan dalam akses ke layanan kesehatan, peningkatan kualitas perawatan prenatal dan neonatal, serta program edukasi masyarakat mungkin telah berkontribusi pada penurunan AKB dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2023, Kabupaten Tuban menghadapi tantangan baru dengan meningkatnya kembali AKB yaitu menjadi 110. Kenaikan AKB pada tahun 2023 menandakan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan berkelanjutan dalam kesehatan ibu dan bayi. AKB berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 21.

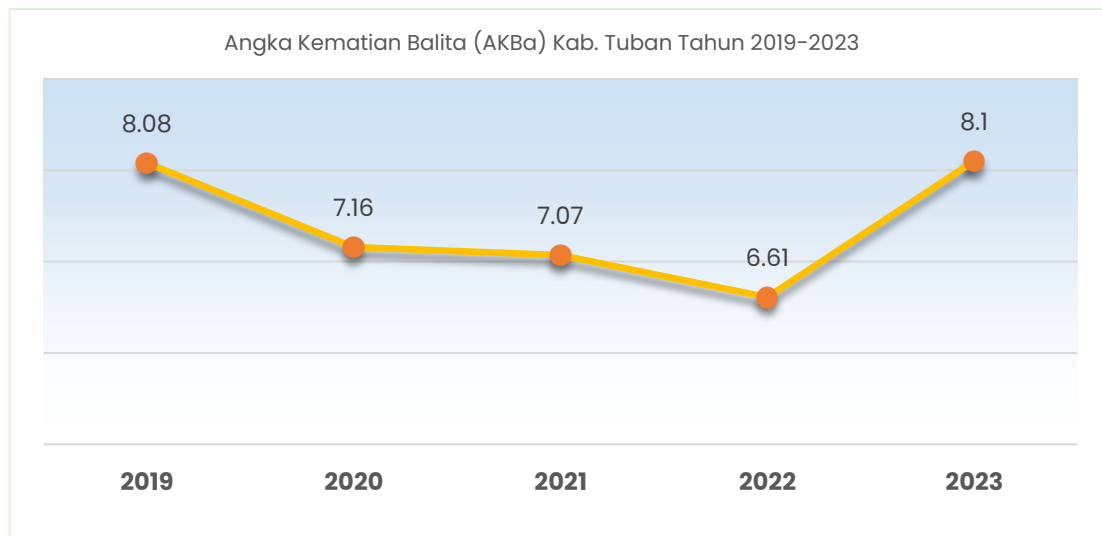


Gambar 21. Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.
 Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Kabupaten Tuban menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan bayi di sejumlah wilayahnya. Kecamatan Senari, Tambakboyo, Jenu, Kerek, Bancar, Semanding, Kenduruan, Montong, Merakurak, dan Jatirogo menonjol sebagai daerah-daerah dengan AKB yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten (Gambar 21). Tingginya AKB di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses dan kualitas perawatan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah indikator kesehatan masyarakat yang mengukur jumlah kematian anak-anak berusia di bawah lima tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKBa mencerminkan kualitas perawatan kesehatan untuk bayi dan anak-anak,

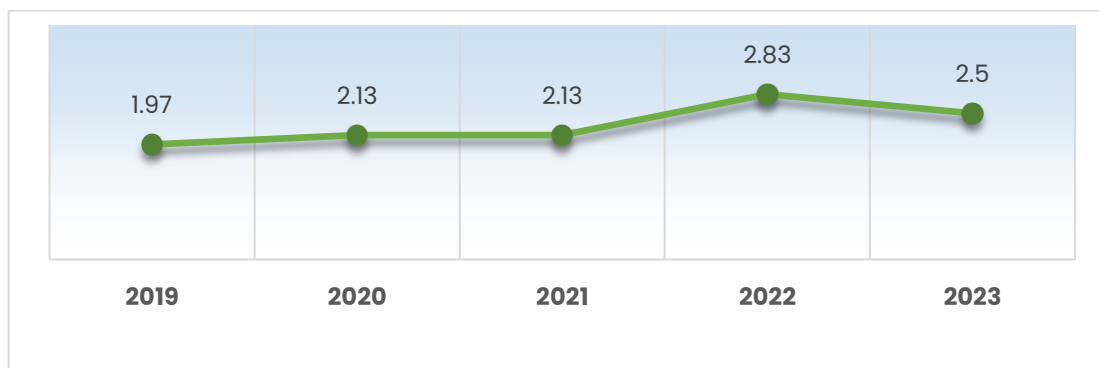
termasuk perawatan pascanatal, vaksinasi, nutrisi, serta lingkungan hidup dan kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan balita.



Gambar 22. Angka Kematian Balita per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.
Sumber: Dinkes-P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Tuban disajikan pada Gambar 22 mengikuti pola yang mirip dengan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), dimana dari tahun 2020 hingga 2022 AKBa mengalami penurunan setiap tahunnya, menunjukkan adanya perbaikan dalam perawatan kesehatan dan kesejahteraan balita di wilayah tersebut. Penurunan AKBa ini kemungkinan didorong oleh peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk vaksinasi, perawatan medis, dan program kesehatan preventif. Namun, pada tahun 2023, AKBa kembali meningkat menjadi 8,1 yang artinya terdapat 8 kematian balita dari 1000 kelahiran hidup. Peningkatan AKBa di tahun 2023 menandakan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi untuk memastikan kesejahteraan balita.

Gizi buruk merupakan suatu kondisi kekurangan zat gizi yang diakibatkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dan nutrisi dalam makanan sehari-hari. Gizi buruk pada balita anak merupakan masalah kesehatan yang harus diperhatikan karena berhubungan dengan status kesehatan suatu wilayah. Menurut WHO, klasifikasi status gizi disusun berdasarkan standar baku antropometri balita dimana angka berat badan sudah dikonversikan ke dalam bentuk nilai terstandar (*Z-score*). Klasifikasi tersebut dibagi menjadi dua kategori: prevalensi gizi buruk dan prevalensi gizi kurang. Perkembangan prevalensi Balita Gizi Buruk selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Tuban diunjukkan pada Gambar 23.

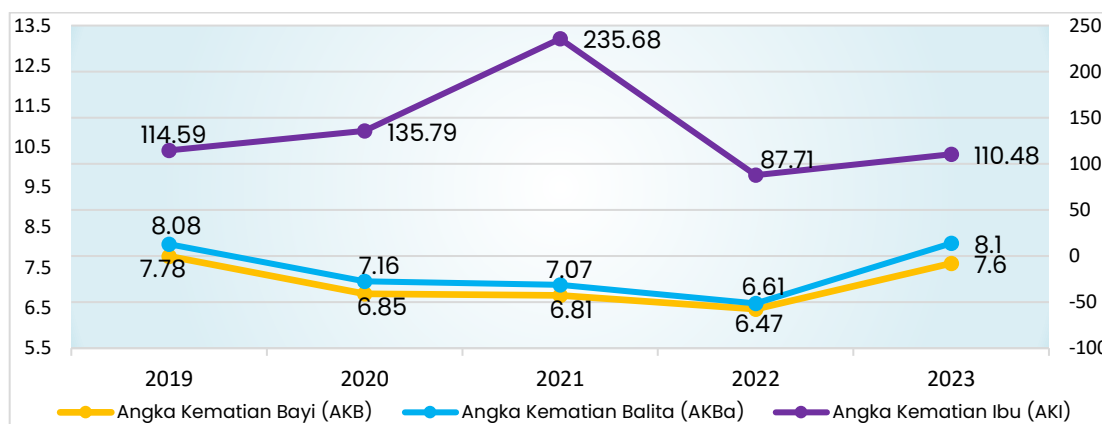


Gambar 23. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.

Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban tahun 2019 sampai 2022, prevalensi balita dengan status gizi buruk mengalami peningkatan, namun menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,5 persen. Angka prevalensi balita dengan gizi buruk pada tahun 2022 menjadi nilai tertinggi selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 2,83 persen.

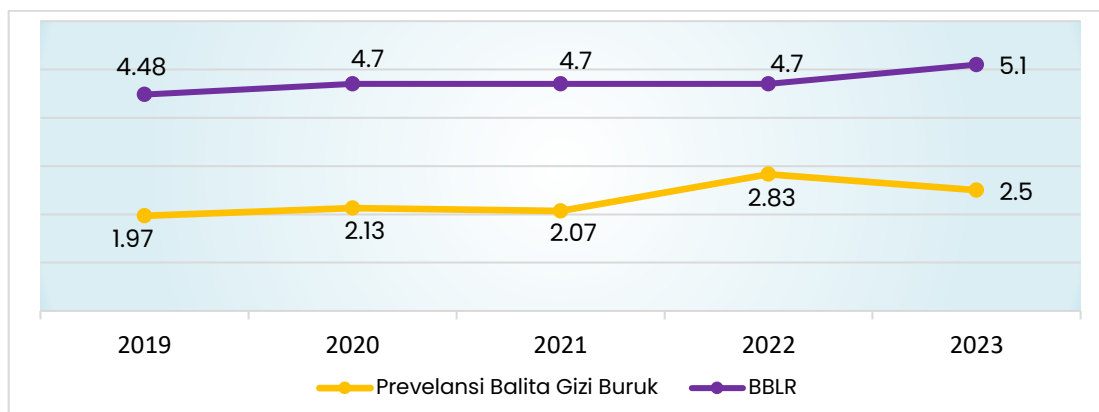
Tren semua indikator kesehatan disandingkan untuk mengetahui keterkaitan antar indikator tersebut. Hubungan masing-masing perkembangan indikator kesehatan diharapkan mampu menentukan prioritas untuk dilakukan intervensi sebagai upaya peningkatan AHH. Indikator pendukung Kesehatan di Kabupaten Tuban yang digunakan dalam analisis adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKBa) yang disajikan pada Gambar 24.



Gambar 24. Perkembangan AKB, AKI, dan AKBa di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

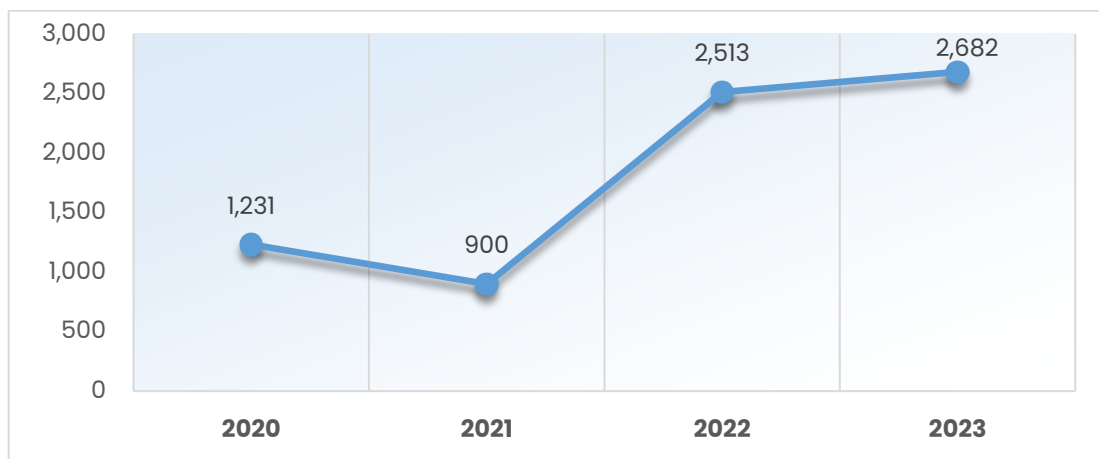
Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023 mempunyai pola yang fluktuatif dan serupa. AKB dan AKBa di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 kembali naik secara signifikan setelah mengalami penurunan berturut-turut empat tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi dan balita belum berhasil dalam menangani faktor penyebab AKB dan AKBa. Angka Kematian Ibu (AKI) juga mempunyai pola yang fluktuatif dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar 110,48 persen. Perkembangan AKI pada tahun 2023 disebabkan belum berhasilnya program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pada pelayanan kehamilan.



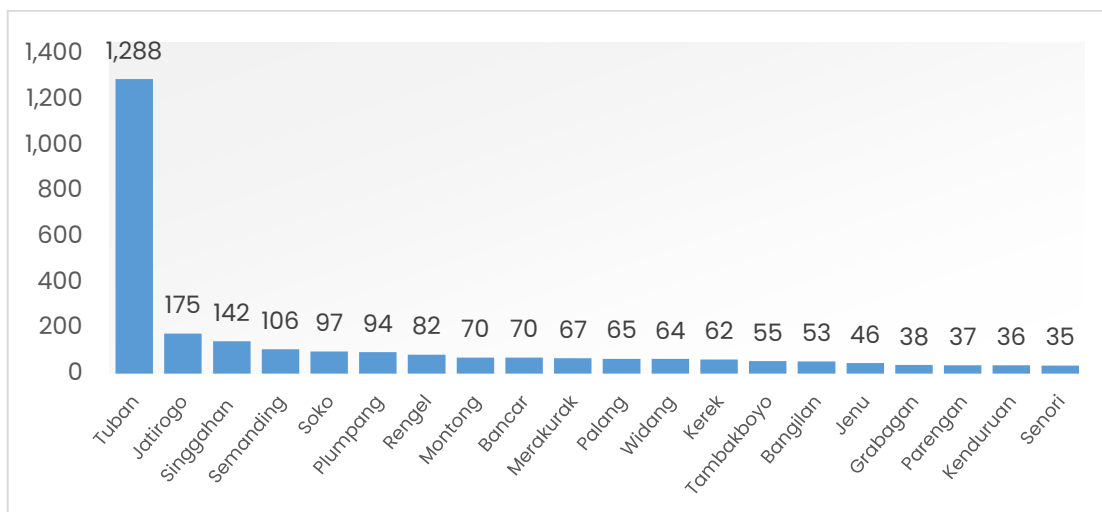
Gambar 25. Perkembangan Jumlah Pravelensi Gizi Buruk dan Jumlah Balita dengan Berat Badan Rendah (BBLR) di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.
Sumber: Dinkes P2KB, 2024 (Diolah)

Jumlah pravelensi balita gizi buruk di Kabupaten Tuban dalam lima tahun terakhir mempunyai pola yang fluktuatif dan menurun pada Tahun 2023 menjadi 2,5 persen. Sedangkan perkembangan jumlah balita dengan berat badan rendah (BBLR) di Kabupaten Tuban cukup stagnan khususnya pada tahun 2020 sampai 2022, dan meningkat pada Tahun 2023 menjadi sebesar 5,1 persen (Gambar 25). Hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan orang tua terhadap kesehatan, perilaku orang tua atas penanganan kesehatan, pola makan balita, dan ketersediaan keanekaragaman pangan untuk balita.



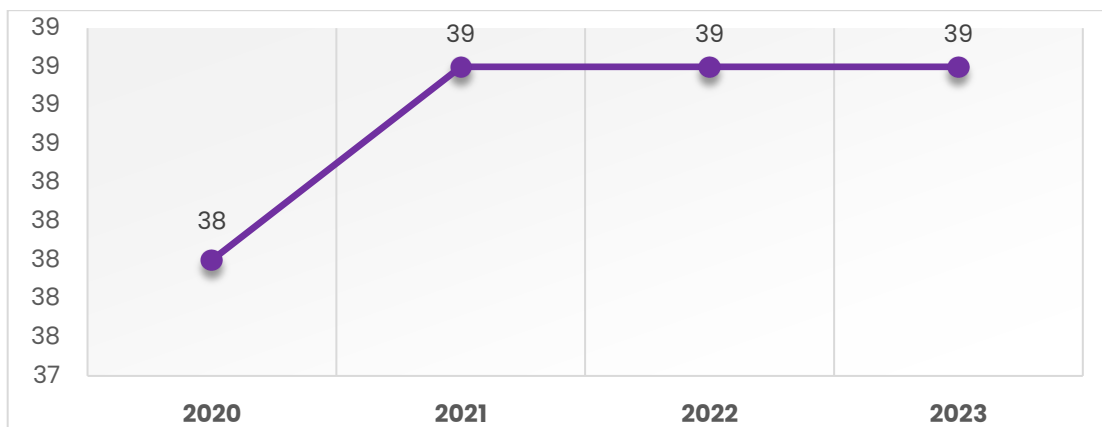
Gambar 26. Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tuban Tahun 2020–2023.
Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Tuban juga menjadi indikator evaluasi bidang kesehatan seperti yang disajikan pada Gambar 26. Dalam empat tahun terakhir, terjadi kenaikan jumlah tenaga kesehatan yang signifikan di Kabupaten Tuban. Pada tahun 2023, terdapat 2.682 tenaga kesehatan di Kabupaten Tuban, yang meningkat hampir 300 persen dibandingkan tahun 2021.



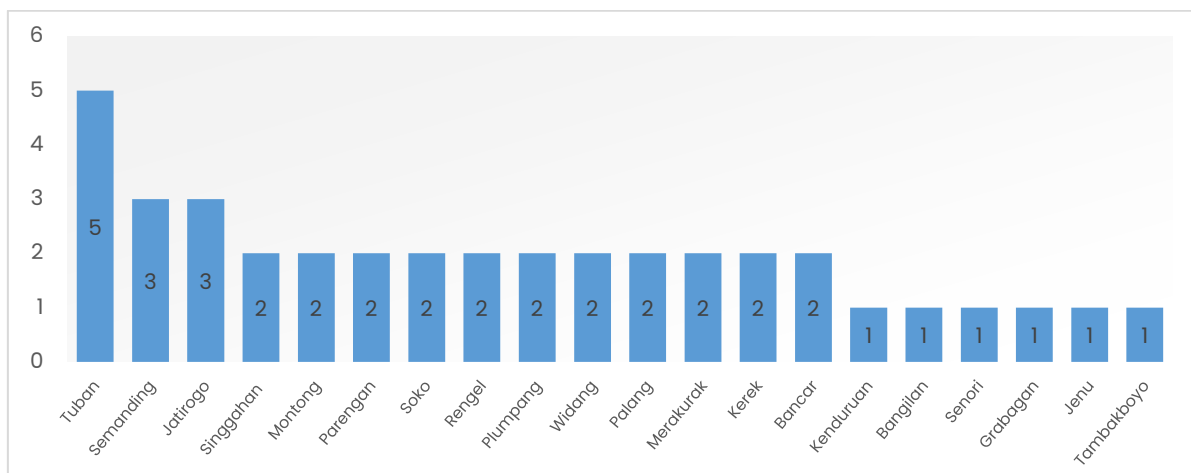
Gambar 27. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.
 Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Persebaran jumlah tenaga kesehatan berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023 ditampilkan pada Gambar 27. Kecamatan yang memiliki jumlah tenaga kesehatan terbesar berada di Kecamatan Tuban sebanyak 1.288 orang, sedangkan kecamatan dengan jumlah tenaga kesehatan terkecil berada di Kecamatan Senori sebanyak 35 orang dan diikuti Kecamatan Kenduruan sebanyak 36 orang. Perbedaan jumlah tenaga kesehatan yang signifikan di Kecamatan Tuban dengan kecamatan lainnya menunjukkan persebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.



Gambar 28. Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tuban Tahun 2020–2023.
 Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Tuban juga menjadi indikator evaluasi bidang kesehatan seperti yang disajikan pada Gambar 28. Tercatat penambahan satu fasilitas kesehatan di Kabupaten Tuban dalam empat tahun terakhir yang terjadi hanya di Tahun 2021 menjadi 39 fasilitas. Dalam tiga tahun terakhir tidak terdapat penambahan fasilitas kesehatan di Kabupaten Tuban.

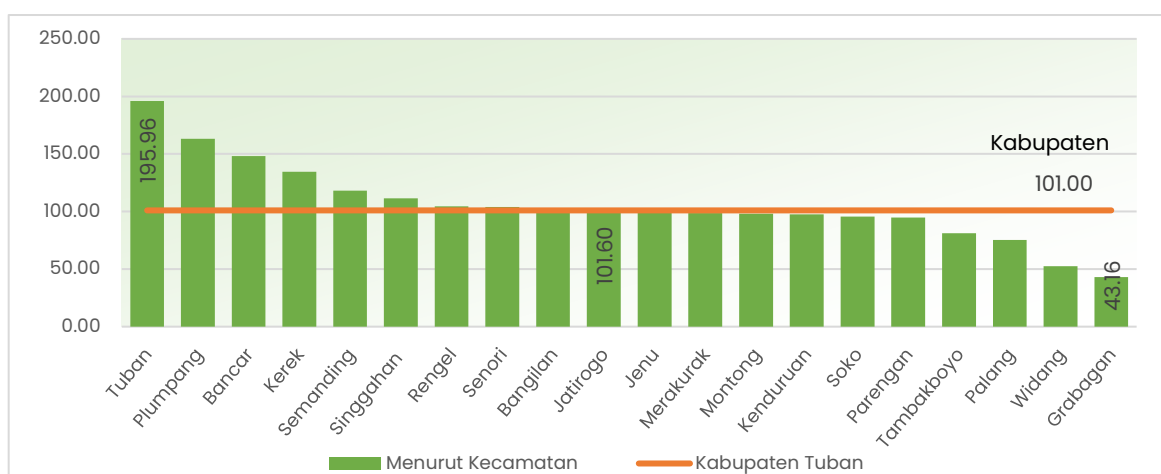


Gambar 29. Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.
 Sumber: Dinkes P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Setiap kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023 memiliki minimal satu fasilitas kesehatan seperti yang ditampilkan pada Gambar 29. Kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas kesehatan terbesar berada di Kecamatan Tuban sebanyak 5 fasilitas dan diikuti Kecamatan Semanding dan Jatirogo dengan masing-masing memiliki 3 fasilitas. Sedangkan Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Grabagan, Jenu, dan Tambakboyo hanya memiliki satu fasilitas kesehatan.

HASIL EVALUASI BIDANG PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan pada jenjang tertentu. APK dihitung dengan membandingkan jumlah total peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu (terlepas dari usia) dengan jumlah total penduduk dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

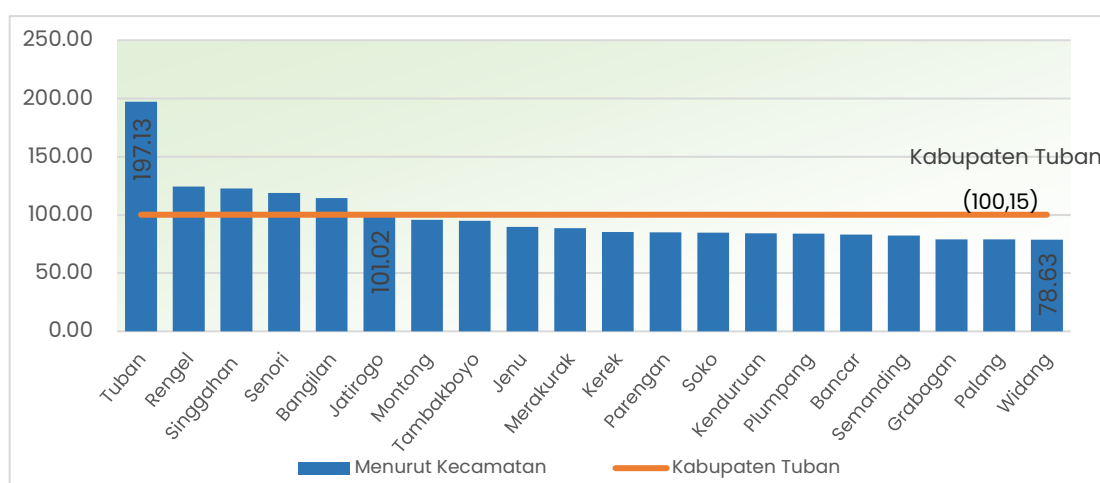


Gambar 30. APK SD/MI Sederajat (%) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.
 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI sederajat di Kabupaten Tuban ditampilkan pada Gambar 30 menunjukkan tren yang cukup stabil

selama lima tahun terakhir. Ini adalah indikasi bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Tuban tetap konsisten dan relatif baik. Pada tahun 2023, Kabupaten Tuban mencapai nilai APK SD/MI Sederajat tertinggi dengan angka sebesar 101,00. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah siswa di jenjang SD/MI sederajat melampaui jumlah anak dalam kelompok usia yang seharusnya bersekolah di tingkat tersebut. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk orang tua yang mendaftarkan anak-anak mereka lebih awal atau anak-anak yang mengulang tingkat.

Dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban, 50% memiliki APK jenjang SD/MI sederajat di atas rata-rata kabupaten (101,00). Kecamatan Tuban menempati posisi teratas dengan nilai APK SD/MI sederajat tertinggi. Namun, APK SD/MI sederajat terendah berada di Kecamatan Grabagan. Ini menandakan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Grabagan dalam hal akses pendidikan di tingkat SD.



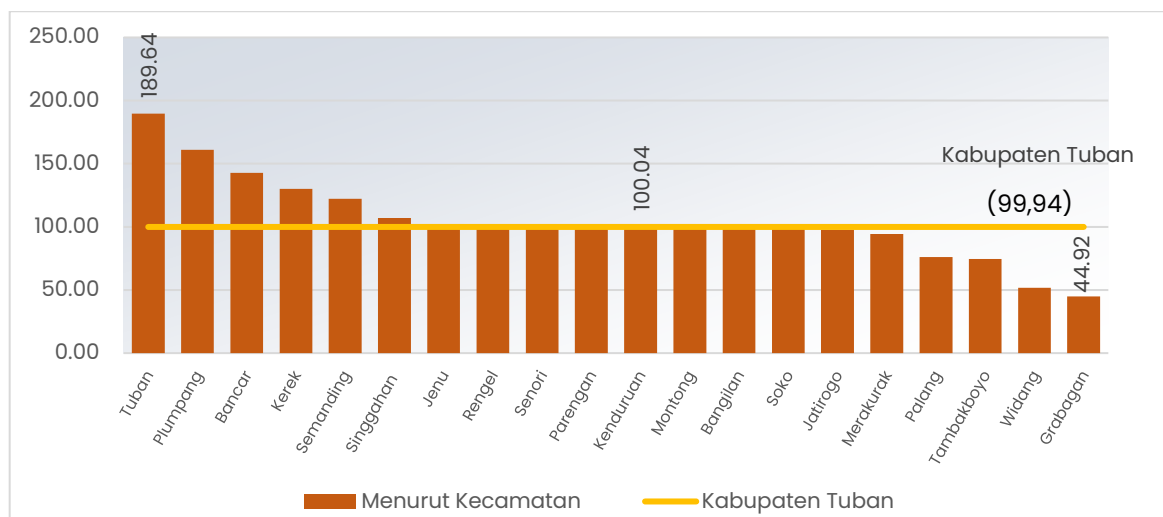
Gambar 31. APK SMP/MTs Sederajat (%) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.
 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Sementara, Angka Partisipasi Kasar pada jenjang SMP/MTs sederajat menunjukkan rata-rata angka di atas 100 persen, yakni sebesar 100,15 persen untuk Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 dengan sebanyak enam kecamatan memiliki rata-rata APK di atas rata-rata Kabupaten (Gambar 31). Enam kecamatan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Tuban, Rengel, Singgahan, Senori, Bangilan, dan Jatirogo. Kecamatan Tuban merupakan kecamatan yang memiliki nilai APK SMP/MTs sederajat tertinggi yaitu sebesar 197,13 persen. Sedangkan, kecamatan dengan nilai APK SMP/MTs sederajat terendah adalah Kecamatan Widang dengan nilai sebesar 78,63 persen.

Di samping APK, terdapat juga indikator lain yang dikenal sebagai APM. APM, yang merupakan singkatan dari Angka Partisipasi Murni, digunakan untuk mengukur seberapa banyak penduduk usia sekolah yang berpartisipasi dalam tingkat pendidikan tertentu. Perhitungan APM didasarkan pada persentase siswa yang sesuai usianya dengan jenjang pendidikannya dari total penduduk pada usia yang sama. Sama seperti APK, APM juga mencerminkan seberapa baik penduduk usia sekolah terserap dalam setiap jenjang pendidikan. Namun, APM dianggap sebagai indikator yang lebih akurat daripada APK karena APM menunjukkan partisipasi penduduk dalam kelompok usia yang sesuai dengan standar pada tingkat pendidikan yang tepat. Semakin tinggi nilai APM, semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

Ketika semua anak usia sekolah dapat mengikuti pendidikan tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100.

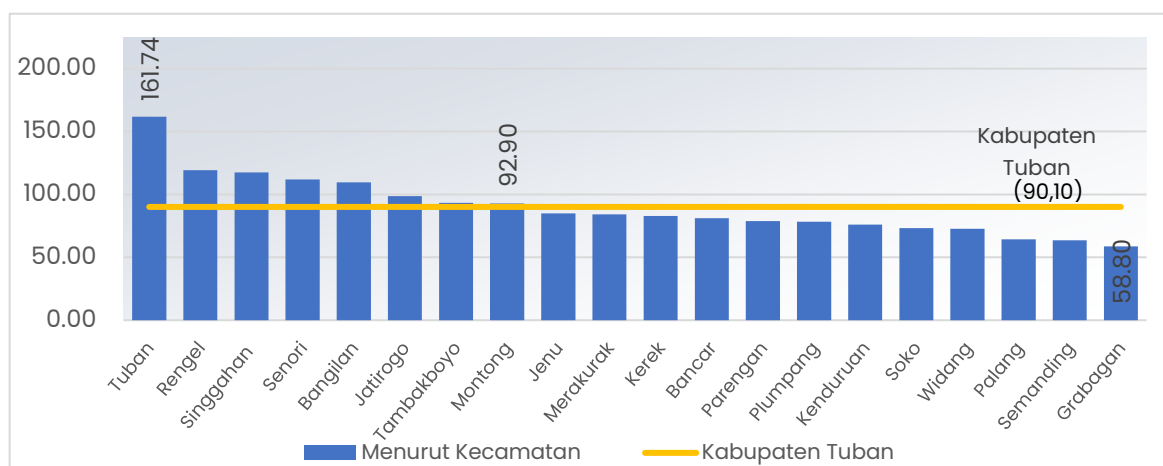
Nilai APM cenderung lebih rendah dibandingkan dengan APK karena APK juga mencakup anak di luar usia sekolah pada tingkat pendidikan yang sama. Perbedaan antara nilai APK dan APM menunjukkan seberapa besar proporsi siswa yang bersekolah terlambat atau terlalu cepat.



Gambar 32. APM SD/MI Sederajat (%) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

APM pada jenjang SD/MI sederajat di Kabupaten Tuban menunjukkan angka rata-rata sebesar 99,94 (Gambar 32). Sejumlah 55 persen kecamatan di Kabupaten Tuban telah memiliki nilai APM SD/MI sederajat di atas rata-rata APM Kabupaten dan semuanya memiliki nilai APM di atas 100 persen. Sementara, Kecamatan Grabagan merupakan kecamatan dengan nilai APM terendah yakni sebesar 44,92.



Gambar 33. APM SMP/MTs Sederajat (%) Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

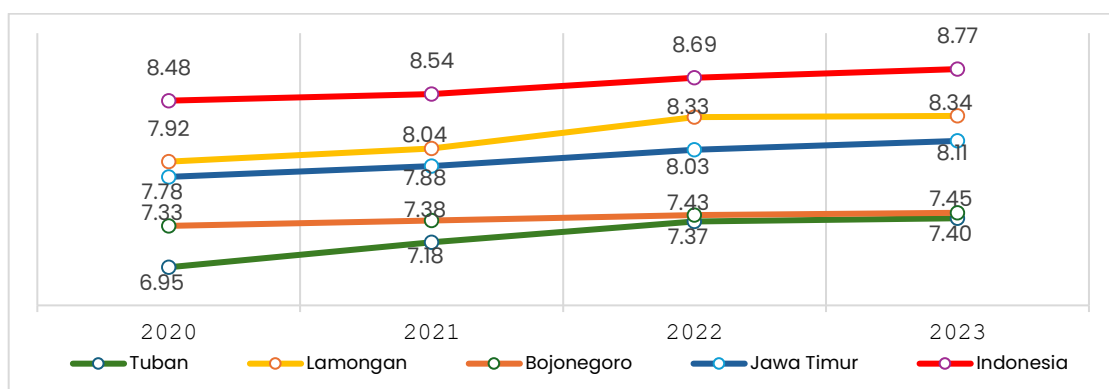
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Pada Gambar 33 menunjukkan tingkat APM SMP/MTs sederajat di Kabupaten Tuban mencapai angka sebesar 90,10 dengan 8 kecamatan diantaranya memiliki nilai APM di atas rata-rata. Delapan kecamatan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Tuban,

Rengel, Singgahan, Senori, Bangilan, Jatirogo, Tambakboyo, dan Montong. Kecamatan Tuban merupakan kecamatan yang memiliki nilai APM SMP/MTs sederajat tertinggi yaitu sebesar 161,74 persen. Sedangkan, kecamatan dengan nilai APM SMP/MTs sederajat terendah adalah Kecamatan Grabagan dengan nilai sebesar 55,8 persen.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan berapa lama, rata-rata, seseorang di suatu wilayah telah menempuh pendidikan formal dalam hidup mereka. Angka ini dihitung berdasarkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah diselesaikan oleh populasi di wilayah tersebut, termasuk semua tingkatan pendidikan, seperti pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

RLS memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi pendidikan di suatu wilayah dan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan setempat. Angka RLS yang lebih tinggi menunjukkan bahwa rata-rata penduduk telah menerima pendidikan yang lebih panjang, yang dapat berimplikasi positif pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup masyarakat.

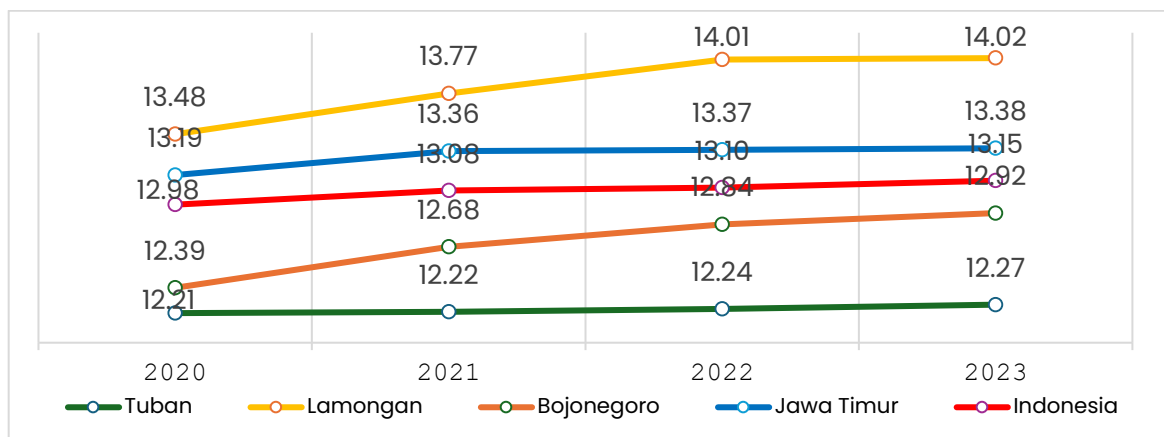


Gambar 34. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tuban adalah sebesar 7,4 tahun ditampilkan pada Gambar 34, yang berarti rata-rata penduduk di wilayah tersebut menempuh pendidikan selama hampir 7,5 tahun. Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan dalam upaya pendidikan di Kabupaten Tuban, RLS di wilayah ini masih berada di bawah RLS di dua kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. Di Kabupaten Lamongan, RLS mencapai 8,34 tahun, menunjukkan rata-rata penduduk di sana memiliki akses dan kemampuan untuk menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan penduduk di Kabupaten Tuban. Sementara itu, di Kabupaten Bojonegoro, RLS adalah 7,45 tahun, sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Tuban, yang mengindikasikan perbedaan kecil tetapi tetap penting dalam hal lama pendidikan yang ditempuh.

Harapan Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan berapa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak dan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan sistem pendidikan setempat.



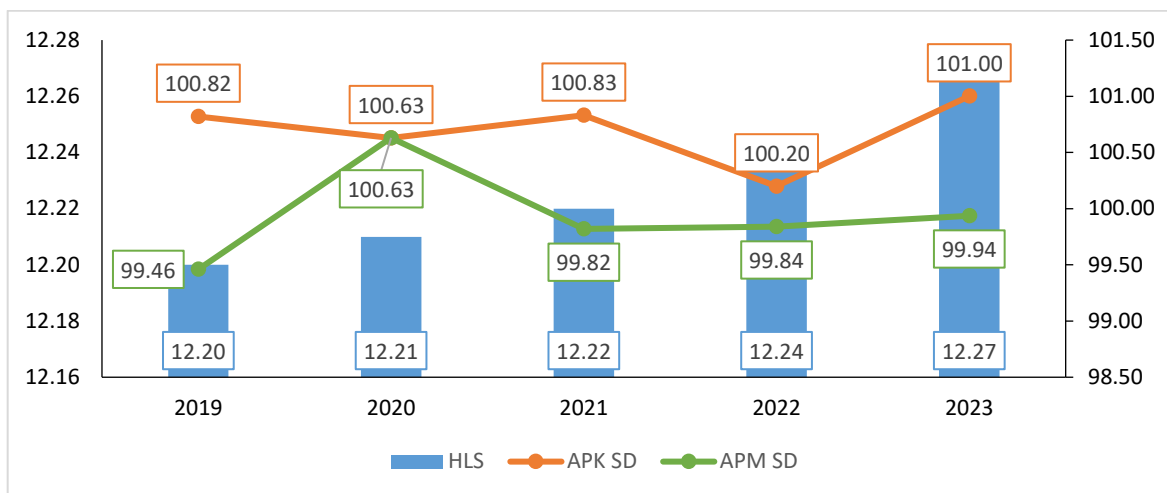
Gambar 35. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan berapa tahun pendidikan yang diharapkan seseorang untuk ditempuh berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Di Kabupaten Tuban, HLS Kabupaten Tuban tercatat sebesar 12,27 tahun, yang berarti rata-rata penduduk memiliki ekspektasi menempuh pendidikan selama lebih dari 12 tahun. Meskipun angka ini menunjukkan harapan pendidikan yang baik, HLS Kabupaten Tuban masih berada di bawah HLS di dua kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. Di Kabupaten Lamongan, HLS mencapai 14,02 tahun, yang menandakan tingkat harapan pendidikan yang lebih tinggi. Sementara itu, di Kabupaten Bojonegoro, HLS tercatat sebesar 12,92 tahun, sedikit lebih tinggi daripada Kabupaten Tuban.

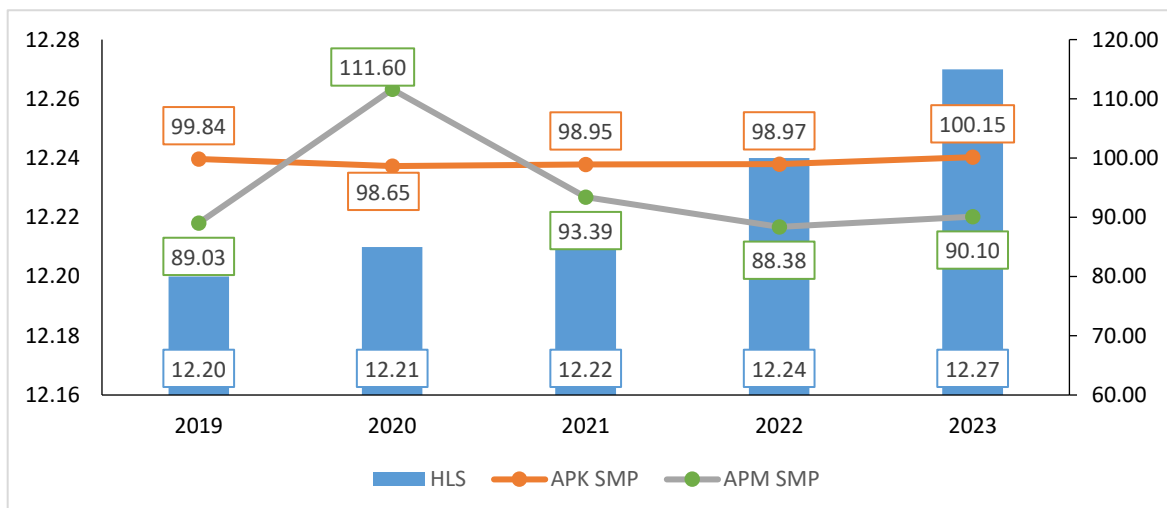
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tuban telah mengalami peningkatan setiap tahunnya selama empat tahun terakhir. Meningkatnya HLS di wilayah ini menandakan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas pendidikan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Meskipun HLS di Kabupaten Tuban terus menunjukkan tren peningkatan, masih ada kesenjangan dengan dua kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro. HLS di Kabupaten Tuban masih berada di bawah HLS Kabupaten Lamongan, yang memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi, dan Kabupaten Bojonegoro.

Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) jika disandingkan dengan semua indikator pendidikan dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antara HLS dan indikator tersebut. Dengan mengetahui keterkaitan HLS dan indikatornya, diharapkan mampu menentukan indikator yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan intervensi sebagai upaya peningkatan HLS. Indikator pendukung yang digunakan dalam analisis adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD seperti yang disajikan pada Gambar 36 dan pada jenjang SMP yang disajikan pada Gambar 37.



Gambar 36. Perkembangan APK dan APM SD(%) Terhadap HLS (Tahun) di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)



Gambar 37. Perkembangan APK dan APM SMP (%) Terhadap HLS (Tahun) di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

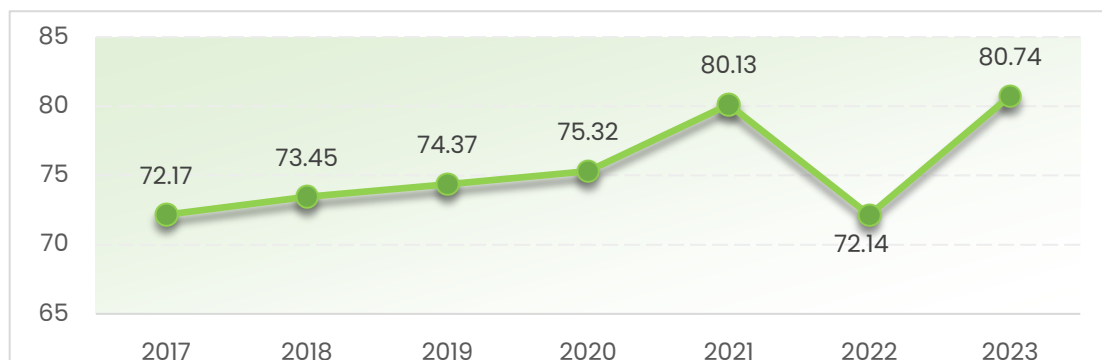
Berdasarkan Gambar 36 terjadi kenaikan tren APM SD sejak tahun 2021 hingga 2023 di kabupaten Tuban, sedangkan perkembangan APK SD menunjukkan pola yang fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Perbedaan pola perkembangan APK dan APM pada jenjang SD di Kabupaten Tuban diiringi dengan nilai HLS yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada jenjang pendidikan SMP sejak tahun 2020 sampai 2023 di Kabupaten Tuban, nilai APK menunjukkan tren kenaikan hingga sebesar 100,15 pada tahun 2023. Sedangkan nilai APM SMP dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Tuban menunjukkan pola fluktuatif, diiringi dengan peningkatan nilai HLS setiap tahun.

HASIL EVALUASI BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

Penyediaan infrastruktur yang memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan. Infrastruktur dasar yang

memadai juga mencerminkan kualitas sosial-ekonomi masyarakat setempat. Indikator yang digunakan mengacu pada panduan TP2NK meliputi sanitasi yang layak, air minum yang layak, sumber penerangan dari listrik, dan kepemilikan hak atas rumah/tempat tinggal. Konsep sanitasi layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

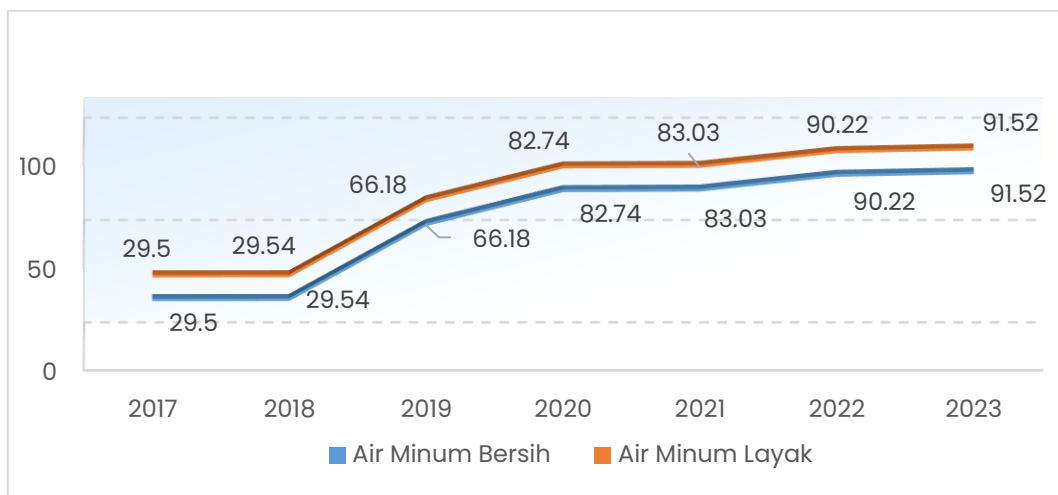
Sanitasi dapat dikatakan layak apabila fasilitas sanitasi memenuhi persyaratan kesehatan, diantaranya yaitu toilet leher angsa, fasilitas pengolahan akhir tinja dengan tangki septik atau Instalasi/Sistem Pengolahan Limbah (IPAL/SPAL). Akses sanitasi di pedesaan dikatakan layak apabila menggunakan toilet leher angsa, lubang di tanah sebagai tempat pembuangan akhir tinja, dan penggunaan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri bersama rumah tangga lainnya, ataupun di MCK komunal. Konsep sanitasi yang layak mengacu pada Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 661/Dt.2.4/01/2019.



Gambar 38. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2023.
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Berdasarkan Gambar 38 sejak tahun 2017, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan meskipun di tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 7,99. Di tahun 2023, persentase rumah tangga mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 8,6 menjadi 80,13 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2022) yaitu sebanyak 72,14.

Rumah tangga dengan akses air minum layak sesuai konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas merujuk pada sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

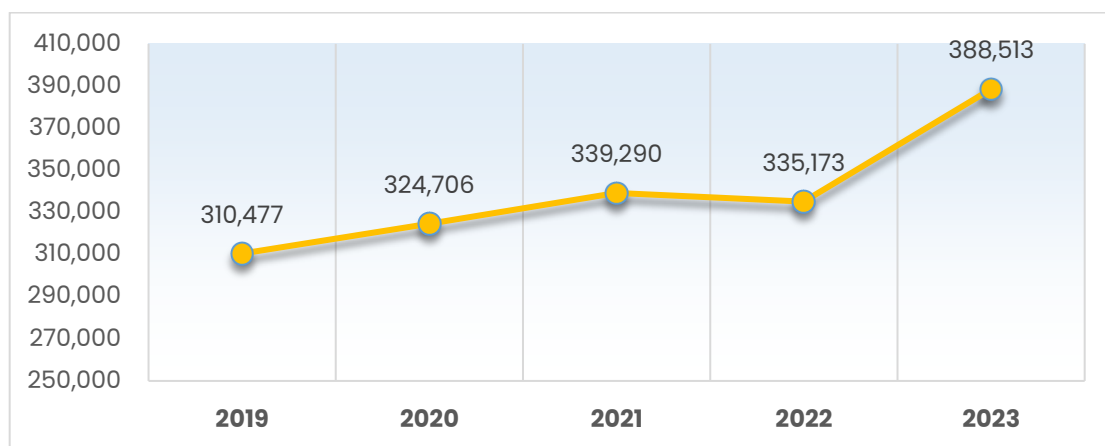


Gambar 39. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak dan Air Minum Bersih di Kabupaten Tuban Tahun 2017-2023.

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Grafik Perkembangan persentase Rumah Tangga dengan sumber air minum layak (persen) dan sumber air minum bersih (persen) di Kabupaten Tuban Tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 pada Gambar 39 menunjukkan nilai yang sama dan cenderung mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan sekitar 1,3 persen yaitu dari 90,22 persen di tahun 2022 menjadi 91,52 persen pada tahun 2023 sekaligus menjadi nilai tertinggi di dalam 7 tahun terakhir.

Sektor kelistrikan menjadi salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Jumlah pelanggan listrik menunjukkan banyaknya cakupan listrik dan persebarannya di Kabupaten Tuban seperti yang disajikan pada Gambar 40.

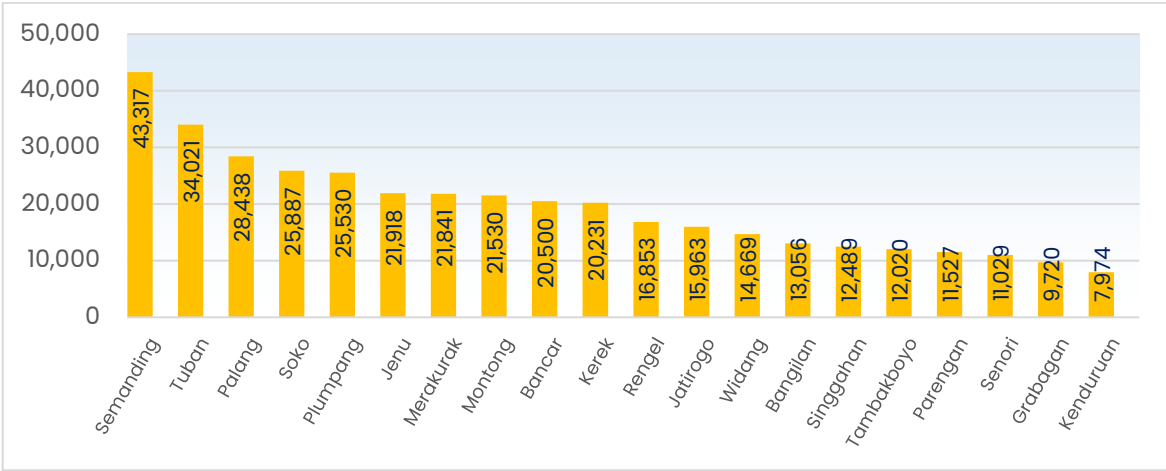


Gambar 40. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban dapat dilihat pada Gambar 40, terdapat peningkatan jumlah pelanggan listrik sebanyak 53.340 pada tahun 2023 di Kabupaten Tuban menjadi sebanyak 388.513 pelanggan. Dalam lima tahun terakhir pelanggan listrik di Kabupaten Tuban menunjukkan tren kenaikan yang menunjukkan kebutuhan pemakaian listrik yang meningkat, meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah pelanggan listrik sebesar 4.117 pelanggan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan

wilayahnya pada Gambar 41, jumlah pelangggan listrik terbanyak berada di Kecamatan Semanding sebanyak 43.317 pelanggan. Sedangkan Kecamatan Kenduruan memiliki pelanggan listrik paling sedikit sebanyak 7.974 pelanggan.

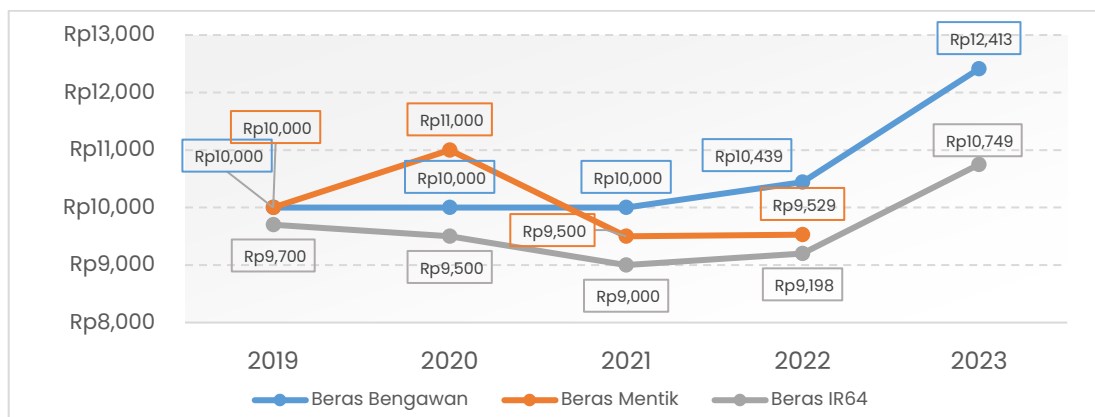


Gambar 41. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023.
Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

HASIL EVALUASI BIDANG KETAHANAN PANGAN

Harga beras di Indonesia relatif berfluktuatif setiap tahunnya. Kenaikan harga beras sebagai kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda dapat menyebabkan kenaikan harga secara keseluruhan atau inflasi. Diperlukan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras untuk menjaga inflasi tetap rendah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga beras di suatu wilayah meliputi permintaan dan penawaran di masyarakat, faktor produksi dan biaya produksi, serta kondisi pasar. Faktor lainnya seperti distribusi, penyimpanan, transportasi, kebijakan pemerintah, dan faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi harga beras.

Berdasarkan grafik yang disajikan pada Gambar 42 rata-rata harga beras dari tahun 2019 hingga 2022 cenderung berfluktuatif baik pada beras jenis bengawan, mentik, maupun IR64. Namun, memasuki tahun 2023 rata-rata harga beras cenderung naik pada beras jenis bengawan dan jenis IR64. Apabila dilihat dari rata-rata harga, beras jenis bengawan cenderung memiliki harga yang paling tinggi diantara jenis beras lainnya. Sebaliknya, beras jenis IR64 cenderung memiliki rata-rata harga yang paling rendah diantara jenis beras lainnya.

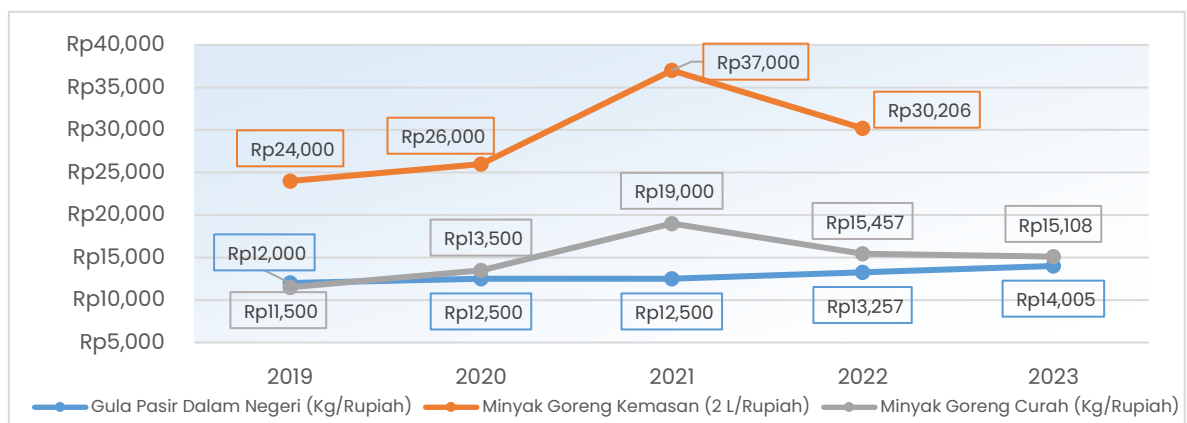


Gambar 42. Perkembangan Harga Beras Bengawan, Beras Mentik, dan Beras IR64 di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Harga kebutuhan pokok sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Harga yang terjangkau memungkinkan akses yang memadai terhadap makanan dan barang penting lainnya bagi individu dan keluarga. Namun, jika harga-harga tersebut terlalu tinggi, dapat menyebabkan kesulitan dan kesenjangan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan, harga yang terjangkau dapat membantu menjaga stabilitas sosial. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar bisa mengakibatkan ketidakpuasan, ketidakstabilan, dan konflik sosial. Oleh karena itu, dalam mencegah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan sosial penting untuk menjaga harga yang wajar dan terjangkau.

Dalam kurun lima tahun terakhir harga gula pasir dalam negeri terus mengalami kenaikan di setiap tahun dengan rata-rata kenaikan harga sebesar 3,97 persen setiap tahun. Harga capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 14.005.00 seperti yang ditampilkan pada Gambar 43. Sedangkan, rata-rata harga minyak goreng baik pada minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan 2 L cenderung berfluktuatif dengan puncak harga tertinggi dari keduanya terjadi pada tahun 2021. Di tahun tersebut, harga minyak goreng curah mencapai Rp 19.000,00 dan harga minyak goreng kemasan 2 L mencapai harga Rp 37.000,00.



Gambar 43. Perkembangan Harga Gula Pasir, Minyak Goreng Curah, dan Minyak Goreng Kemasan di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

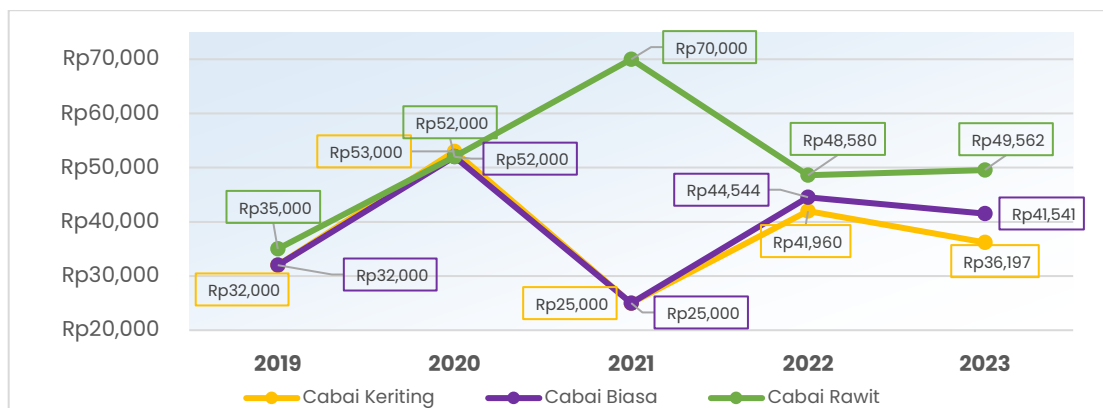
Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)



Gambar 44. Perkembangan Harga Telur Ayam Broiler dan Telur Ayam Kampung di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

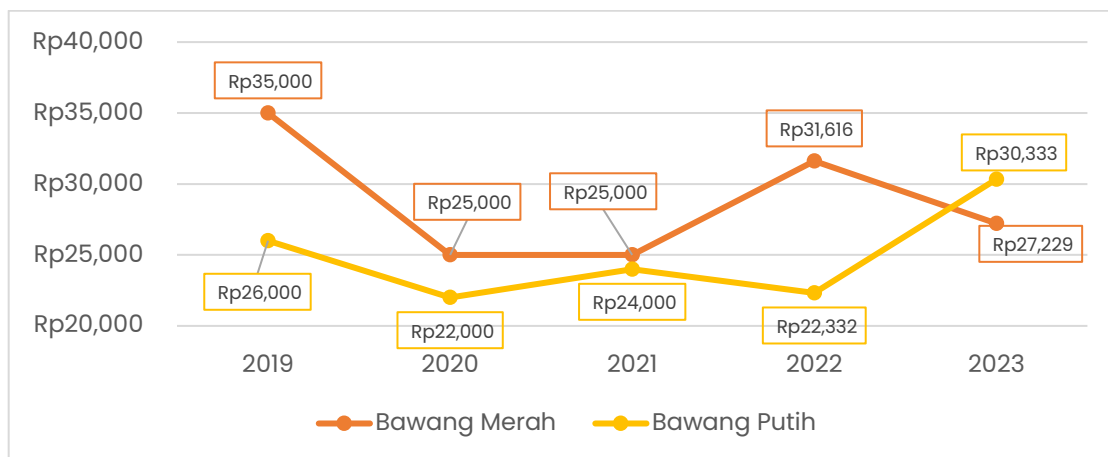
Sesuai grafik pada Gambar 44 harga telur ayam broiler terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, meskipun sempat mengalami penurunan harga sebesar 5,6 persen menjadi Rp 25.486,00 di tahun 2022. Berbeda, harga telur ayam kampung cenderung tidak stabil dengan mengalami kenaikan harga di tahun 2019-2021 dan mengalami penurunan berturut-turut pada 2 tahun terakhir. Harga telur ayam broiler terjadi di tahun 2021 dengan capaian sebesar Rp 45.000,00 dan harga terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 38.000,00.



Gambar 45. Perkembangan Harga Cabai Keriting, Cabai Biasa, dan Cabai Rawit di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Gambar 45 menunjukkan perbandingan harga cabai dari berbagai jenis di Kabupaten Tuban pada tahun 2019-2023. Perkembangan rata-rata harga cabai rawit cenderung naik di sepanjang tahun. Lain dengan cabai rawit, rata-rata harga cabai keriting dan cabai biasa berfluktuatif dalam kurun lima tahun terakhir. Meski begitu, rata-rata harga berbagai jenis cabai tidak jauh berbeda satu dengan lainnya di setiap tahun. Namun, pada tahun 2021 terjadi fenomena yang berbeda yaitu rata-rata harga cabai keriting meroket hingga mencapai Rp 70.000,00. Sebaliknya di tahun yang sama, rata-rata harga cabai biasa dan cabai rawit menurun signifikan lebih dari 50 persen yakni yang semula memiliki rata-rata harga sebesar Rp 52.000,00, merosot menjadi Rp 25.000,00.



Gambar 46. Perkembangan Harga Bawang Merah dan Bawang Putih di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Rata-rata harga bawang merah dan bawang putih dalam lima tahun terakhir pada Gambar 46 mengalami tren yang fluktuatif. Harga bawang merah pada tahun 2019 seharga Rp35.000/Kg mengalami penurunan pada tahun 2020 seharga Rp25.000/Kg dan stagna hingga tahun 2021. Pada tahun 2022 rata-rata harga bawang merah mengalami kenaikan pada tahun 2022 seharga Rp31.616/Kg dan turun kembali di tahun 2023 seharga Rp27.229/Kg. Rata-rata harga bawang putih pada tahun 2019 seharga Rp26.000/Kg, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 seharga Rp22.000/Kg. Rata-rata harga ini kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 seharga Rp24.00/Kg dan turun kembali di tahun 2022 seharga Rp22.332/Kg. Rata-rata bawang putih pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi seharga Rp30.333/Kg.

Perkembangan rata-rata harga daging sapi murni yang ditampilkan pada Gambar 47 menyajikan grafik *trend line* yang cenderung stabil. Pada 3 tahun berturut-turut (2019–2021) rata-rata harga menunjukkan angka yang sama yaitu sebesar Rp 110.000,00. Mulai pada tahun 2022, rata-rata harga daging sapi murni mulai meningkat secara signifikan hingga menjadi Rp 115.391,00. Kemudian, pada tahun 2023 rata-rata harga daging sapi murni mulai menurun kembali di angka Rp 113.384,00.



Gambar 47. Perkembangan Harga Daging Sapi Murni di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)



Gambar 48. Perkembangan Harga Daging Ayam Broiler dan Daging Ayam Kampung di Kabupaten Tuban Tahun 2019–2023.

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Gambar 48 menunjukkan grafik rata-rata harga daging ayam broiler dan daging ayam kampung yang cenderung stabil di setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan pada kedua harga tersebut, namun pada tahun-tahun lainnya terjadi peningkatan dengan angka yang tidak jauh dengan angka di tahun sebelumnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023, selisih rata-rata harga di kedua tahun tersebut hanya sebesar (+) Rp 705,00 untuk daging ayam kampung dan (+) Rp 1.102,00 untuk daging ayam broiler.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

Strategi dan langkah percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Tuban dituangkan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2020–2025. Selanjutnya, strategi dan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 dengan tema pembangunan tahun 2024 yaitu “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berketahanan dan berdaya saing”. Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Tuban yang mencakup visi dan misi Kabupaten memiliki misi untuk penanggulangan kemiskinan dengan tujuan menurunnya angka kemiskinan dengan target pencapaian angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 14,15 persen.

Berdasarkan Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Tahun 2020–2025, perlu adanya penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Tuban serta tahapan terstruktur yang dapat menyederhanakan dan memfokuskan arah kerja masing-masing pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2024 penanggulangan kemiskinan difokuskan pada peningkatan daya beli dan penurunan angka kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini, kemiskinan ekstrem menjadi prioritas pengentasan kemiskinan setiap tahunnya. Menurut BPS, akar permasalahan kemiskinan ekstrem pada dasarnya adalah ketidakmampuan masyarakat dari sudut pandang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun non-makanan yang diukur dengan garis kemiskinan (makanan dan non-makanan).

Prioritas ini juga sejalan dengan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 sehingga mitigasi hanya dapat dilakukan melalui pemberian bantuan langsung, misalnya pemberian sembako atau pemberian uang tunai secara kontinu.

Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2024 Strategi RAT berfokus pada pertanian dan pariwisata dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan di Kabupaten Tuban pada tahun 2024. Guna mencapai hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan daya beli/pendapatan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan akses terhadap layanan dasar berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan dan berdampak tidak langsung terhadap peningkatan daya beli/pendapatan. Di sisi lain, perlindungan sosial berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan daya beli/pendapatan. Selain peningkatan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan daya beli/pendapatan juga dipengaruhi langsung oleh penurunan beban pengeluaran.

Selain strategi, inovasi untuk memberikan daya ungkit yang tinggi dalam penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2024 pada masing-masing urusan penanganan kemiskinan diberikan dengan rincian sebagai berikut.

Bidang Kesehatan:

1. Penurunan angka stunting
2. Diperlukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Tuban;
3. Membuat Gerakan Desa Pencegahan dan Penurunan Stunting secara masif;
4. Inovasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal secara serentak di desa-desa lokus stunting. Kegiatan PMT diformulasikan dari pangan lokal bergizi yang pengolahannya memenuhi kriteria beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
5. Mendorong media *engagement* dalam peningkatan kesadaran, diseminasi, dan edukasi upaya pencegahan dan penurunan stunting;
6. Membuat lomba kebun gizi pekarangan antar desa berupa Kebun Rumah Pangan Lestari (KRPL) dari dinas yang mengatur bidang pertanian.

Bidang Pendidikan:

1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2. Memberikan program pelatihan regular peningkatan kualitas pendidik bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/setara.
3. Jumlah lembaga sertifikasi pelatihan peningkatan kualitas pendidik.
4. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik pada daerah dengan angka putus sekolah tinggi.
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6. Optimalisasi kualitas lembaga pendidikan yang mendapatkan ijin operasional.
7. Optimalisasi kuantitas dan kualitas lembaga sertifikasi pelatihan pendidik mendapatkan ijin operasional.
8. Optimalisasi program Bantuan Pendidikan jenjang SMA/SMK ke Perguruan Tinggi dari Pemerintah Daerah dan CSR dari pihak industri.

9. Fasilitasi layanan pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan nonformal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bidang Infrastruktur Dasar:

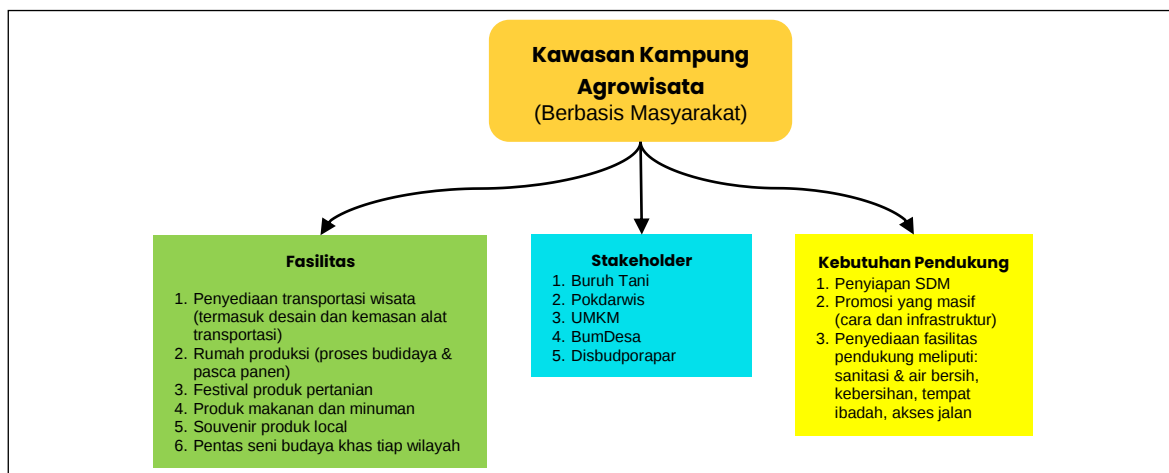
1. Pengembangan kawasan kampung agrowisata.
2. Penyediaan transportasi wisata.
3. Penyediaan fasilitas pendukung kawasan kampung agrowisata.
4. Bidang Ketahanan Pangan:
5. Festival produk pertanian.
6. Pengembangan budidaya dan pasca panen.

Bidang infrastruktur dasar dan ketahanan dikemas melalui strategi pengembangan Kawasan Kampung Agrowisata. Pengembangan Kawasan Kampung Agrowisata dilakukan berdasarkan permasalahan berikut.

1. Belum optimalnya anggaran program pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial.
2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian.
3. Sektor pertanian dan pariwisata perlu nilai tambah, agar mempunyai daya ungkit ekonomi yang besar.

Potensi wisata Kabupaten Tuban dalam pengembangan kawasan agrowisata meliputi letaknya yang strategis sebagai koridor transportasi ekonomi di Pulau Jawa, kontribusinya terhadap keamanan dan ketertiban umum yang kondusif, serta peluang pada sektor unggulan pariwisata alam, budaya, dan religi. Selain itu, potensi pertanian Kabupaten Tuban yang dapat dimanfaatkan antara lain banyaknya jumlah petani dan buruh tani, pendapatan utama penduduk dari sektor pertanian, dan lahan pertanian yang luas. Sedangkan potensi lingkungan hidup yang dimiliki Kabupaten Tuban meliputi garis pantai sepanjang 65 Km yang merupakan daya tarik wisata serta lingkungan pedesaan yang luas dan asri yang dapat dikelola untuk agrowisata.

Namun di samping itu, terdapat kendala yang harus dihadapi diantaranya jumlah agrowisata di Kabupaten Tuban yang masih sedikit, SDM (khususnya buruh tani, pokdarwis, UMKM, BumDes) masih belum memanfaatkan peluang sektor wisata di sektor wisata sekitar pertanian berbasis masyarakat, serta kecenderungan pengelolaan pariwisata yang tidak berkelanjutan dan berbasis masyarakat.



Gambar 49. Inovasi Strategi Penurunan Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2024 Melalui Agrowisata.
Sumber: DKPU ITS, 2023

Enabling environment dibutuhkan guna mewujudkan adanya Kawasan Kampung Agrowisata yaitu dengan uraian sebagai berikut.

1. Kebijakan/regulasi mengenai pariwisata, pertanian, tata ruang, dan pengentasan kemiskinan;
2. Dukungan dan komitmen masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan agrowisata.

Berdasarkan Gambar 49 *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan Kawasan Kampung Agrowisata diantaranya buruh tani, pokdarwis, UMKM, BumDes, dan Disbudporapar. Fasilitas yang ada pada kawasan ini antara lain penyediaan transportasi wisata (termasuk desain dan kemasan alat transportasi), rumah produksi (proses budidaya & pasca panen), festival produk pertanian, produk makanan dan minuman, souvenir produk lokal, dan pentas seni budaya khas tiap wilayah. Sedangkan pendukung lainnya yang perlu disiapkan antara lain penyiapan SDM, promosi yang masif (cara dan infrastruktur), penyediaan fasilitas pendukung meliputi: sanitasi & air bersih, kebersihan, tempat ibadah, akses jalan.

PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2025, pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan yang penting bagi Kabupaten Tuban. Upaya penanggulangan kemiskinan sebaiknya dilakukan lintas sektor dan lintas program dengan berkolaborasi bersama lintas pemerintah. Sesuai dengan fokus Rencana Pengentasan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban tahun 2024, maka perangkat daerah yang terlibat pada upaya peningkatan kualitas SDM (termasuk fasilitas/pendukung infrastruktur) dengan rincian program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2. Perangkat Daerah yang Terlibat pada Upaya Peningkatan Kualitas SDM (Termasuk Fasilitas/ Pendukung Infrastruktur) dan Rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Diskopumdag	1. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota; 2. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro; 3. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro; 4. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi; 5. Penyediaan sarana distribusi perdagangan; 6. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang; 7. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; 8. Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi; 9. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; 10. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota; 11. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.
Dinsos P3A PMD	1. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial; 2. Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya bukan korban hiv/aids dan napza di luar panti sosial; 3. Kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.
Disnakerin	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi; 2. Perluasan kesempatan kerja; 3. pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online; 4. Job fair /bursa kerja; 5. Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.
DKP2P	1. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan; 2. Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan; 3. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten/kota; 4. Penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal; 5. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota 6. Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun; 7. Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 8. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun.
Disbudporapar	1. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; 2. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; 3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional; 4. Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi;

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	5. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; 6. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif; 7. Pengembangan kompetensi sdm pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
Dispendik	8. Penyelenggaraan proses belajar nonformal/ kesetaraan (usia sekolah); 9. Penyelenggaraan proses belajar nonformal/ kesetaraan (bukan usia sekolah).
DPMPTSP	1. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 2. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.
BAZNAS	1. Program pemberian makanan rantang 3 kali sehari; 2. Rumah produksi.

Sementara itu, perangkat daerah yang terlibat pada upaya peningkatan daya beli/pendapatan baik melalui sub strategi peningkatan akses terhadap layanan dasar, penurunan beban pengeluaran, maupun perlindungan sosial dengan rincian program/kegiatan/sub kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perangkat Daerah yang Terlibat pada Upaya Peningkatan Kualitas SDM (Termasuk Fasilitas/ Pendukung Infrastruktur) dan Rincian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait

Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Diskopumdag	3. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.
DKP2P	1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan 2. Penyediaan Infrastruktur Lantaijemur 3. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Disbudporapar	1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Disnakerin	1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi 2. Perluasan Kesempatan Kerja
DPMPTSP	1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
BAZNAS	1. Rumah produksi
PKK	1. Program aku hatinya PKK (pemanfaatan lahan pertanian)
Sub strategi peningkatan akses terhadap layanan dasar	
Dinkes P2KB	1. Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan kewenangan daerah kabupaten/ kota; 2. Pengembangan puskesmas; 3. Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya; 4. Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas; 5. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya; 6. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan; 7. Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan; 8. Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan; 9. Pengadaan obat, vaksin; 10. Pengadaan bahan habis pakai; 11. Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan;

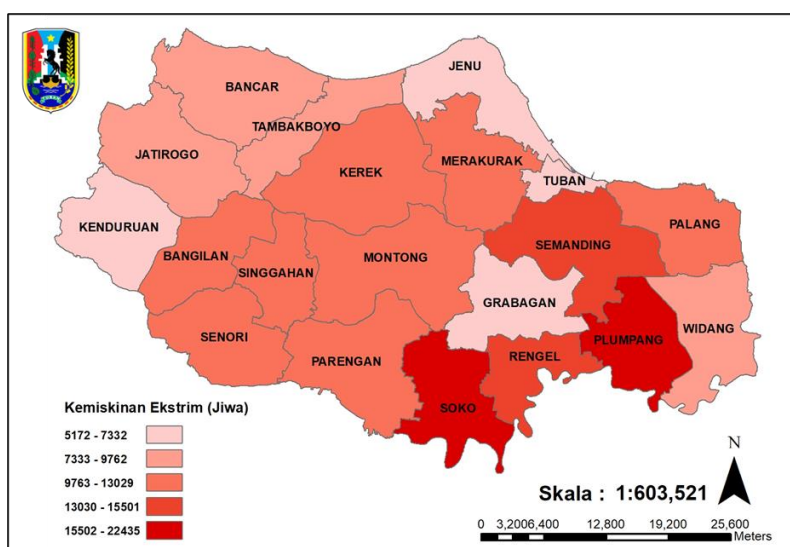
Perangkat Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	12. Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya; 13. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; 14. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan.
DLHP	1. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; 2. Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
DKP2P	1. Penyediaan infrastruktur lumbung pangan; 2. Penyediaan infrastruktur lantai jemur; 3. Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya; 4. Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik.
Dinas PUPR	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota; 2. Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman; 3. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat; 4. Perluasan spam jaringan perpipaan di kawasan perdesaan; 5. Perluasan spam jaringan perpipaan di kawasan perkotaan; 6. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis spam; 7. Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan.
PKK	8. Program aku hatinya PKK (pemanfaatan lahan pertanian).
Sub strategi penurunan beban pengeluaran	
Dinas PUPR	1. Perbaikan rumah tidak layak huni; 2. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; 3. Kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.
DLHP	1. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; 2. Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
Sub strategi perlindungan sosial	
Dinkes P2KB	1. Pengelolaan jaminan kesehatan Masyarakat.
Dinsos P3A PMD	1. Penyediaan permakanan; 2. Penyediaan sandang; 3. Penyediaan alat bantu; 4. Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti; 5. Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga; 6. Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.
Dispendik	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar; 2. Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar; 3. Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama; 4. Pengelolaan dana BOP PAUD.
BAZNAS	1. Program Pemberian makanan rantang 3 kali sehari.
PKK	1. Program bantuan peralatan sekolah; 2. Program bantuan kepada lansia (senam lansia); 3. Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Selanjutnya berdasarkan dokumen RAT Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2024, maka matriks program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban Tahun 2024 selengkapnya terlampir pada Lampiran 5.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah periode tahun 2020 – 2025 telah menuangkan terkait strategi dan kebijakan percepatan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tuban yang mana strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban periode tahun 2021 – 2026. Selain itu, misi untuk penanggulangan kemiskinan dengan tujuan menurunnya angka kemiskinan juga tertuang dalam visi dan misi bupati yang tertulis di dalam RPJMD Kabupaten Tuban dengan target pencapaian angka kemiskinan tahun 2025 sebesar 13,75 persen.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah periode 2020 – 2025 terdapat tahapan terstruktur yang dapat mempermudah dan memfokuskan arahan kerja setiap *stakeholder* yang terkait, serta perlunya penyesuaian dengan RPJMD Kabupaten Tuban. Pada tahun 2025 prioritas penanggulan kemiskinan ditekankan pada aspek peningkatan pendapatan serta penurunan angka kemiskinan ekstrem. Dalam hal ini kemiskinan ekstrem selalu menjadi prioritas penanggulan kemiskinan di setiap tahunnya karena pada dasarnya akar permasalahan dari kemiskinan ekstrem menurut BPS adalah ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.



Gambar 50. Kondisi Eksisting Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Tuban Tahun 2023.

Sumber: Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Pada tahun dasar 2011, *World Bank* mendefinisikan kemiskinan ekstrem sebagai penduduk yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 1,9 PPP per hari, sedangkan BPS pada tahun 2023 menetapkan nilai tersebut sebesar Rp 11.571,21 per orang per hari, atau didefinisikan sebagai Rp 351.957,4 per orang per bulan. Berdasarkan data Verbal Dinsos P3A PMD Kabupaten Tuban Terbaru, Kecamatan Soko merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Selain itu, Kecamatan Plumpang, Semanding, Rengel, dan Singgahan juga memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi.

Peningkatan perekonomian Kabupaten Tuban tidak hanya terfokus pada tantangan peningkatan produksi dan produktifitas saja, namun juga tantangan rendahnya

penciptaan nilai ekonomi itu sendiri pada sektor pertanian, dimana hampir 40% penduduk Kabupaten Tuban berada pada sektor pertanian. Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Tuban harus mencapai kemandirian dan ketahanan sosial melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi kemiskinan dalam skala besar dengan pendekatan yang menyeluruh serta inklusif dan integratif.

Terdapat 3 misi yang telah dirumuskan guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Tuban, yaitu Misi 1, Misi 2, dan Misi 3. Untuk mencapai misi-misi tersebut, ditentukan beberapa tujuan untuk masing-masing misi yang kinerjanya termuat di Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Terkait Kemiskinan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2020)	Target		Realisasi		Evaluasi
						2022	2023	2022	2023	
Membangun dan Mewujudkan Infrastruktur Desa dan Utilitas Kota yang Terpadu, Partisipatif, Efektif, Berwawasan Lingkungan serta Selaras dengan Pertumbuhan dan Pemerataan Sosial, Ekonomi dan Budaya, serta Bertumpu pada Nilai-nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal	Mewujudkan Tuban Yang Layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur Terpadu, Berwawasan Lingkungan, dan Selaras Aktivitas Sosial Ekonomi Lokal		Meningkatnya kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI) (%)	75,80	75,96	76,06	78,86	81,06	Melampaui
			Terwujudnya Utilitas Ruang Untuk Kehidupan Yang Harmonis	Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup	88,00	89,50	90,26	89,82	90,28	Melampaui
Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sektor Pertanian secara Meluas (Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan), Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, yang Berbasis Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan, serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memampatkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatkan Daya Saing dan Daya Sanding (Sinergi-Kolaboratif) Ekonomi Daerah Sektor Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pariwisata dan Perindustrian, Perdagangan, Berbasis Pemberdayaan Dan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi			-5,85	4	4,1	8,88	4,36	Melampaui
		Tingkat Kemiskinan			15,91	15,00	14,57	15,02	14,91	Belum Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			4,81	3,5	2,6	4,54	4,40	Belum Tercapai
				PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,39	1,29	1,3	1,89	0,74	Belum Tercapai
				PDRB Sektor Industri Pengolahan	-11,44	3,2	3,1	17,71	3,39	Melampaui
				PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9,34	3,7	3,7	8,58	8,69	Melampaui
				Tingkat Inflasi Daerah	1,93	1,58	1,42	5,76	2,64	Belum Tercapai
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Terlatih	Meningkatnya Keunggulan SDM Seutuhnya Terdidik, Terlatih, Sehat, Berdaya, dan Setara Secara Gender			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		10,10	10,3	11,319	11,64	Melampaui
				Indeks Pemberdayaa n Gender	65,54	66,02	66,5	64	65,03	Belum Tercapai

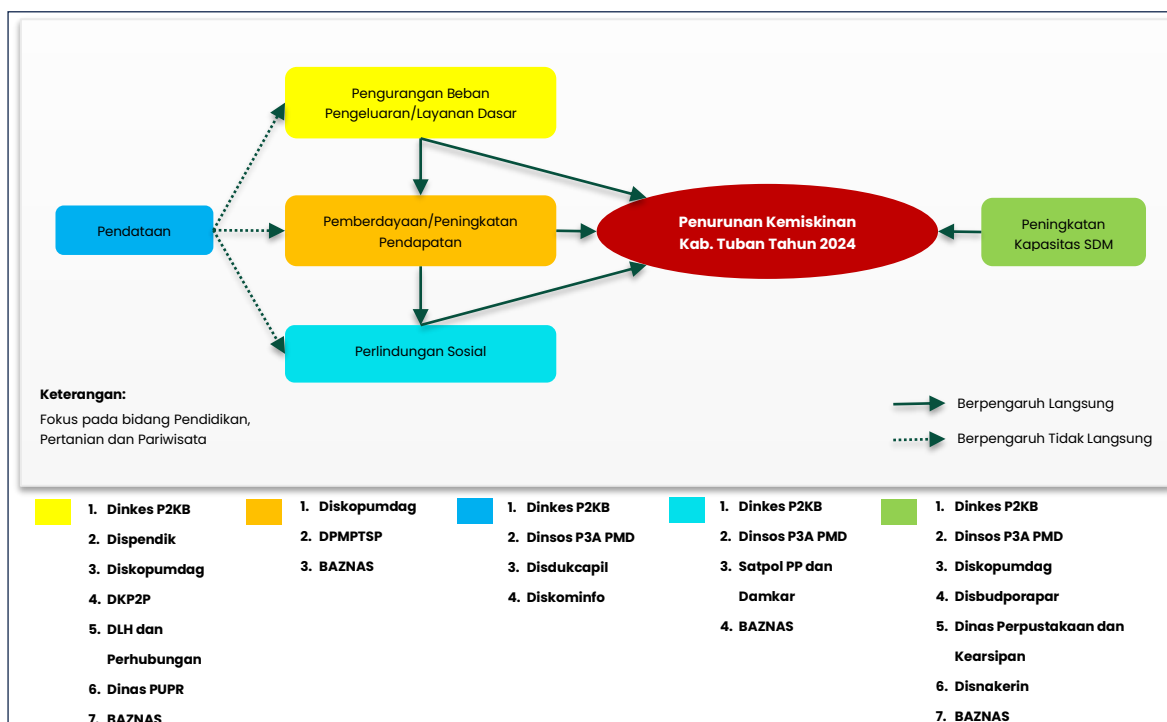
Sumber: Kabupaten Tuban dalam Angka, 2022 - 2024 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4, pada misi kedua masih terdapat sasaran dan indikator tujuan yang belum tercapai diantaranya yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, serta PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, misi kedua menjadi dasar dalam penyusunan RAT Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan tahun 2025 khususnya pada peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan pariwisata selain mengacu pada arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Tuban.

4 (empat) strategi sesuai Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai acuan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) diantaranya yaitu:

1. Perbaiki program perlindungan sosial; (Perlindungan dalam menghadapi goncangan: jatuh sakit, kematian, kehilangan pekerjaan, bencana alam)

3. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar; (Pemenuhan kebutuhan pendidikan, pangan, kesehatan, infrastruktur)
4. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; (Peningkatan kapasitas masyarakat miskin agar lebih dapat berupaya mandiri)
5. Pembangunan inklusif. (Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan)



Gambar 51. Cascading Strategi Penurunan Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Sumber: Dinas Sosial P3A PMD Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Strategi RAT Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2025 difokuskan pada bidang pertanian dan pariwisata dengan tujuan untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan akses terhadap layanan dasar berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan berdampak tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan. Sedangkan, Perlindungan sosial berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan. Selain peningkatan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan pendapatan juga dipengaruhi langsung oleh penurunan beban pengeluaran.

Perangkat daerah yang terlibat pada upaya pengurangan beban pengeluaran/ layanan dasar dengan rincian program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 5. Perangkat Daerah yang Terlibat pada Upaya Pengurangan Beban Pengeluaran/Layanan Dasar dan Rincian Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait

Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas PUPR	1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2. Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan
	3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Dinkes P2KB	1. Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar 4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar 5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 9. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 10. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 13. Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 14. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 15. Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama 16. Persentase KK Akses Jamban Sehat 17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 18. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 20. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 22. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 24. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 29. Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan orang dengan tuberkulosis 30. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV) 31. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 32. Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang melayani KB MKJP 33. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (BOKB)
DKP2P	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
DLH dan Perhubungan	1. Presentase angkutan umum yang layak jalan / Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2. Persentase APJ yang tercukupi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia
Diskopumdag	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Dispendik	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru 2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan
	4. Pembangunan Perpustakaan Sekola 5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 8. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9. Pengadaan Mebel Sekolah 10. Pengadaan Perlengkapan Siswa 11. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 14. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 15. Pembangunan Ruang Kelas Baru 16. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 17. Pembangunan Laboratorium 18. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 19. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 20. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 21. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 22. Pengadaan Mebel Sekolah 23. Pengadaan Perlengkapan Siswa 24. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 25. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 26. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 27. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 28. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 29. Pengadaan Mebel PAUD 30. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 31. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 32. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 33. Pengelolaan Dana BOP PAUD 34. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 36. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 37. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 38. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
BAZNAS	1. Beasiswa SD/Mi 2. Beasiswa SMP/MTS 3. Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) 4. Bantuan Biaya Pendidikan 5. Rumah Cerdas 6. Biaya berobat 7. Bantuan Rehabilitasi Rumah Dhuafa 8. Bantuan Kebencanaan

Sumber: DKPU ITS, 2024 (Diolah)

Sementara, perangkat daerah yang terlibat pada upaya peningkatan pendapatan baik melalui sub strategi peningkatan akses terhadap layanan dasar, penurunan beban pengeluaran, maupun perlindungan sosial dengan rincian program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut.

Tabel 6. Perangkat Daerah yang Terlibat pada Upaya Pemberdayaan/Peningkatan Pendapatan dan Rincian Kegiatan/Sub Kegiatan Terkait

Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan
DPMTSP	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
Diskopumdag	1. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 2. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

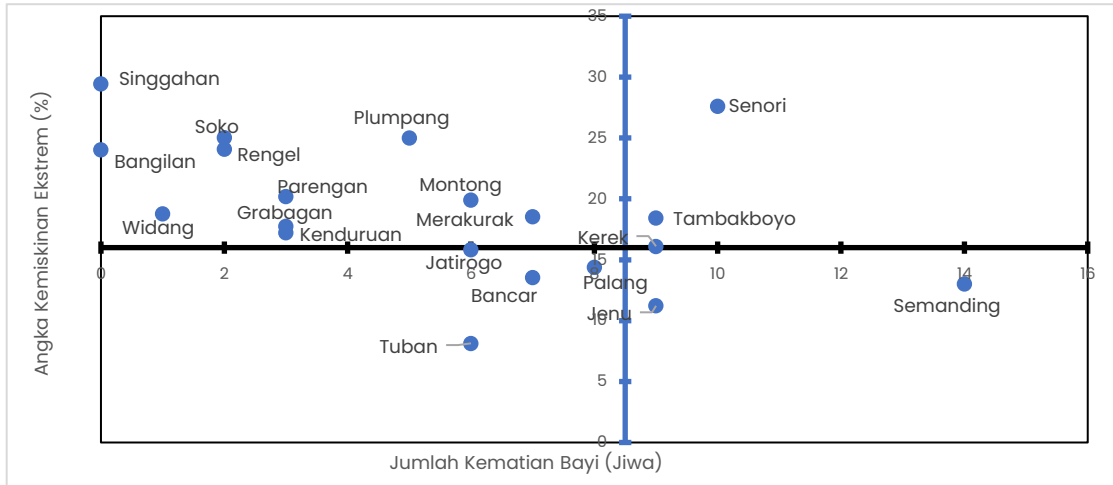
Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan
	3. Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 4. Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 5. Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Dinkes P2KB	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3. Persentase keluarga yang terpapar binaan
Satpol PP dan Damkar	1. Kegiatan rutin on Call Pemantauan Pembinaan terhadap Trantibum Selama 24 jam ; Patroli Gabungan ; kegiatan Pengamanan Gabungan PHBN, Hari Jadi Tuban dan Pejabat Negara Lainnya ; Pengamanan Kegiatan Bupati di Luar Wilayah Kecamatan Kota ; Kegiatan Pengamanan Gabungan Posko Lebaran ; Kegiatan Pengamanan Gabungan Posko Nataru 2. Operasi Gabungan pengendalian Secara Terpadu ; Pengamanan Gabungan Kegiatan Demonstrasi / Unjuk Rasa ; Penertiban Antar Wilayah di Kecamatan 3. Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup (Sosialisasi Tatap Muka , Sosialisasi Melalui Media, Even Pagelaran Wayang Kulit dan Gempur Rokok Ilegal, Sosialisasi Tibumtranmas) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dinsos P3A PMD	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Permakanan 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 7. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 8. Pemberian Layanan Kedaruratan 9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 10. Pemberian Layanan Rujukan 11. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 12. Penyediaan Sandang 13. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 15. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 16. Penyediaan Makanan
BAZNAS	1. Bantuan Modal Usaha 2. Pelatihan dan Pemberdayaan Umat 3. Program Zakat Mart 4. Zakat Community Development (ZCD) 5. Paket Kurban 6. Bantuan syiar Islam
Sub Strategi Pendataan	
DPMPTSP	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Disdukcapil	1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 2. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggung jawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 3. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
Dinsos P3A PMD	1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 3. Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4. Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Diskominfo	1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Perangkat Daerah	Kegiatan/Sub Kegiatan
	2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Strategi Perlindungan Sosial	
Satpol PP dan Damkar	1. Kegiatan rutin <i>on Call</i> Pemantauan Pembinaan terhadap Trantibum Selama 24 jam ; Patroli Gabungan ; kegiatan Pengamanan Gabungan PHBN, Hari Jadi Tuban dan Pejabat Negara Lainnya ; Pengamanan Kegiatan Bupati di Luar Wilayah Kecamatan Kota ; Kegiatan Pengamanan Gabungan Posko Lebaran ; Kegiatan Pengamanan Gabungan Posko Nataru 2. Operasi Gabungan pengendalian Secara Terpadu ; Pengamanan Gabungan Kegiatan Demonstrasi / Unjuk Rasa ; Penertiban Antar Wilayah di Kecamatan 3. Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup (Sosialisasi Tatap Muka , Sosialisasi Melalui Media, Even Pagelaran Wayang Kulit dan Gempur Rokok Ilegal, Sosialisasi Tibumtranmas) 4. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Dinsos P3A PMD	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Permakanan 3. Penyediaan Alat Bantu 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 6. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 7. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 8. Pemberian Layanan Kedaruratan 9. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 10. Pemberian Layanan Rujukan 11. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 12. Penyediaan Sandang 13. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 14. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial 15. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 16. Penyediaan Makanan
Dinkes P2KB	1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 3. Persentase keluarga yang terpapar binaan
BAZNAS	7. JAMKESBAZ 8. Apotik Dhuafa 9. Bantuan Alat Kesehatan 10. Bantuan Operasional Pengobatan 11. Jambanisasi 12. Stanting 13. Zakat Fitrah 14. Biaya Hidup Fakir 15. Bantuan Pembayaran Hutang 16. Bantuan Ibnu Sabil 17. Santunan Mustahik Insidental 18. Program Bina Muallaf 19. Kelas Pembinaan Islam 20. Bantuan Dai/Marbot 21. Paket Ifthar Ramadhan 22. Bantuan Guru Ngaji

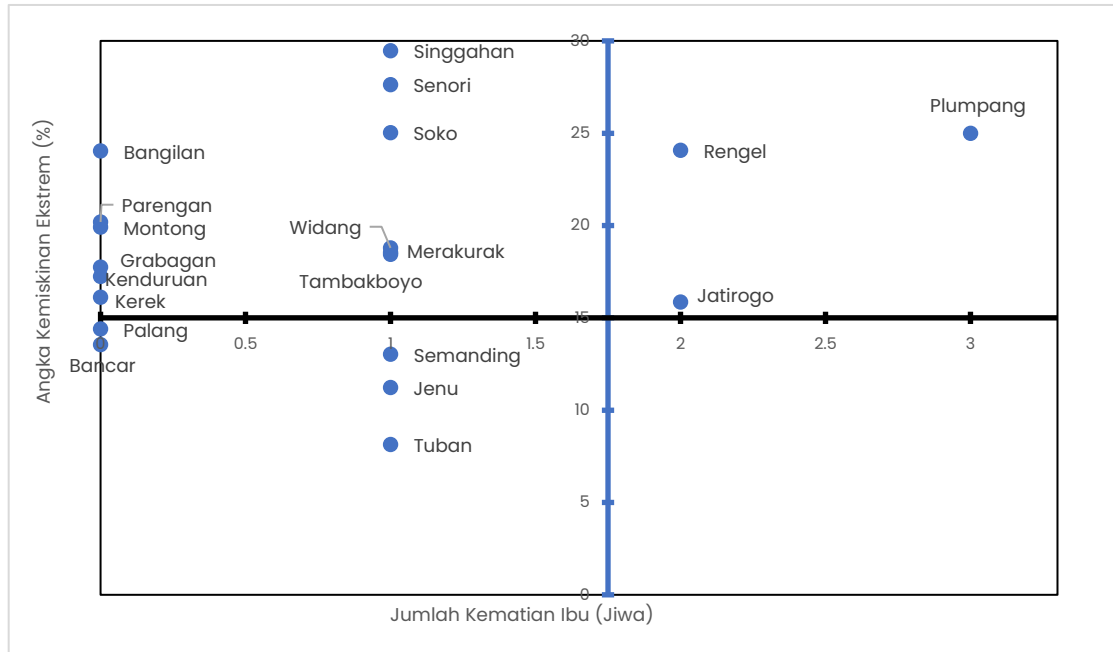
Sumber: DKPU ITS, 2024 (Diolah)

Pada indikator kesehatan, jumlah kematian Ibu, jumlah kematian bayi, dan jumlah bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) merupakan permasalahan yang erat kaitannya dengan kemiskinan. Maka dari itu, dilakukan perbandingan data dari jumlah kematian Ibu, jumlah kematian bayi, dan jumlah bayi dengan berat lahir rendah terhadap angka

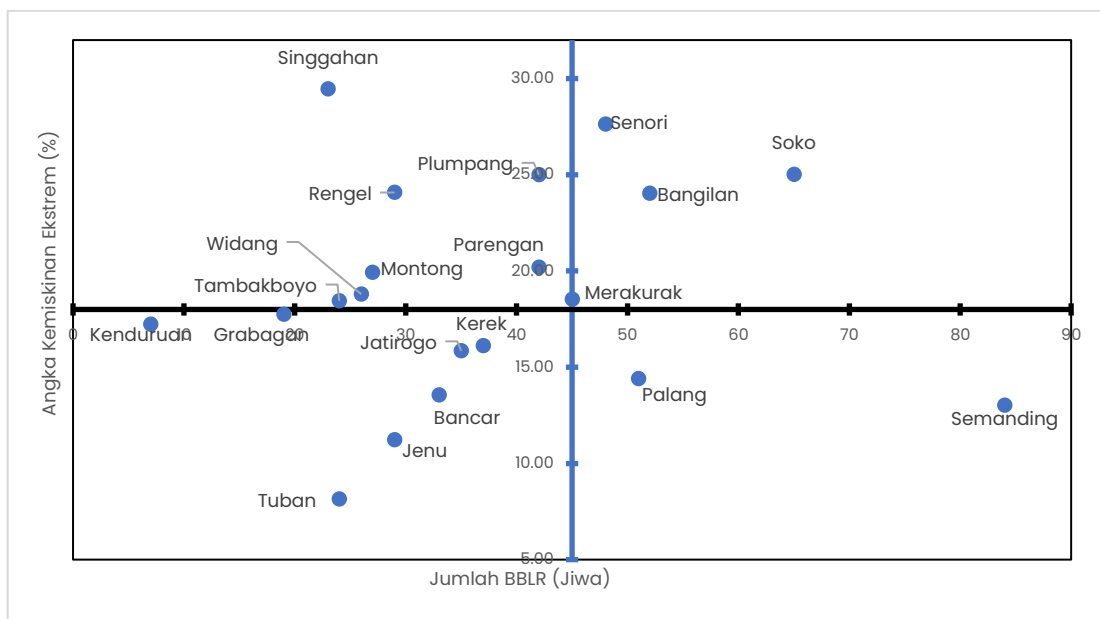
kemiskinan ekstrem. Hasil analisis ini dilakukan guna menunjukkan beberapa kecamatan yang dapat dijadikan sebagai lokasi prioritas penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan Gambar 52, lokasi prioritas berdasarkan jumlah kematian bayi dan angka kemiskinan ekstrem tinggi adalah Kecamatan Senori, Tambakboyo, dan Kerek. Sedangkan, lokasi prioritas berdasarkan jumlah kematian ibu dan angka kemiskinan ekstrem tinggi adalah Kecamatan Rengel, Plumpang, dan Jatirogo (Gambar 53). Menurut Gambar 54, lokasi prioritas berdasarkan jumlah kematian bayi dengan berat badan lahir rendah dan angka kemiskinan ekstrem tinggi adalah Kecamatan Senori, Soko, Bangilan, dan Merakurak.



Gambar 52. Lokasi Prioritas Berdasarkan Jumlah Kematian Bayi (Jiwa) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

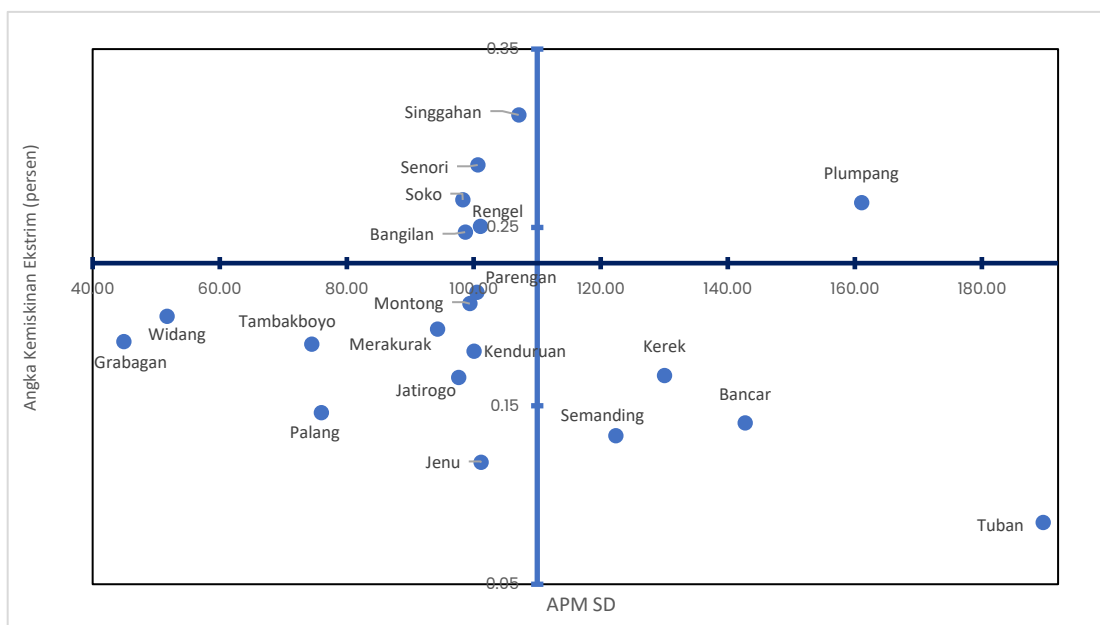


Gambar 53. Lokasi Prioritas Berdasarkan Jumlah Kematian Bayi (Jiwa) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

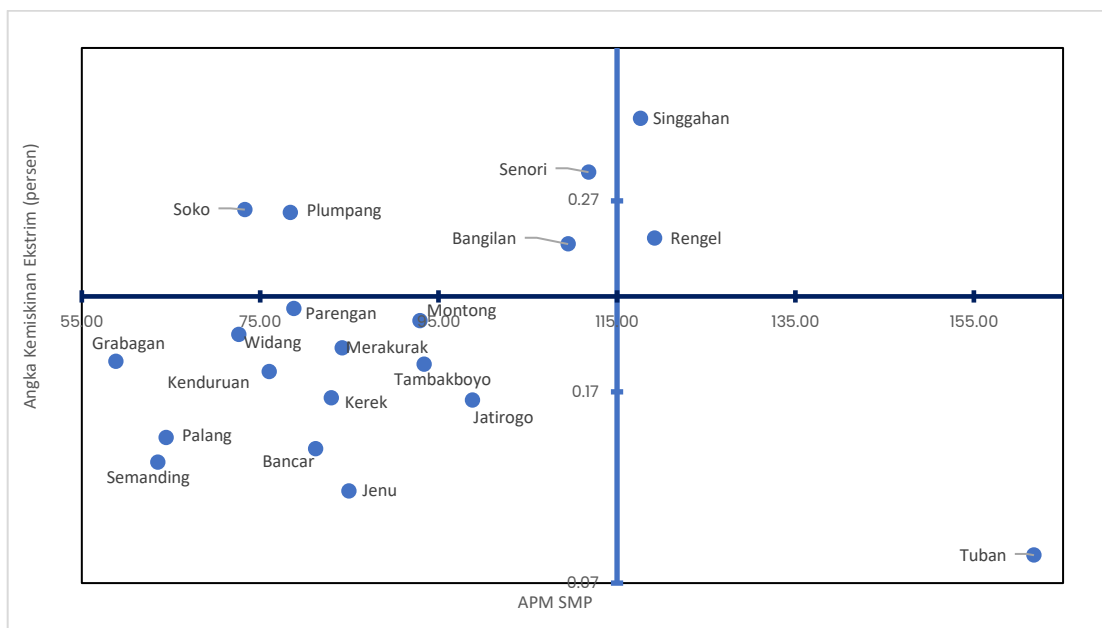


Gambar 54. Lokasi Prioritas Berdasarkan Jumlah BBLR (Jiwa) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

Pada indikator pendidikan dilakukan penyandingan angka kemiskinan ekstrem dengan angka partisipasi murni maupun angka partisipasi kasar baik pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Menurut analisis pada Gambar 55, lokasi prioritas berdasarkan jumlah APM jenjang pendidikan SD yang rendah dan angka kemiskinan ekstrem tinggi adalah Kecamatan Singgahan, Senori, Soko, Rengel, dan Bangilan. Sedangkan, lokasi prioritas berdasarkan APM pada jenjang SMP yang rendah dan angka kemiskinan ekstrem tinggi adalah Kecamatan Soko, Plumpang, Bangilan, dan Senori (Gambar 56).

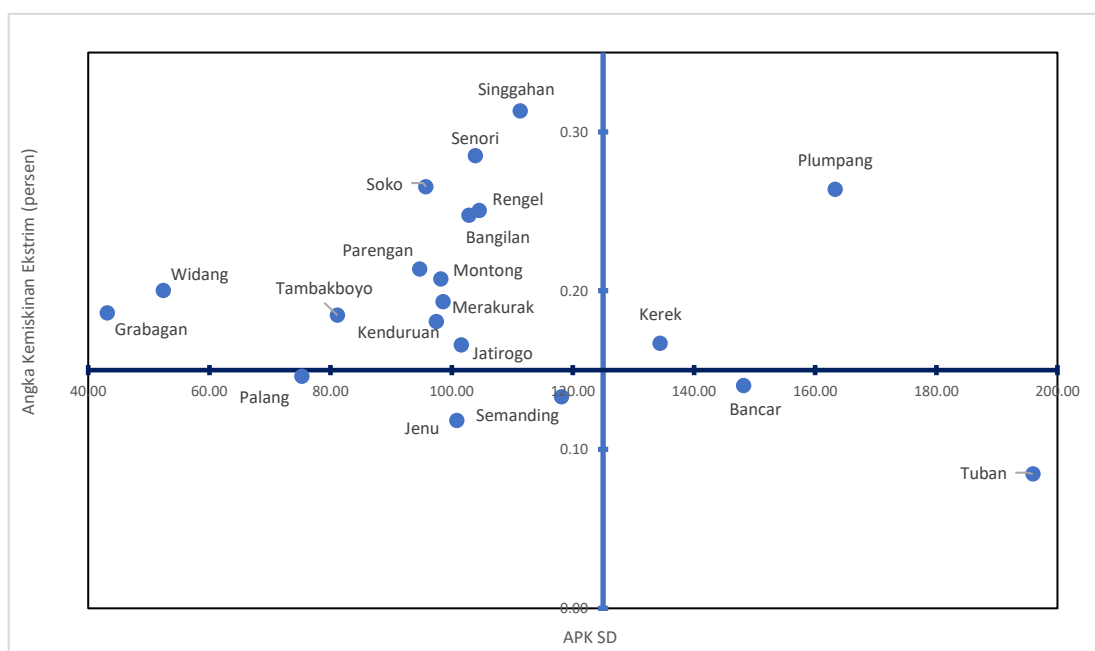


Gambar 55. Lokasi Prioritas Berdasarkan APM Jenjang Pendidikan SD (%) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

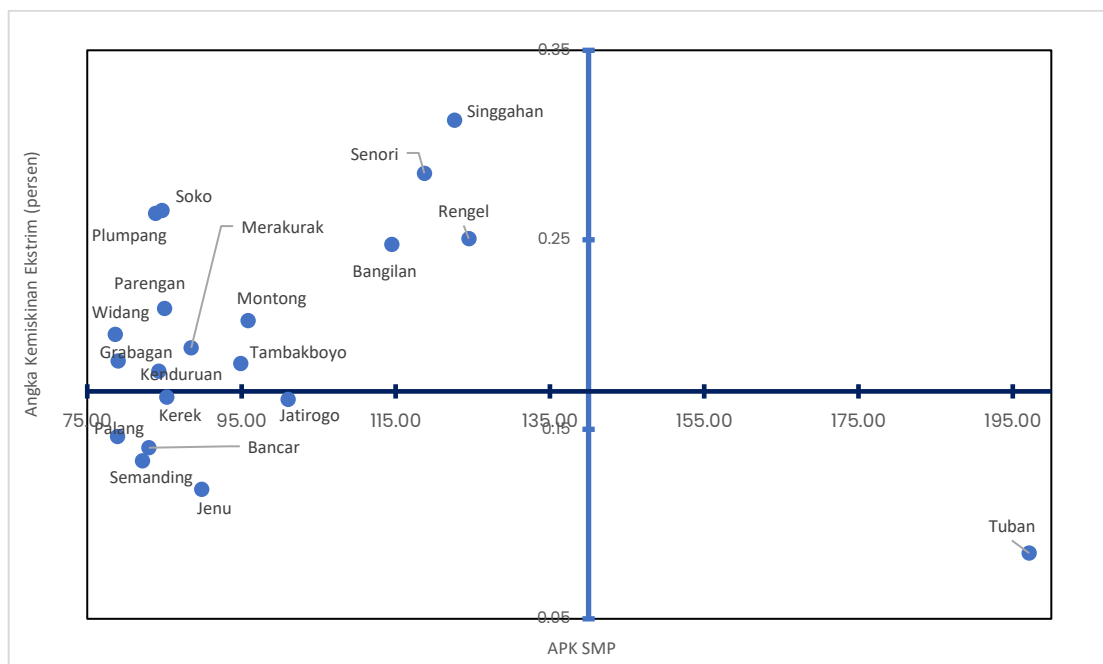


Gambar 56. Lokasi Prioritas Berdasarkan APM Jenjang Pendidikan SMP (%) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

Lokasi prioritas berdasarkan APK pada jenjang SD yang rendah dan angka kemiskinan ekstrem tinggi yang ditampilkan pada Gambar 57 adalah Kecamatan Singgahan, Senori, Soko, Rengel, Parengan, Bangilan, Montong, Merakurak, Kenduruan, Jatirogo, Tambakboyo, Widang, dan Grabagan. Sementara itu, lokasi prioritas berdasarkan APK pada jenjang SMP yang rendah dan angka kemiskinan ekstrem tinggi adalah Kecamatan Singgahan, Senori, Soko, Rengel, Plumpang, Bangilan, Parengan, Montong, Widang, Grabagan, Tambakboyo, dan Kenduruan (Gambar 58).

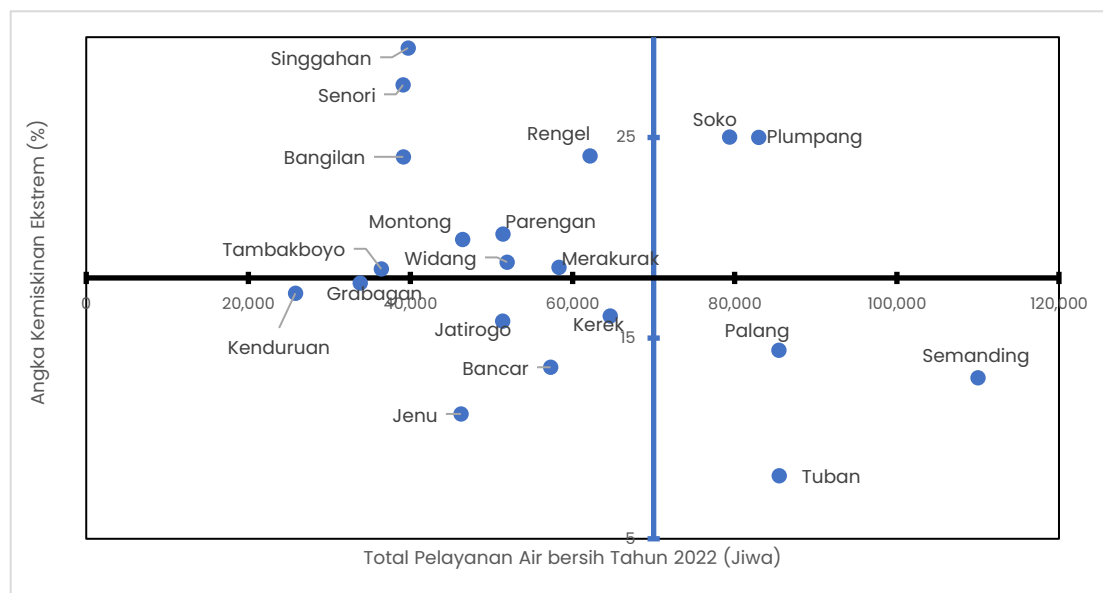


Gambar 57. Lokasi Prioritas Berdasarkan APK Jenjang Pendidikan SD (%) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.



Gambar 58. Lokasi Prioritas Berdasarkan APK Jenjang Pendidikan SMP (%) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

Pada indikator bidang infrastruktur dilakukan penyandingan angka kemiskinan ekstrem dengan total pelayanan air bersih yang rendah. Berdasarkan Gambar 59, lokasi prioritas berdasarkan total pelayanan air bersih yang rendah dan angka kemiskinan ekstrem tinggi adalah Kecamatan Singgahan, Senori, Rengel, Bangilan, Montong, Parengan, Tambakboyo, Widang, dan Merakurak.



Gambar 59. Lokasi Prioritas Berdasarkan Total Pelayanan Air Bersih (Jiwa) dan Angka Kemiskinan Ekstrem (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2023.

FAKTOR PENDORONG DAN HAMBATAN TERHADAP RENCANA AKSI TAHUNAN PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2025

Setelah menganalisis karakteristik permasalahan pada bidang kemiskinan, bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dasar, dan bidang ketahanan pangan pada Bab 2, permasalahan pada masing-masing bidang telah diidentifikasi. Terdapat tantangan dan hambatan yang harus diatasi untuk menyelesaikan akar permasalahan melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Di sisi lain, terdapat faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dipersiapkan untuk keberhasilan implementasi. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan RAT Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2025, berdasarkan urusan-urusan sektor penyebab kemiskinan, adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Faktor Pendorong dan Hambatan terhadap Rencana Aksi Tahunan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2025

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
PENINGKATAN KAPASITAS			
1	Ketenagakerjaan	Anggaran yang tersedia untuk menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan pelatihan. (OPD Disnakerin)	- Terbatasnya lowongan pekerjaan. (OPD Disnakerin) - Belum validnya data pekerja rentan. (OPD Disnakerin)
2	Pariwisata	- Minat masyarakat dan SDM pariwisata yang tinggi terhadap Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar. (OPD Disbudporapar) - Minat calon peserta pelatihan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang tinggi. (OPD Disbudporapar)	Ekonomi kreatif bidang digital kreatif merupakan hal baru di Kabupaten Tuban dan Ekosistemnya juga masih belum terbentuk. (OPD Disbudporapar)
3	Perpustakaan	- Keinginan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan masyarakat sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 serta usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang unggul dan cerdas. (OPD Dispersip) - Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui literasi, baik dari segi peningkatan kualitas SDM maupun ekonomi dengan memanfaatkan perpustakaan desa sebagai pusat kegiatan	- Budaya dan tingkat kecerdasan masyarakat yang sangat majemuk, serta lemahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya peranan informasi bagi pengembangan kehidupan seseorang dan pembangunan masyarakat dan bangsa. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap arti dan peranan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan. (OPD Disperpusip) - Rendahnya keinginan masyarakat untuk memanfaatkan bahan

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		masyarakat. (OPD Dispersip) Keinginan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Tuban melalui peningkatan literasi, sehingga diharapkan dengan meningkatnya literasi masyarakat kabupaten tuban maka dapat meningkat pula pendapatan masyarakat dari hasil literasi. (OPD Dispersip)	bacaan di perpustakaan padahal dari membaca masyarakat dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat meningkatkan kesejahteraan. (OPD Dispersip) - Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya literasi bagi kehidupan. (OPD Dispersip) - Kurangnya dukungan dari pihak Desa atau Kepala Desa dalam hal ini tidak adanya anggaran khusus untuk pengembangan perpustakaan yang mendukung kegiatan pengembangan literasi di desa, selain kurangnya dukungan dalam hal anggaran pun juga kurangnya inovasi dalam kegiatan pengembangan literasi di desa. (OPD Dispersip) - Kurangnya dukungan anggaran dari pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah untuk pengembangan perpustakaan misalnya mengenai pengembangan koleksi setiap tahunnya, selain itu juga kurangnya program kegiatan pendukung pengembangan literasi sekolah seperti Gerakan Literasi Sekolah, kegiatan lomba mengenai literasi. (OPD Dispersip)
4	Sosial, P3A serta PMD	- Dinsos aktif dalam memberikan bimbingan ke pekerja sosial masyarakat (PSM), anggaran masih ada, dan semua desa ter-cover oleh program Program Pemberdayaan Sosial. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Rasa kepedulian OPD ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang	- Pemberian honor untuk PSM belum teralisasi dalam 2 tahun terakhir. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Kurangnya honor yang diberikan ke TSK. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Masih

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		tinggi. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Adanya pendamping dari Kementerian (pusat) untuk masing-masing kecamatan pada subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Pendampingan secara resmi dan legal oleh tenaga ahli dari LK3 dalam Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). (OPD Dinsos, P3A PMD)	menjadi program baru dan masih fokus ke pemberdayaan PSKSK. (OPD Dinsos, P3A PMD) Kurangnya tenaga konsultasi yang tersedia sedangkan banyak kasus sosial yang terjadi dan dana yang dimiliki lembaga LK3 hanya berasal dari pemerintah Tuban saja. (OPD Dinsos, P3A PMD)
5	Keluarga Berencana	Partisipasi pihak desa dalam pembentukan kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga). (OPD Dinkes P2KB)	Kurangnya anggaran untuk membentuk kelompok baru Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) di tiap desa. (OPD Dinkes P2KB)
6	Kesehatan	- Meningkatkan mutu pelayanan KIA di Puskesmas/Polindes. (OPD Dinkes P2KB) - Evaluasi program untuk peningkatan pelayanan kesehatan Anak. (OPD Dinkes P2KB) - Meningkatnya Pengetahuan Guru PAUD/RA/TK tentang DDTK. (OPD Dinkes P2KB)	- Belum semua Progam KIA dan KB berjalan dengan baik sehingga perlu dilakukan pembinaan. (OPD Dinkes P2KB) - Belum semua Guru PAUD/RA/TK mengikuti Pelatihan DDTK. (OPD Dinkes P2KB)
7	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan perangkat daerah lainnya. (OPD Diskopumdag)	Kurangnya SDM Bidang UMKM. (OPD Diskopumdag)
8	Kebudayaan	-	Kurangnya motivasi dari peserta dalam

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			pengimplementasian hasil Pelatihan <i>up skill</i> untuk SDM kesenian tradisional. (OPD Disbudporapar)
9	Kepemudaan dan Olahraga	-	Sulitnya mencari peserta pelatihan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (wirausahawan baru dengan usia < 30 tahun). (OPD Disbudporapar)
10	Koperasi	-	Anggaran bergantung pada Kegiatan Pemerintah Pusat untuk program Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. (OPD Diskopumdag)

PERLINDUNGAN SOSIAL

1	Sosial, P3A serta PMD	- Semakin banyak bantuan yang diusahakan oleh dinas dalam Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Target penyediaan permakanan untuk lansia tahun 2025 menurun karena disesuaikan dengan DTKS (menurun), Anggaran menurun, dan MoU dengan warga. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Jumlah pengajuan pemberian bantuan sosial membuat program menjadi berjalan. (OPD Dinsos, P3A PMD) - PPDM (Pendamping Penyandang Disabilitas Mental) ada di setiap kecamatan dan jalinnya koordinasi yang baik dengan stake holder. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Koordinasi dengan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, 1 bantuan orang terlantar (diajukan polisi sebagai dasar dinsos) dalam subkegiatan pemberian layanan data dan pengaduan untuk pemulangan (pemberian	- Masih banyak LKSA yang belum resmi terdaftar di Kabupaten Tuban. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Belum semua warga terjangkau karena kesesuaian data DTKS perlu diusulkan lagi dari Kecamatan. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Terdapat jeda waktu dalam mengajukan proposal oleh pemohon dalam pengajuan bantuan sosial. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Perlu mobilitas tinggi dari Dinsos namun kuantitas SDM masih kurang. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Bimbingan terhadap anak jalanan sulit dilakukan karena mindset dan kepatuhan yang buruk. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Kurangnya support data. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Keuntungan bantuan sosial berpotensi menjadi lahan cari uang. (OPD Dinsos, P3A PMD) - Sulitnya mencari penyedia jasa gali kubur dalam pemakaman orang di rumah perlindungan sosial (RPS) atau RS. (OPD Dinsos, P3A PMD)
---	-----------------------	--	--

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		ongkos) orang terlantar. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Koordinasi yang baik dengan RS dan Dinkes dalam Pemberian Layanan Kedaruratan. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Komunikasi dengan dinas kabupaten/kota lain dalam Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Fasilitas yang dimiliki RSJ cukup baik untuk pemberian layanan rujukan. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Menggandeng guru-guru SLB dengan antusias yang tinggi dalam Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi disabilitas. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Pemenuhan Kebutuhan dasar dalam Penyediaan Sandang untuk PPKS. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Kolaborasi dengan OPD Diskopumdag dan guru tata boga untuk Pelatihan pemberdayaan ex-tuna sosial dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Banyak organisasi disabilitas di Tuban yang sudah sadar inklusi sosial. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Pemenuhan penanganan pertama dengan penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti (Rumah Perlindungan Sosial (RPS)). (OPD Dinsos, P3A PMD)	• Kesulitan saat mencari keluarga yang dimaksudkan dalam program pemberian pelayanan penelusuran keluarga. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Tidak ada KSJ di Kab. Tuban sehingga harus dirujuk ke Surabaya, sementara keluarga tidak ingin menjemput. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Keterbatasan kuota akibat kendala anggaran, tempat, dan waktu dalam Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar untuk disabilitas. (OPD Dinsos, P3A PMD) • ODGJ merobek atau membuang pakaian yang diberi ketika menerima bantuan pemenuhan sandang. (OPD Dinsos, P3A PMD) • <i>Mindset</i> peserta yang suka mengemis dibandingkan usaha sendiri meskipun sudah diberi bantuan alat. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Daerah atau kecamatan yang jauh memiliki keterbatasan akses mendapat bantuan. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Kondisi warga di RPS yang kurang mendukung keawetan obat. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Terkendalanya akomodasi menuju tempat yang mau dikunjungi akibat terjadi bencana sehingga tempat menjadi tidak strategis. (OPD Dinsos, P3A PMD)
2	Trantibumlinmas	• Dukungan anggaran dan adanya perda tentang Tibumtranmas, koordinasi/kerja sama yang baik dengan Instansi terkait	• Kurangnya Dukungan Tindak Lanjut Pasca Penertiban. (OPD Satpol PP dan Damkar)

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		(Unsur TNI, Polri dan Dishub). (OPD Satpol PP dan Damkar)	• Belum Clear dan efektif pasca penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. (OPD Satpol PP dan Damkar) • Terbatasnya jumlah PPNS. (OPD Satpol PP dan Damkar)
PENDATAAN			
1	Komunikasi dan Informatika	• Partisipasi aparat pemerintah dalam pemanfaatan jaringan TIK. (OPD Diskominfo)	• Masih adanya sistem informasi yang belum sesuai dengan standar dari DiskominfoSP. (OPD Diskominfo)
2	Sosial, P3A serta PMD	• Koordinasi pengajuan dari kecamatan terjalin dengan baik. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Tenaga SDM pendamping cepat dalam melakukan koordinasi. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Proses pembagian beras secara langsung di kantor kecamatan masing masing (20 kecamatan) sehingga lebih tepat sasaran. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Antusias masyarakat penerima manfaat yang cukup tinggi. (OPD Dinsos, P3A PMD)	• Tingkat kevalidan data yang diberikan petugas perval dari desa, data kemiskinan dari aplikasi Kemensos terbatas wewenangnya. (OPD Dinsos, P3A PMD) • SDM pendamping kadang tidak saling sinkron sehingga perlu dilakukan pelatihan. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Adanya perubahan harga beras sedangkan anggaran sudah ditetapkan, jadi penerima bantuan berkurang. Ditambah dengan kurangnya jumlah SDM yang bertugas di dinas. (OPD Dinsos, P3A PMD) • Bantuan pengembangan usaha berupa barang alat usaha untuk orang yang mau mendirikan usaha (khusus DTKS yang diusulkan membangun usaha) baru dijalankan di 1 kecamatan jadi belum menyeluruh. (OPD Dinsos, P3A PMD)
3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Dalam pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk telah dilaksanakan: • Kerjasama dengan cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur untuk dilaksanakan perekaman	• Dalam pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk: 1) Masih terdapat wajib KTP pemula yang belum melakukan perekaman khususnya pelajar Sekolah

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		bagi pelajar SMA. (OPD Dukcapil) - Perekaman dan penerbitan KTP-el/KIA bagi penyandang disabilitas melalui program "Sayang Difabel" di sekolah luar biasa dan beberapa desa/kelurahan. (OPD Dukcapil) - Layanan Update KK di Kantor Desa oleh petugas register Desa. (OPD Dukcapil) - Sosialisasi dan pemberian Buku Pokok Pemakaman untuk semua Desa /Kelurahan agar diisi oleh petugas register desa/kelurahan sekaligus untuk diajukan permohonan akta kematian. (OPD Dukcapil) - Dalam Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan telah dilaksanakan: - Optimalisasi pelayanan dokumen aplikasi kependudukan untuk pelayanan inovasi dari "Cedak Mas ", "KTP In School", dan "Sayang Difabel, Lansia, ODGJ". (OPD Dukcapil) - Update kartu keluarga. (OPD Dukcapil) - Digitalisasi dokumen adminduk di masing-masing kecamatan di aplikasi SIAK terpusat. (OPD Dukcapil) - Meringkas syarat dokumen. (OPD Dukcapil) - Untuk memanfaatkan data administrasi penduduk harus bekerjasama dengan Dukcapil. (OPD Dukcapil)	Menengah Atas/ Sederajat. Hal ini terjadi karena kesempatan untuk melakukan perekaman waktunya bersamaan dengan jam pelajaran. (OPD Dukcapil) - Masih adanya penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas dan ODGJ yang tidak paham tentang pentingnya dokumen kependudukan. (OPD Dukcapil) - Banyaknya penduduk yang tidak meng-Update data kependudukannya karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. (OPD Dukcapil) - Masih adanya orang yang meninggal dan belum diajukan akta kematiannya sehingga data yang bersangkutan belum terhapus dari database kependuduk. (OPD Dukcapil) - Dalam Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan update kartu keluarga padahal sistem sudah digital dan melalui dokumen pdf yang sudah discan dan di upload di aplikasi siak terpusat, lalu diverifikasi dan divalidasi. Kurangnya pendekatan ke masyarakat dan digitalisasi dokumen kependudukan. (OPD Dukcapil) - Lokasi jarak kabupaten dengan desa jauh, jadi warga kesulitan mengurus dokumen

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
			kependudukan. (OPD Dukcapil) 3) perlu optimalisasi BIMTEK untuk operator SIAK kecamatan tentang update dokumen administrasi kependudukan. (OPD Dukcapil) • Terbatasnya akses data kependudukan untuk dimanfaatkan oleh OPD lain karena OPD yang bersangkutan harus memiliki MoU dengan DUKCAPIL Kabupaten untuk kemudian diusulkan akses data ke DIRJEN DUKCAPIL karena datanya dikunci oleh pusat. (OPD Dukcapil)
4	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Potensi Investasi di kabupaten Tuban cukup Besar tetapi belum terpetakan secara detail per wilayah dan per sektor. (OPD DPMPTSP)	• Belum adanya sinkronisasi data antara stakeholder dan realita di lapangan. (OPD DPMPTSP)
PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PENDAPATAN			
1	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Masih banyak pelaku usaha yang belum berizin. (OPD DPMPTSP)	• Dalam Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik: 1. Masih banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya legalitas perizinan. (OPD DPMPTSP) 2. Pelaku usaha kurang memahami manfaat perizinan. (OPD DPMPTSP) 3. kendala sistem OSS (aplikasi internet). (OPD DPMPTSP) 4. Belum optimalnya sosialisasi OSS. (OPD DPMPTSP)
2	Pariwisata	• Adanya dukungan dari kepala daerah dan penambahan biaya dalam	• Adanya peningkatan jumlah peserta secara masif dalam Pelaksanaan

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata. (OPD Disbudporapar)	event pariwisata yang melibatkan masyarakat. (OPD Disbudporapar)
3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Anggaran yang tersedia dalam pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan perangkat daerah lainnya. (OPD Diskopumdag)	Kurangnya SDM Bidang UMKM. (OPD Diskopumdag)
PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN TERHADAP LAYANAN DASAR			
1	Pendidikan	Adanya Tim BOS yang melaksanakan Review secara serentak dalam pengelolaan dana BOS. (OPD Dispendik)	Dalam pengelolaan dana BOS masih terjadi pelaporan sekolah yang terlambat dan belanja tidak sama dengan RKAS. (OPD Dispendik)
2	Kesehatan	- Ketersediaan bahan dan alat tercukupi untuk pemeriksaan papsmear dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif. (OPD Dinkes P2KB) - SDM yang memadai dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi. (OPD Dinkes P2KB) - Bahan dan alat pemeriksaan GDA tercukupi untuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus. (OPD Dinkes P2KB) - Adanya peran dari anggota TIM TPKJM dalam penanganan kasus jiwa di Kabupaten Tuban. (OPD Dinkes P2KB) - Peran masyarakat dalam penanganan ODGJ cukup baik dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA. (OPD Dinkes P2KB) - Ketersediaan alat dan bahan dalam pemeriksaan PTM sudah tercukupi. (OPD Dinkes P2KB)	- Peran masyarakat masih rendah terhadap papsmear. (OPD Dinkes P2KB) - Pergantian SDM/kader dan petugas setelah dilakukan pembinaan sehingga perlu pembinaan ulang pada kader dan petugas yang baru pada pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi. (OPD Dinkes P2KB) - Belum semua masyarakat mau dilakukan pemeriksaan gula darah. (OPD Dinkes P2KB) - Angka skrining kesehatan jiwa di Kabupaten Tuban Masih rendah. (OPD Dinkes P2KB) - Ketersediaan baju fiksasi belum mencukupi karena puskesmas hanya ada 1-2 baju fiksasi untuk pembelian baju fiksasi pasien odgj 44 buah, pertemuan keluarga ODGJ berat, sarasehan anti NAPZA dan orientasi petugas. (OPD Dinkes P2KB) - Petugas perlu refresing ulang dalam penggunaan alat dan bahan (profilipid,

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		• UHC Kabupaten Tuban tercapai 83,84% dari target 98% pada tahun 2024 dalam pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat. (OPD Dinkes P2KB) • Pendampingan bumil resti , komplikasi oleh dokter spesialis ke Puskesmas untuk tata laksana sesuai kasus dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. (OPD Dinkes P2KB) • Ketersediaan Buku KIA yang masih terbatas sehingga perlu pengadaan secara berkala. (OPD Dinkes P2KB) • Adanya evaluasi program untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. (OPD Dinkes P2KB) • Adanya pembahasan dan pembelajaran pada kasus kematian sehingga pada kasus serupa kedepannya dapat tertangani. (OPD Dinkes P2KB) • Masih adanya kasus ibu hamil KEK, balita gizi kjurang dan gizi buryk sebagai upaya pencegahan stunting. (OPD Dinkes P2KB) • Adanya partisipasi masyarakat dalam pencapaian ODF dan kesehatan lingkungan. (OPD Dinkes P2KB) • Adanya partisipasi kader aktif dalam melaksanakan tracing dan investigasi kontak pada pasien dalam Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis. (OPD Dinkes P2KB) • Adanya peran serta aktif dari pendamping sebaya dan Komunitas Odhiv (KDS) dalam melakukan tracing dan motivasi kepada ODHIV yg putus pengobatan untuk kembali	- ekg, dll). (OPD Dinkes P2KB) • Masih tingginya permohonan Surat Pernyataan Miskin, masih kurangnya anggaran untuk pemenuhan UHC 98% di tahun 2024. (OPD Dinkes P2KB) • Masih banyaknya kasus bumil resti dan komplikasi. (OPD Dinkes P2KB) • Buku KIA untuk ibu hamil baru belum tersedia bila tidak ada pengadaan secara berkala. (OPD Dinkes P2KB) • Masih adanya indikator program belum tercapai pada Evaluasi dan penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam penurunan AKI dan AKB. (OPD Dinkes P2KB) • Masih adanya kematian ibu oleh karena penyebab komplikasi obstetri maupun non obstretri. (OPD Dinkes P2KB) • Faktor ekonomi masyarakat yang tidak mampu melanjutkan stimulan jamban sehingga berfungsi dengan baik. (OPD Dinkes P2KB) • Banyaknya pasien TBC Putus pengobatan. (OPD Dinkes P2KB) • Banyaknya pasien HIV Putus pengobatan. (OPD Dinkes P2KB) • Pasien merasa sehat dan ada pasien yang putus pengobatan karena efek samping obat dan pasien takut ketahuan identitasnya sehingga tidak mau berobat. (OPD Dinkes P2KB) • Ketidakpastian status jamaah cadangan berangkat/tidak, serta perbaruan aplikasi yang masih sering terjadi gangguan. (OPD Dinkes P2KB)

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
		berobat. (OPD Dinkes P2KB) - Adanya partisipasi aktif keluarga dan kader sebagai pemantau dan pengawas minum obat. (OPD Dinkes P2KB) - Adanya peran aktif Pendamping sebaya dan mitra Mahameru dalam pelaksanaan <i>tracing</i> LFU pasien HIV. (OPD Dinkes P2KB) - Adanya peran aktif calon jamaah haji dalam melakukan pemeriksaan kesehatannya untuk terbitnya Berita Acara Istithaah yang merupakan syarat wajib berangkat haji. (OPD Dinkes P2KB)	
3	Perumahan dan Pemukiman	- Masih banyaknya rumah tidak layak huni. (OPD DPUPR) - Stunting dan akses air bersih belum 100%. (OPD DPUPR)	-
4	Ketahananpangan	Adanya Dukungan dari OPD dalam Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. (OPD DKP2P)	-
5	Keluarga Berencana	- Program BKKBN pemasangan KB IUD gratis dalam peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (BOKB). (OPD Dinkes P2KB) - Bidang Kesehatan Hewan - Dukungan dari Pemkab dan OPD dalam penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/Kota. (OPD DKP2P)	Peminat KB IUD dan MOP sangat kurang. (OPD Dinkes P2KB)
6	Infrastruktur Perhubungan	Mewujudkan Tuban <i>Smart City</i> yang aman dan nyaman terutama dalam segi transportasi. (OPD DLHP)	-

NO.	BIDANG/URUSAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
7	Kesehatan Hewan	-	Masih adanya penolakan dari masyarakat walaupun jumlahnya kecil dalam penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/Kota. (OPD DKP2P)

Sumber: DKPU ITS, 2024 (Diolah)

Selanjutnya dapat disampaikan detail RAT Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2025 per sektor/urusan sebagai berikut pada Tabel 8.

Tabel 8. Rencana Aksi Tahunan Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten Tuban Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
PENINGKATAN KAPASITAS																
1	Urusan Kesehatan				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Orientasi penggunaan aplikasi Kesehatan Catin dan pembinaan program Kespro dan KB		33 Puskesmas			Rp 7.268.000	APBD	Dinkes P2KB
									Pembinaan pelayanan kesehatan ibu		15 Puskesmas		16 Puskesmas	Rp 2.560.000	APBD	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pembinaan Program KIA & KB di Puskesmas/ Polindes	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Puskesmas	Bayi	33 Puskesmas	Rp 5.959.000	APBD	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader, PAUD/ TK/RA	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Puskesmas Jumlah Peserta 40 orang	Balita	2 Kegiatan	Rp 26.499.000	DAK Non Fisik	Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pembinaan Sekolah Sehat bagi petugas UKS Puskesmas dan Guru UKS SMA sederajat, Workshop Pencegahan Anemia pada Remaja Putri SMA sederajat "Besti Tania (Sehat Berprestasi Tanpa Anemia)", Pertemuan Sistem pelaporan program UKS dan Remaja, Pembinaan Program Remaja dan UKS ke Puskesmas, Validasi Data UKS dan Remaja	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Puskesmas, 96 SMA sederajat	Anak	131.494	Rp 20.000.000	APBD dan pajak rokok	Dinkes P2KB
									Orientasi Kader dalam rangka Pemantauan Pertumbuhan di Posyandu		33 puskesmas		66 Kader	Rp 58.397.400	APBD	Dinkes P2KB
2	Ketenagakerjaan	Pelatihan berbasis Kompetensi bagi usia kerja	Penduduk miskin usia kerja	Prosentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Usia Kerja (18 - 35 Th) Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keteerampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di PPSPDM Migas Cepu dan BLKI Tuban	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	20 Kecamatan di Kabupaten Tuban	%	22	Rp 3.054.092.280	DBHCH T	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Pekerja Rentan yang bukan penerima upah yang mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	20 Kecamatan di Kabupaten Tuban	orang	12.779	Rp 1.143.887.720	DBHCH T	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tuban
3	Sosial, P3A serta PMD		Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Pelatihan bimtek Pekerja sosial masyarakat (PSM) setahun sekali	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Representatif dari 328 desa ikut pelatihan pada waktu yang sama	orang	328	Rp 160.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
									Memberikan tali asih kepada Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dalam rentang 3 bulan sekali dalam satu tahun dan peningkatan wawasan TKSK setahun sekali	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya	20 kecamatan	orang	20	Rp 162.708.567	APBD	DINSOS, P3A PMD
									Pemberdayaan potensi kecamatan bagi PSKS (TKSK, LKS, PSM, LK3, PEKSOS, PKH)	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Keluarga	30	Rp 150.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
			Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Mendampingi sebagai konselor dan bagian hukum untuk menangani kasus sosial seperti kekerasan keluarga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Tuban	Sertifikat	30	Rp 150.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembentukan kelompok UPPKA, pembentukan kelompok PPKS, pembent ukan lansia tangguh 1 kali	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Desa Pliwetan palang, Desa tegalagung Kec. semanding, Kec. Bancar	Kelompok	15	Rp 10.000.000	APBD	Dinkes P2KB
4	Koperasi		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Prosentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kegiatan Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Tuban	SDM Koperasi			Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Koperasi dan UKM RI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
			Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Prosentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Prosentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan Fasilitas Kemitraan, Fasilitas Kelembagaan dan Usaha, serta Fasilitas Pembiayaan	Jumlah SDM Koperasi yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Kabupaten Tuban	SDM Koperasi	282	Rp 209.199.920	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
5	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan Usaha Mikro menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Tingkat Kenaikan Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%)	Program Pemberdayaan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro (%)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Mencakup kegiatan pelatihan Wirausaha Baru, Entrepreneur School, Sosialisasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT), Fasilitas Pedangan Kaki Lima dan fasilitas Klinik UMKM	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	Kabupaten Tuban	Orang	400	Rp 289.733.250	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
								Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Managerial, Pelatihan Teknologi Informasi dan Sertifikasi Kompetensi SKKNI	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro (Orang)	Kabupaten Tuban	Orang			Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Koperasi dan UKM RI	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
6	Pariwisata				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Presentase peningkatan kualitas SDM pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Fasilitas Peningkatan Kompetensi Sumber Daya	Pelatihan SDM ekonomi kreatif dengan fokus tujuan untuk	Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi	Kabupaten Tuban	orang		Rp 100.000.000	APBD	Disbudporapar

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
					dan Ekonomi Kreatif		Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dasar	Manusia Ekonomi Kreatif	pemuda dengan keterampilan di bidang digital kreatif	pengembangan kompetensi SDM ekraf						
							Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dasar	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	1. Peningkatan teknis SDM Bidang Pariwisata 2. Pendampingan dan Pembinaan Usaha Pariwisata 3. Pendampingan Pengembangan SDM Desa Wisata Margorejo 4. Pendampingan Pengembangan SDM Desa Wisata Ngino 5. Pendampingan Pengembangan SDM Desa Wisata Sukorejo	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Kabupaten Tuban	orang		Rp 270.000.000	APBD	Disbudporapar
7	Kebudayaan				Pengembangan Kesenian Tradisional	Presentase peningkatan pelaku kesenian daerah yang dikelola	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan up skill untuk SDM kesenian tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan (ditingkatkan kompetensinya)	Kabupaten Tuban	orang		Rp 175.151.170	APBD	Disbudporapar
							Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pelatihan up skill untuk SDM kesenian tradisional	Jumlah peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	Kabupaten Tuban	orang		Rp 220.363.915	APBD	Disbudporapar

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
8	Kepemudaan dan Olahraga				Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Pelatihan kewirausahaan untuk wirausaha baru dengan usia kurang dari 30 tahun	Jumlah wirausaha pemuda kabupaten/kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	Kabupaten Tuban	orang		Rp 200.000.000	APBD	Disbudporapar
9	Perpustakaan	Menumbuhkan minat baca masyarakat melalui pembangunan literasi masyarakat	Meningkatnya Gemar Membaca	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan layanan Perpustakaan rujukan tingkat Kabupaten/Kota	Pelayanan Perpustakaan secara merata melalui Pelayanan Mobil perpustakaan Keliling, Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah, Pelayanan Perpustakaan Umum di 12 Kecamatan, Pelayanan Program Kemitraan Perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	- Kabupaten Tuban, Tuban, Latsari - Kabupaten Tuban, Rengel, Rengel - Kabupaten Tuban, Jatirogo, Bader - Kabupaten Tuban, Kenduruan, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tuban, Kerek, Jarorejo - Kabupaten Tuban, Jenu, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tuban, Palang, Gesikharjo	Layanan	16	Rp 1.199.573.137	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
											- Kabupaten Tuban, Widang, Widang - Kabupaten Tuban, Tambakboyo, Kenanti - Kabupaten Tuban, Senori, Jatisari - Kabupaten Tuban, Semanding, Semanding - Kabupaten Tuban, Singgahan, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tuban, Grabagan, Grabagan					
							Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Bimbingan Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial terutama perpustakaan Desa atau Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	TH 2025 Ds. Ngino Kec Semanding Ds. Rayung Kec Senori	perpus	3	Rp 28.599.479	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pembudayaan gemar membaca dan literasi di lingkungan masyarakat pada Perpustakaan Desa dan Perpustakaan sekolah	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	LOKASI TH 2025 Wotsogo, Laju Lor, Tanggulangin, Sukorejo, Sokosari, Punggulrejo, Ngrayung, Kedungharjo, Tambakrejo, Plajan	lokus	10	Rp 23.931.150	APBD	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Ketaqwaan				TUBAN TAKWA		Bantuan syiar Islam		Pengajian dan sosialisasi zakat ke OPD		Kecamatan Semanding	orang			Dana berasal dari dana	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
															hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	
TOTAL ANGGARAN SUBKEGIATAN														Rp 7.667.923.988		
PERLINDUNGAN SOSIAL																
1	Kesehatan				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pembinaan program usia lanjut, koordinasi kegiatan usia lanjut, pengadaan buku kesehatan usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 puskesmas	Orang	133.684	Rp 100.000.000	APBD	Dinkes P2KB
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		Dokumen	2	Rp 751.515.350	APBD, DBHCHT dan DAK	Dinkes P2KB
					TUBAN SEHAT		JAMKESBAZ		Bantuan pembayaran biaya kesehatan (BPJS) bagi masyarakat miskin dengan syarat belum memiliki BPJS dan belum mendapat bantuan dari pihak manapun		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Apotik Dhuafa		Bantuan biaya penebusan obat bagi masyarakat miskin		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah,	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
															shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	
							Bantuan Alat Kesehatan		Bantuan pemberian alat kesehatan seperti kaki palsu, tangan palsu, alat bantu dengar, dan kursi roda bagi masyarakat miskin		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Bantuan Operasional Pengobatan		Bantuan biaya transportasi kesehatan bagi masyarakat miskin		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Jambanisasi		Program kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan P2KB Kabupaten Tuban untuk pembangunan jamban		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Stanting		Program kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan P2KB Kabupaten Tuban guna pemberian bantuan makanan tambahan		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
3	Sosial, P3A serta PMD		Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Indeks Ketahanan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Aktif dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan Sembako ke lembaga LKS	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Lembaga	26	Rp 180.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
						Persentase PMKS Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	pemakaman untuk lansia (1 hari ada 2 kali pemakaman selama 12 bulan)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	PKS	orang	750	Rp 5.923.411.291	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu bagi disabilitas yang membutuhkan	Jumlah Orang yang Mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Case-based	orang	25	Rp 115.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pendampingan ODGJ sampai kembali ke keluarganya	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Case-based	orang	200	Rp 37.112.500	APBD	DINSOS, P3A PMD

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Bimbingan fisik untuk ODGJ, anak jalanan, dan ex-kusta, Bansos ke semua kecamatan, dan pemberdayaan atau bimbingan motivasi (kerjasama dengan dinkes dan puskesmas) (Setiap tahun terdapat 2 kecamatan masing-masing 20 orang)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Case-based	orang	830	Rp 2.975.108.200	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Pembuatan NIK dan surat lain untuk penyandang disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Case-based	orang	150	Rp 31.620.800	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemulangan (pemberian ongkos untuk orang terlantar)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Case-based	orang	60	Rp 30.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Pemberian Layanan Kedaruratan	Sewa ambulans untuk pemakaman orang di rumah perlindungan sosial (RPS) atau RS	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	case-based	orang	50	Rp 10.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Perjalanan dinas ke dalam atau luar kota untuk menelusuri dan menjemput keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	case-based	orang	50	Rp 14.885.600	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Pemberian Layanan Rujukan	ODGJ dan disabilitas dirujuk ke RSJ menur dan ikut pelatihan di UPT	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	case-based	orang	150	Rp 41.509.250	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Setiap bulan jumpa sahabat (Jumat Pagi untuk disabilitas bahagia, berdaya, dan sehat), senam, pemeriksaan kesehatan, fisioterapi dan penambahan gizi.	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Di pusat Kabupaten	orang	250	Rp 138.146.500	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Penyediaan Sandang	Menyediakan pakaian untuk PPKS	Jumlah orang yang mendapatkan Penyediaan Sandang sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Di pusat Kabupaten	orang	150	Rp 34.200.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
							Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pelatihan pemberdayaan ex tuna sosial (membuat usaha makanan)	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Gesing, Kecamatan Semanding (Ex lokalisasi)	orang	20	Rp 53.989.600	APBD	DINSOS, P3A PMD

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
							di Luar Panti Sosial									
								Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Perayaan hari disabilitas internasional, mengumpulkan seluruh disabilitas di Kabupaten Tuban di GOR dengan kegiatan senam, donor darah, penampilan seni, pemeriksaan kesehatan, dan pemberian simbolis alat bantu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Di pusat Kabupaten	Dokumen	1.000	Rp 80.418.800	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Mengisi stok obat-obatan untuk operasional (P3K) di Rumah Perlindungan Sosial (RPS)	Jumlah Orang yang mendapatkan layanan perbekalan kesehatan diluar panti	RPS	Orang	50	Rp 5.720.650	APBD	DINSOS, P3A PMD
					Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	membuka dapur umum, hanya jika ada bencana (tanggap bencana) (dengan makanan yang ada saja)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu kabupaten Tuban	orang	35.000	Rp 30.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
						bencana daerah Kabupaten / Kota										
4	Sosial				TUBAN PEDULI		Zakat Fitrah		Penyaluran Zakat Fitrah kepada masyarakat miskin		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Biaya Hidup Fakir		Penyaluran bantuan kepada: 1. Fakir yang sudah tidak bisa apa-apa dengan pemberian makanan 2. Fakir yang memiliki pendapatan rendah kali sehari pemberian uang tunai (data fakir miskin didapatkan dari desa)		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Bantuan Pembayaran Hutang		Bantuan pelunasan hutang masyarakat miskin dengan syarat tertentu		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
															zakat donatur	
							Bantuan Ibnu Sabil		Bantuan biaya kepada Ibnu Sabil (orang yang kehabisan bekal sedang melakukan perjalanan)		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Santunan Mustahik Insidental		Penyaluran bantuan santunan BAZNAS berupa uang tunai yang digunakan untuk kegiatan tertentu milik OPD		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
5	Urusan KB				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga yang terpapar binaan				%				Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
6	Trantibumlinmas		Tingkat Penurunan Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Persentase Pelanggaran Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kegiatan rutin on Call Pemantauan Pembinaan terhadap Trantibum Selama 24 jam ; Patroli Gabungan ; kegiatan Pengamanan Gabungan PHBN, Hari Jadi Tuban dan Pejabat Negara Lainnya ; Pengamanan Kegiatann Bupati di Luar Wilayah Kecamatan Kota ; Kegiatan Pengamanan Gabungan Posko Lebaran ; Kegiatan Pengamanan Gabungan Posko Nataru	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kabupaten Tuban (berdasarkan Monitoring, Hasil Koordinasi dan Aduan Masyarakat)	Kasus	113	Rp 3.506.654.840	DAU	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban
								2. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Operasi Gabungan pengendalian Secara Terpadu ; Pengamanan Gabungan Kegiatan Demonstrasi / Unjuk Rasa ; Penertiban Antar Wilayah di Kecamatan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan Penindakan	Kabupaten Tuban (berdasarkan Monitoring, Hasil Koordinasi dan Aduan Masyarakat)	Kasus	151	Rp 292.850.800	DAU	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah	
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran			
						2. Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup (Sosialisasi Tatap Muka , Sosialisasi Melalui Media, Even Pagelaran Wayang Kulit dan Gempur Rokok Ilegal, Sosialisasi Tibumtranmas)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada	Kabupaten Tuban	Laporan	12	Rp 1.288.839.030	DAU + DBHCH T	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban	
								2. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Tuban	Laporan	12	Rp 64.948.520	DAU	Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban	
7	Ketaqwaan				TUBAN TAKWA		Program Bina Muallaf		Pembinaan dan pendampingan secara rutin kepada para pejuang muallaf sesuai dengan tuntunan syariat Islam		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban	
							Kelas Pembinaan Islam				Kabupaten Tuban	orang				Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
							Bantuan Dai/Marbot		Penyaluran bantuan rutin setiap bulan untuk Dai/Marbot dalam bentuk uang tunai sebesar RP 500.000,00		Semanding (mengajukan)	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Paket Ifthar Ramadhan		Pemberian paket buka puasa dengan target 500 kotak/hari		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Bantuan Guru Ngaji		Pemberian bantuan uang tunai sebesar Rp 200.000,00 per bulan kepada guru ngaji yang belum dibawah oleh pemerintah daerah		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
TOTAL ANGGARAN SUBKEGIATAN														Rp 15.705.931.731		
PENDATAAN																
1	Pendidikan				Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Dalam Pendidikan Menengah										Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam										Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembia- yaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
						Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)										
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Dalam Pendidikan Dasar										Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
						Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Pendidikan Kesetaraan										Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
2	Urusan Kesehatan	Meningkatkan Derajat Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup								Angka	75,25			Dinkes P2KB
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat						%	27			Dinkes P2KB
						Persentase Desa ODF						%	80			Dinkes P2KB
						Persentase FASYANKES Terakreditasi						%	75,6			Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
						Angka Kematian Ibu (AKI)						/100.000 KH	173,53/ 100.000 KH (26 JIWA)			Dinkes P2KB
						Angka Kematian Bayi (AKB)						/1000 KH	6,67/ 1000 KH (100 JIWA)			Dinkes P2KB
						Persentase Balita Stunting						%	12			Dinkes P2KB
							Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelengkapan Alkes sesuai standar				%	62			Dinkes P2KB
3	Sosial, P3A serta PMD				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pmks Yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Melakukan pendataan fakir miskin setiap bulan sebelum tanggal 12. Jadi ada usulan dari kecamatan dan akan dievaluasi apakah termasuk fakir miskin atau tidak	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Satu kabupaten Tuban	Orang	642.372	Rp 226.565.450	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi pendampingan sosial dan peningkatan kapasitas dan sinergisitas pilar sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Satu kabupaten Tuban	Keluarga	142.774	Rp 2.099.069.496	APBD	DINSOS, P3A PMD

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pemberian bansos DBHCHT (Bansos uang) dan bansos BBNTD (Beras)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Satu kabupaten Tuban	Keluarga	6.600	Rp 8.472.270.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan pengembangan usaha berupa barang alat usaha untuk orang yang mau mendirikan usaha (khusus DTKS yang diusulkan membangun usaha)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan dilakukan di 1 kecamatan (belum dipilih)	orang	40	Rp 400.000.000	APBD	DINSOS, P3A PMD
4	Urusan KB				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)						%				Dinkes P2KB
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)							21			Dinkes P2KB
5	Komunikasi dan Informatika	Perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi data kemiskinan	Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika serta Layanan Publik	Terintegrasi nya Sistem Informasi di OPD	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan sistem informasi data kemiskinan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kec. Tuban / Kel. Sidorejo / Kab Tuban	Sistem informasi	4	Rp 870.000.000	APBD	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda Penanaman Modal	Meningkatnya realisasi Investasi	1. Persentase peningkatan realisasi PMA 2. Persentase Peningkatan realisasi PMDN	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan potensi Investasi yang terdapat di Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20 Kecamatan	Dokumen	2	Rp 292.350.000	APBD	DPMPSTP
7	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Indeks Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program pendaftaran penduduk	1) Perekaman KTP Elektronik (%) 2) Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA (%)	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan melalui program Cedak Mas meliputi perekaman, penerbitan KTP-el, KIA Akta Kelahiran dan Akta Kematian, SKPWNI, selain itu juga dilaksanakan program "KTP in school", "Sayang Difabel, Lansia, dan ODGJ" dan "Jemput Bola Saang Anak". Kegiatan perekaman dan pelayanan Adminduk juga dilakukan di Mobil pelayanan keliling.	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan/ Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil, MPP, 19 Kecamatan	Dokumen	270.000	Rp 1.401.696.920	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1) Persentase pengelolaan jaringan SIAK dalam kondisi baik (%)	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga koneksi data SIAK ke server menjadi baik, Support jaringan dan peralatan Cedak Mas. Kegiatan ini juga untuk menunjang kelancaran layanan program Cedak Mas, "KTP in School", "Sayang difabel, Lansia, dan ODGJ", "Jemput Bola Sayang anak".	Jumlah kecamatan yang terkoneksi jaringan SIAK /Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	20 Kecamatan	Kecamatan	20	Rp 510.000.000	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2) Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kegiatan ini dilaksanakan atas perintah dari Dirjen Dukcapil terkait pemanfaatan data kependudukan karena semua data kependudukan menggunakan Data SIAK terpusat jadi apabila ada lembaga-lembaga/ OPD yang ingin memanfaatkan data kependudukan harus melakukan kerjasama	Jumlah Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan yang dilaksanakan/ Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Dukcapil dengan OPD/ lembaga-lembaga di Kabupaten Tuban	OPD	8	Rp 106.083.150	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									dengan Dinas Dukcapil.							
TOTAL ANGGARAN SUBKEGIATAN														Rp 14.378.035.016		
PEMBERDAYAAN/PENINGKATAN PENDAPATAN																
1	Ketenagakerjaan				TUBAN BERDAYA		Bantuan Modal Usaha		Pemberian bantuan modal usaha baik uang tunai dan peralatan usaha		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
					TUBAN BERDAYA		Pelatihan dan Pemberdayaan Umat		Penyaluran bantuan usaha fried chicken dengan fasilitas lengkap serta pemberian pelatihan skill sebelum menjalankan usaha		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
					TUBAN BERDAYA		Program Zakat Mart		Pemberdayaan ekonomi melalui pengembangan warung atau toko skala mikro sampai kecil		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
2	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan Usaha Mikro menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Tingkat Kenaikan Usaha Mikro yang meningkat menjadi wirausaha (%)	Program Pemberdayaan UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro (%)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kegiatan fasilitasi kemudahan perijinan Halal dan Sosialisasi perijinan BPOM	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	Kabupaten Tuban	Unit Usaha	50	Rp 70.000.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
							Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kegiatan fasilitasi usaha disabilitas (cafe inklusi), Fasilitasi pemasaran melalui pameran tingkat kabupaten dan provinsi.	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	Kabupaten Tuban	Unit Usaha	150	Rp 700.000.000	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
							Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kegiatan fasilitasi kemitraan usaha mikro dengan pihak ketiga (toko modern) dan pelatihan pemasaran online untuk UMKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan	Kabupaten Tuban	Unit Usaha	70	Rp65,000,000	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
							n dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kemudahan Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha yang berizin	Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan Telah Sesuai Ketentuan Teknis dan SOP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 3. Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Pemberian Ijin Trayek Kepada Orang Pribadi (%) 4. Persentase Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilayani Secara Elektronik	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jemput Bola Pelayanan Perizinan di 20 Kecamatan dan Pekan Pelayanan Perizinan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	20 Kecamatan	Pelaku Usaha	450	Rp 633.613.000	APBD	DPMPSTP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
4	Pariwisata				Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Presentase peningkatan kualitas SDM pariwisata	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dasar	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pelaksanaan event pariwisata yang melibatkan masyarakat : 1. Tuban tourism & Economy Creative Festival 2. Wisata Pulang Kampung 3. Teras kreasi ekonomi kreatif dan inovasi 4. Tuban specta night 5. Pembinaan pelaku pariwisata 6. Festival ekonomi kreatif (fashion & food)	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Kabupaten Tuban	orang		Rp 381.010.050	APBD	Disbudporapar
5	Sosial				TUBAN PEDULI		Paket Kurban		Penerimaan pembelian dan pemotongan hewan kurban. Program ini terhubung dengan dengan kelompok ternak dari program ZCD		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
					TUBAN BERDAYA		ZCD		Pemberdayaan kelompok masyarakat melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif dengan pemberdayaan kelompok ternak dan kelompok mebel		Kecamatan Merakurak dan Kecamatan Tuban	Kelompok			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kab. Tuban
TOTAL ANGGARAN SUBKEGIATAN														Rp 1.849.623.050		
PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN TERHADAP LAYANAN DASAR																
1	Pendidikan				Program Pengelolaan Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Jumlah SD Negeri Terakreditasi		Satuan Pendidikan				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun		RKB				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		Ruang	1	Rp 223.522.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Ruang	12 RUANG	Rp 1.726.656.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		Ruang	5 RUANG	Rp 1.264.577.485		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Paket		Rp 1.000.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang	100 RUANG	Rp 12.510.867.486		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang	4 RUANG	Rp 604.980.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/ Berat		Unit		Rp 819.967.485		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia		Paket	1 PAKET	Rp 2.433.500.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		Paket	1.000 PESERTA DIDIK	Rp 500.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Paket	1	Rp 2.507.500.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		Satuan Pendidikan	567	Rp 63.570.570.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		Ruang	19	Rp 4.106.318.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
1	Pendidikan				Program Pengelolaan Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Jumlah SMP Negeri Terakreditasi		Satuan Pendidikan				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun		Ruang	1	Rp 500.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		Ruang				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		Ruang				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Unit		Rp 4.450.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang		Rp 5.400.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Ruang		Rp 900.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Unit		Rp 967.502.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia						Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia		Paket	600	Rp 300.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		Paket				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		Satuan Pendidikan an	100	Rp 35.983.780.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Satuan Pendidikan an				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun						Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		Unit		Rp 4.387.771.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia		Paket		Rp 200.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		Paket		Rp 200.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		Peserta Didik		Rp 398.680.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		Orang		Rp 2.257.539.800		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		Satuan Pendidikan		Rp 25.384.220.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan Terakreditasi (negeri dan swasta)		Lembaga				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia		Paket				Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Satuan Pendidikan		Rp 119.997.700		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Satuan Pendidikan		Rp 5.707.950.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
								Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				Rp 900.000.000		Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
					TUBAN CERDAS		Beasiswa SD/Mi		Bantuan kebutuhan personal (seragam, sepatu, alat sekolah)		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
							Beasiswa SMP/MTS		Bantuan kebutuhan personal (seragam, sepatu, alat sekolah)		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana)		Bantuan beasiswa UKT semester 5-8 untuk mahasiswa yang berkuliah di Kabupaten Tuban dengan syarat belum ada di keluarga itu yang berkuliah sama sekali sebelumnya dan bersedia menjadi relawan di BAZNAS		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Bantuan Biaya Pendidikan		Penyelesaian administrasi seluruh jenjang pendidikan		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Rumah Cerdas		Pemberian penguatan materi sekolah bagi siswa sekolah yang miskin. Kegiatan dilakukan oleh relawan BAZNAS yang berasal dari program		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Beasiswa SKSS							
2	Kesehatan				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya	Pengembangan gedung IFK	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	IFK Kabupaten Tuban	Unit			APBD	Dinkes P2KB
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi Puskesmas Jatirogo (tanggul penahan tanah)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kec. Jatirogo Puskesmas Jatirogo	Unit			APBD	Dinkes P2KB
								Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				Persen	100			Dinkes P2KB
								Persentase Puskesmas terakreditasi minimal utama				Persen	48			Dinkes P2KB
								Persentase KK Akses Jamban Sehat				Persen	93			Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pemeriksaan Papsmear (Rp. 208.065.000 dengan target 1650 PUS)	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 Puskesmas	Orang	769.346	Rp 31.700.000	APBD	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pembinaan Petugas dan Kader PTM	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33 org/Puskesmas	Orang	309.107	Rp 35.000.000	APBD	Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Posbindu PTM 10 Kali dan pengadaan stik GDA (9136 bok)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10 OPD Kec. Tuban dan 33 Puskesmas	Orang	16.421	Rp 12.670.687.000	DAK NF dan APBD	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jambore Keswa dan kunjungan pasien ODGJ berat 4 kl dan pertemuan TPKJM	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kabupaten Tuban	Orang	2.632	Rp 10.000.000	APBD	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pembelian Baju Fiksasi pasien ODGJ 44 buah, Pertemuan keluarga ODGJ berat, sarasehan anti napza dan orientasi petugas	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	33 Puskesmas	Orang	33	Rp 10.000.000	DAK NF dan APBD	Dinkes P2KB
								Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pengadaan BMHP (Profilipit, BMHP EKG, reagen profilipid, reagen pemeriksaan IVA), pemeriksaan SHK 74.223 bayi (1.113.350.000), Koordinasi dan evaluasi p2pm	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	33 Puskesmas	Dokumen	33	Rp 241.506.500	DAK NF	Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Pembayaran luran PBPB BP Pemd dan Bantuan luran Mandiri kelas 3 - Retribusi karcis gratis puskesmas - verifikasi dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan bagi pemohon Surat Pernyataan Miskin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tuban	Dokumen	23	Rp 38.701.700.800	APBD Pajak Rokok DBHCH T	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	-Sekrening dan konsultasi Bumil Resti Dalam ANC Terpadu di Pusk	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6 Puskesmas	Orang	6 Puskesmas	Rp 72.597.000	APBD	Dinkes P2KB
									Belanja cetak Buku KIA untuk 33 Pusk		Kabupaten Tuban		1 kegiatan	Rp 409.150.000	APBD	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-Evaluasi dan penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam penurunan AKI dan AKB	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Tuban	Orang	1 kali	Rp 7.165.000	APBD	Dinkes P2KB
									Pembahasan kasus kesakitan , kematian ibu dalam rangka penurunan AKI		Kabupaten Tuban	Kegiatan			APBD	Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Pengadaan PMT Ibu Hamil KEK, Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk		328 desa		175 ibu hamil, 100 balita gizi kurang, dan 100 balita gizi buruk	Rp 666.325.750	APBD	Dinkes P2KB
									Pertemuan Perencanaan Program Gizi, Pertemuan Validasi Data Gizi, Pertemuan Rakor PMT, Pertemuan Programer gizi, UKS dan Remaja		33 puskesmas, Dinkes		33 Puskesmas, kader dan TP PKK	Rp 21.865.000	APBD	Dinkes P2KB
									Pemeriksaan SHK pada Bayi		328 desa				DBHCH T	Dinkes P2KB
									Pertemuan intervensi spesifik stunting		33 puskesmas				DAK	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Stimulan jamban (1000 KK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	58 Desa	Dokumen	5	Rp 10.000.000	pajak rokok	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pemeriksaan Skrining dan Investigasi kontak 2742 Pasien	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Puskesmas	Orang	12.631	Rp 50.000.000	PABD, DAK NF, Pajak Rokok	Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pertemuan Odhiv 1 kl, kegiatan Mobile VCT pada Populasi kunci	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Puskesmas	Orang	19.439	Rp 40.000.000	Pajak rokok	Dinkes P2KB
								Pengelolaan pelayanan kesehatan dengan orang dengan tuberculosis	Pemeriksaan tracing pasien LFU (Lost to Follow Up) TBC dan pengawasan minum obat	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	33 Puskesmas	Orang	2.339	Rp 10.000.000	Pajak rokok	Dinkes P2KB
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV(ODHIV)	Pemeriksaan tracing pasien LFU (Lost to Follow Up) HIV 298 orang dan pendampingan pengobatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33 Puskesmas	Orang	160	Rp 10.000.000	Pajak rokok	Dinkes P2KB
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pemeriksaan Kesehatan calon jamaah haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33 puskesmas	Dokumen	66 orang	Rp 67.474.900	APBD, DAK NF	Dinkes P2KB
					TUBAN SEHAT		Biaya berobat		Bantuan pembayaran biaya perawatan kesehatan (misalnya,		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									rawat inap rumah sakit)						zakat donatur	
3	Perumahan dan Pemukiman				Program Kawasan Permukiman	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan RTLH Kec. Montong	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Montong	unit			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Kec. Semanding Paket 1	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Semanding, Desa Penambangan	unit	10	Rp 525.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Kec. Semanding Paket 2	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Semanding, Desa Penambangan	unit	10	Rp 525.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Kec. Semanding Paket 3	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Semanding	unit	10	Rp 525.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Kec. Singgahan	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Desa Tinggir, Singgahan	unit			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Kec. Widang	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Widang	unit	10	Rp 525.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Kec. Rengel	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Desa Campurejo, Rengel	unit			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Kec. Soko	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Desa Sokosari, Soko	unit			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Pada Kawasan Perdesaan Kec. Kerek	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Kerek	unit	10	Rp 525.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Pembangunan RTLH Pada Kawasan Perdesaan Kec. Bancar	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Bancar	unit	10	Rp 525.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan RTLH Pada Kawasan Perdesaan Kec. Plumpang	jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Plumpang	unit	10	Rp 525.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	jumlah rumah layak huni yang dibangun	Rengel, Plumpang, Bancar, Tuban	unit			DAK	Dinas PUPR, PRKP
					TUBAN PEDULI		Bantuan Rehabilitasi Rumah Dhuafa		program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan syarat rumah berada di atas tanah kepemilikan sendiri dengan biaya bantuan maksimal sebesar Rp 20.000.000,00		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban
							Bantuan Kebencanaan		Program kerjasama dengan Desa dan BPBD untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni akibat bencana alam dengan syarat rumah berada di atas tanah kepemilikan sendiri		Kabupaten Tuban	orang			Dana berasal dari dana hibah, shodaqoh, infaq, dan zakat donatur	BAZNAS Kabupaten Tuban

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
4	Pembangunan Desa		Meningkatnya kemampuan prasarana fisik dan perekonomian desa	Layanan Dasar	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kepohagung Kecamatan Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Kepohagung Kec Rengel	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sokogunung Kecamatan Kenduruan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sokogunung Kec Kenduruan	KK		Rp 800.000.000	DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tingkis Kecamatan Singgahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Tingkis Kec Singgahan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tanggir Kecamatan Singgahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Tanggir Kec Singgahan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bendolateng Kecamatan Kenduruan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Bendolateng Kec Kenduruan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kedungsoko Kecamatan Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Kedungsoko Kec Plumpang	KK		Rp 1.000.000.000	DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Air Bersih Desa Sumberejo Kec. Rengel	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sumberejo Kec Rengel	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Campurejo Kecamatan Rengel	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Campurejo Kec Rengel	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sumberagung Kecamatan Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sumberagung Kec Plumpang	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Katerban Kecamatan Senori	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Katerban Kec Senori	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bangunrejo Kecamatan Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Bangunrejo Kec Soko	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sumurjalak Kecamatan Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sumurjalak Kec Plumpang	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Pembuatan Sumur Uji Desa Pacing, Kecamatan Parengan	Jumlah sumur uji	Desa Pacing Kec Parengan	Unit			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Tlogonongko, Desa Jadi, Kecamatan Semanding	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Jadi Kec Semanding	KK			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Peripaan Air Bersih Desa Penambangan, Kecamatan Semanding	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Penambangan Kec Semanding	KK			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sumberarum Kec Kerek	KK			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Kanorejo Kec Rengel	KK			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Kendalrejo, Kecamatan Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Kendalrejo Kec Soko	KK			APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Binangun Kec. Singgahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Binangun Kec Singgahan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gemulung Kec. Kerek	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Gemulung Kec Kerek	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Grabagan Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Grabagan Kec Grabagan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jlodro Kec. Kenduruan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Jlodro Kec Kenduruan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kebonagung Kec. Rengel	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Kebonagung Kec Rengel	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pacing Kec. Parengan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Pacing Kec Parengan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Trantang Kec. Kerek	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Trantang Kec Kerek	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jamprong Kec. Kenduruan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Jamprong Kec Kenduruan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngampelrejo Kec. Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Ngampelrejo Kec Bancar	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Parangbatu Kec. Parengan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Parangbatu Kec Parengan	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sembung Kec. Parengan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sembung Kec Parengan	KK		Rp 1.000.000.000	DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sidonganti Kec. Kerek	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sidonganti Kec. Kerek	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sumberejo Kec. Widang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Desa Sumberejo Kec Widang	KK			DAK	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Laju Kidul Kec. Singgahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Singgahan			Rp 500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Cokrowati Kec. Tambakboyo	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Tambakboyo			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngulahan Kec. Tambakboyo	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Tambakboyo			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tawaran Kec. Kenduruan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Kenduruan			Rp 700.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pakis Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Grabagan			Rp 750.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Prambontergayang Kec. Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	prambontergayang			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Nguruhan Kec. Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	soko			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jati Kec. Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	soko			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sokosari Kec. Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	soko			Rp 600.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Banyubang Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Grabagan			Rp 500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sidorejo Kec. Kenduruan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	kenduruan			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kedungrojo Kec. Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	plumpang			Rp 500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manjung Kec. Montong	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	montong			Rp 400.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wangluwetan Kec. Senori	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	senori			Rp 500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mentoro Kec. Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	soko			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Socorejo Kec. Singgahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	singgahan			Rp 500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Minohorejo Kec.Widang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	widang			Rp 400.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jadi Kec.Semanding	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	semading			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sambongrejo Kec. Semanding	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	semading			Rp 1.800.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Brangkal Kec.Parengan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	parengan			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kumpulrejo Kec.Parengan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	parengan			Rp 600.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kemlaten Kec.Parengan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	parengan			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Selogabus Kec.Parengan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	parengan			Rp 600.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bektiharjo Kec. Semanding	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	semading			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Waleran Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Grabagan			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Medalem Kec. Senori	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	senori			Rp 800.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sadang Kec. Jatirogo	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Jatirogo			Rp 500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sokogrenjeng Kec.Kenduruan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Kenduruan			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gadon Kec.Tambakboyo	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Tambakboyo			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jatisari Kec.Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sumurgung Kec. Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Siding Kec. Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tengger Kulon Kec. Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tergambang Kec. Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mojoagung Kec. Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	soko			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Besowo Kec. Soko	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	soko			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Maibit Kec. Rengel	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Rengel			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tunggulrejo Kec. Singgahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Singgahan			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tanjungrejo Kec. Singgahan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Singgahan			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bandungrejo Kec. Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	plumpang			Rp 1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kebomlati Kec. Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	plumpang			Rp 2.100.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sidomulyo Kec. Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 1.800.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tanggulangin Kec. Montong	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	montong			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngrayung Kec. Plumpang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	plumpang			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pugoh Kec.Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pucangan Kec.Palang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Palang			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kamgrejo Kec.Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sumberan Kec.Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Margosuko Kec.Bancar	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Bancar			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangtinoto Kec.Rengel	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Rengel			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Mrutuk Kec.Widang	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	widang			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa mliwang Kec. Kerek	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Kerek			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karanglo Kec. Kerek	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Kerek			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tahulu Kec. Merakurak	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Merakurak			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Prunggahan Kulon Kec. Semanding	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	semading			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gesing Kec. Semanding	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	semading			Rp 2.500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngandong Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Grabagan			Rp 1.000.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Dahor Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Grabagan			Rp 200.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP

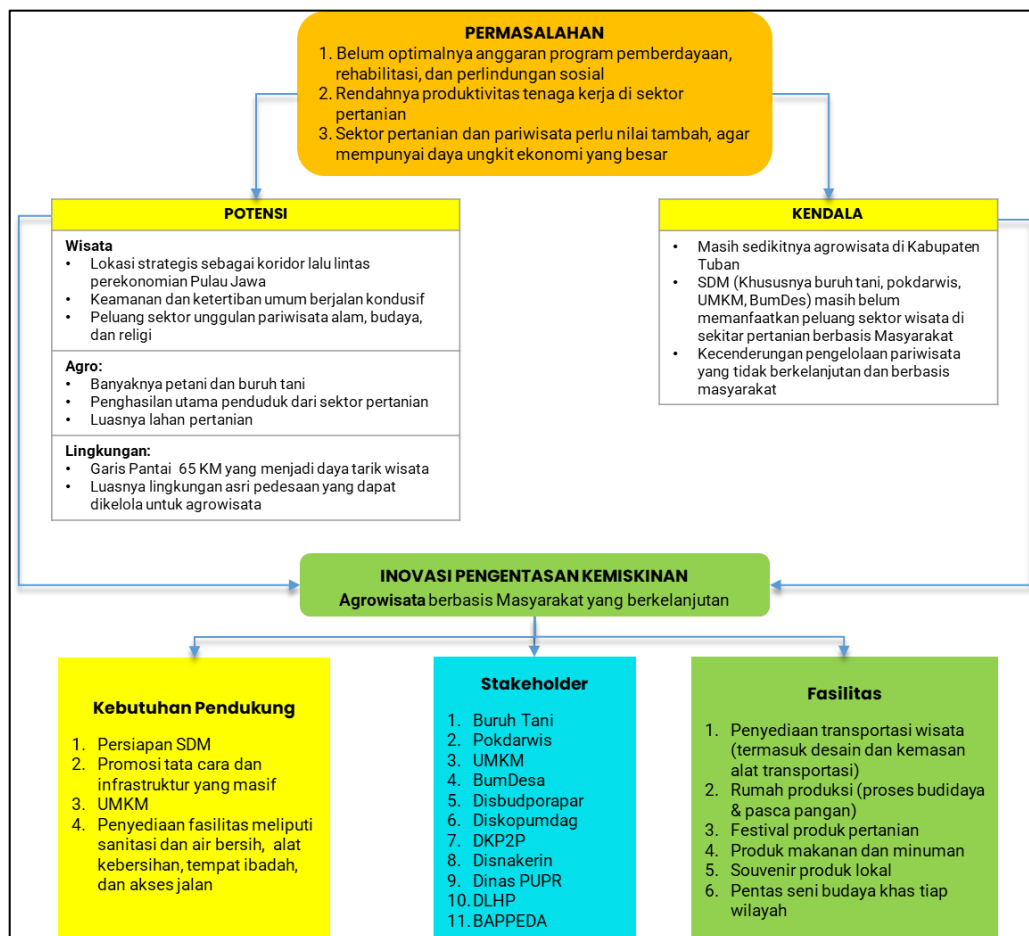
No	Urusan Pemerintah/Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gesikan Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Grabagan			Rp 1.500.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
									Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngarum Kec. Grabagan	Jumlah rumah tangga yang terlayani akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Grabagan			Rp 400.000.000	APBD	Dinas PUPR, PRKP
5	Ketahanan pangan	Meningkatkan penyediaan pangan keluarga	Kelompok Tani	Kelompok penerima bantuan	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Bantuan berupa bibit sayur dan benih ikan pada keluarga beresiko stunting	Jumlah keluarga beresiko stunting yang menerima bantuan	156 Desa di Seluruh Kecamatan Kabupaten Tuban	TP. PKK	5	Rp 250.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban
		Meningkatkan status ketahanan pangan pada desa rawan pangan	Desa rawan pangan	Jumlah desa rawan pangan yang tertangani	2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Gerakan Pangan Murah di daerah rawan pangan	Jumlah daerah rawan pangan untuk pelaksanaan Gerakan Pangan Murah	3 Desa rawan pangan	Desa			APBD	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban
6	Urusan KB				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang melayani KB MKJP				%	100			Dinkes P2KB

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (BOKB)	Pemasangan IUD 400 akseptor, Implan 4981 org, mop 5 org, mow 130 org,	Jumlah orang yang mengikuti kepersewaan penggunaan etode kontasepsi jangka panjang (MKJP)	20 Kec	Orang	6.000		DAK BOKB	Dinkes P2KB
7	Bidang Kesehatan Hewan	Meningkatkan Status Kesehatan Ternak menuju Masyarakat Sejahtera	Masyarakat Peternak dan Ternaknya	Jumlah Wilayah yang Memerlukan Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu	Jumlah Wilayah/Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Kecamatan (Masing-masing 2 Desa)	Wilayah	40	Rp 400.000.000	APBD Kabupaten Tuban	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban
8	Perdagangan		Meningkatnya keluarga miskin yang terbantu	Prosentase jenis bahan kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali harga dan stoknya	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perkembangan Rata-rata Harga Komoditas Bahan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan Subsidi Paket Sembako	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Tuban	paket	paket	Rp 305.000.271	APBD	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

No	Urusan Pemerintah/ Bidang	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi Prioritas (Kec./ Kel./ Desa)	Tahun 2025			Sumber Pembiayaan	Perangkat Daerah
												Satuan	Target Kinerja	Target Anggaran		
9	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan Yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Tuban Untuk Mendukung One Village One Product (OVOP) dan Pembangunan di Wilayah Kab/Kota	Rasio Konektivitas Kab/Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota (Ratio/Ruas Jalan)	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan penyediaan angkutan umum, jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota	Prosentase angkutan umum yang layak jalan / Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kegiatan penyediaan angkutan umum, jasa angkutan orang, dan/atau barang i masing masing kecamatan untuk memudahkan transportasi antar daerah/kecamatan dalam 1 (satu) kab/kota.	Persentase angkutan umum yang layak jalan/jumlah armada angkutan umum, jasa angkutan orang , dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang tersedia	Seluruh wilayah Kabupaten Tuban	Unit	10		APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
10		Rasio Jalan dengan standar APJ Lengkap	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Ratio kecelakaan transportasi publik	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	Prosentase APJ yang tercukupi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kegiatan penyediaan kelengkapan APJ untuk kelancaran transportasi yang dilakukan secara menyeluruh di setiap wilayah/kecamatan di Kabupaten Tuban seperti Traffic light, rambu-rambu, dan lainnya	Presentase APJ yang tercukupi dalam 1(satu) daerah kab/kota yang tersedia	Seluruh wilayah Kabupaten Tuban	Unit			APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
TOTAL ANGGARAN SUBKEGIATAN														Rp 278.940.317.277		
TOTAL ANGGARAN SUBKEGIATAN RAT PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN KAB. TUBAN TAHUN 2025														Rp 318.541.831.062		

REKOMENDASI

Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Tuban pada tahun 2025, langkah-langkah inovatif perlu diterapkan bersamaan dengan Nomenklatur yang telah ditetapkan. Inovasi yang perlu dilakukan untuk memberikan daya ungkit yang tinggi dalam penurunan angka kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2025 adalah melalui strategi: **(1) pengembangan Kawasan Kampung Agrowisata; (2) program “Petani Muda”;** dan **(3) *marketing* untuk produk ikonik Tuban.**



Gambar 60. Diagram Alir Inovasi Strategi Penurunan Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2025 Melalui Agrowisata.

Kabupaten Tuban memiliki beberapa potensi wisata untuk pengembangan Kawasan Agrowisata diantaranya lokasi strategis sebagai koridor lalu lintas perekonomian Pulau Jawa, keamanan dan ketertiban umum berjalan kondusif, serta peluang sektor unggulan pariwisata alam, budaya, dan religi yang berguna untuk pengembangan kawasan agrowisata. Pada potensi lingkungan Kabupaten Tuban memiliki kawasan pesisir dengan garis pantai sejauh 65 Km, dan luasnya lingkungan asri pedesaan yang dapat dijadikan sebagai daya tarik agrowisata. Di samping itu, potensi pertanian Kabupaten Tuban yang dapat dimanfaatkan antara lain banyaknya jumlah petani dan tenaga kerja pertanian

terutama petani millenial yang menggunakan teknologi, pendapatan utama penduduk dari sektor pertanian, dan lahan pertanian yang luas.

Guna mewujudkan adanya Kawasan Kampung Agrowisata diperlukan *enabling environment* sebagai berikut.

1. Kebijakan/regulasi mengenai pariwisata, pertanian, tata ruang, dan pengentasan kemiskinan;
2. Dukungan dan komitmen masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan agrowisata.

Berdasarkan Gambar 60 *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan Kawasan Kampung Agrowisata diantaranya buruh tani, pokdarwis, UMKM, BumDesa, Disbudporapar, Diskopumdag, DKP2P, Disnakerin, Dinas PUPR, DLHP, dan BAPPEDA. Fasilitas yang ada pada kawasan ini antara lain penyediaan transportasi wisata (termasuk desain dan kemasan alat transportasi), rumah produksi (proses budidaya & pasca pangan), festival produk pertanian, produk makanan dan minuman, souvenir produk lokal, dan pentas seni budaya khas tiap wilayah. Sedangkan pendukung lainnya yang perlu disiapkan antara lain penyiapan SDM, promosi yang masif (cara dan infrastruktur), penyediaan fasilitas pendukung meliputi: sanitasi & air bersih, kebersihan, tempat ibadah, akses jalan.

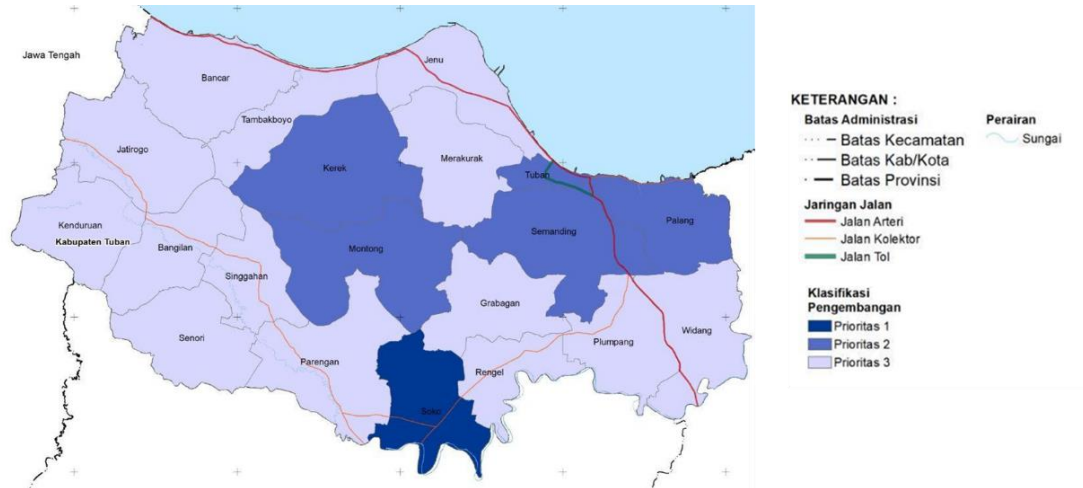
Program “Petani Muda” adalah program pengembangan wirausaha tani yang melibatkan petani-petani muda di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta korporasi/para pemangku kepentingan lain agar terciptanya ekosistem pertanian yang mandiri, maju dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilakukan pada program “Petani Muda” diantaranya yaitu Pelatihan Petani dengan Lahan Terbatas, Pelatihan Pra-Kerja pertanian kepada siswa SMP dan SMA (Kegiatan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan jenjang SMP dan SMA (muatan lokal)), Program Beasiswa Pengabdian Tuban (Jurusan Pertanian), Duta Petani Muda untuk sharing terkait pengalaman sukses *story* petani. Sementara, tujuan dilakukannya program “Petani Muda” adalah:

1. Sebagai salah satu upaya pemulihan perekonomian masyarakat di bidang pertanian.
2. Menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan di bidang usaha pertanian di kalangan generasi muda (milenial).
3. Meningkatkan produksi pangan, hortikultura dan peternakan.
4. Upaya menanggulangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja.
5. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan budidaya pertanian di Tuban.

Strategi *marketing* dan *branding* produk ikonik Kabupaten Tuban dilakukan untuk memasarkan produk ikon Kabupaten Tuban yaitu buah siwalan dan hewan rajungan secara lebih luas dan meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Tuban. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan *branding* untuk produk makanan ikonik, *marketing* dengan meng-*endorse influencer*, kerjasama antara OPD dengan pegiat media sosial untuk meningkatkan *exposure* pariwisata Tuban. Selain itu, juga dilakukan pengoptimalisasi rumah kemasan dengan penguatan kelembagaan, manajemen operasional, strategi bisnis rumah kemasan, dan sosialisasi program rumah kemasan pada pegiat UMKM Kabupaten Tuban. *Stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan strategi tersebut adalah Disbudporapar, Diskopumdag, Disnakerin, Diskominfo, dan Bappeda-Litbang.

Berdasarkan data sebaran jumlah penduduk miskin ekstrem, sebaran tenaga kerja pertanian, dan lokasi agrowisata yang ada, maka lokasi sasaran prioritas inovasi

pengentasan kemiskinan melalui agrowisata adalah Kecamatan Soko. Wilayah Soko memiliki jumlah penduduk miskin miskin dan pekerja tani yang besar, serta terdapat kawasan agrowisata yang sudah ada.



Gambar 61. Peta Prioritas Lokasi Sasaran Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem, Buruh Tani, dan Lokasi Eksisting Agrowisata Kab. Tuban Per Kecamatan.

Sumber: DKPU ITS, 2023 (Diolah)